



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6 /Kep. 374-Diskominfo/2024
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, maka diperlukan arsitektur yang handal untuk melakukan akselerasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan peningkatan kualitas Arsitektur untuk mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai ketentuan Pasal 36 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pedoman pelaksanaan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan Arsitektur di dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.12.6 /Kep.374 -Diskominfo/2024

TANGGAL : 2 Agustus 2024

TENTANG : PENETAPAN ARSITEKTUR SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026**

**BAB 1
PENDAHULUAN**

1.1 LATAR BELAKANG

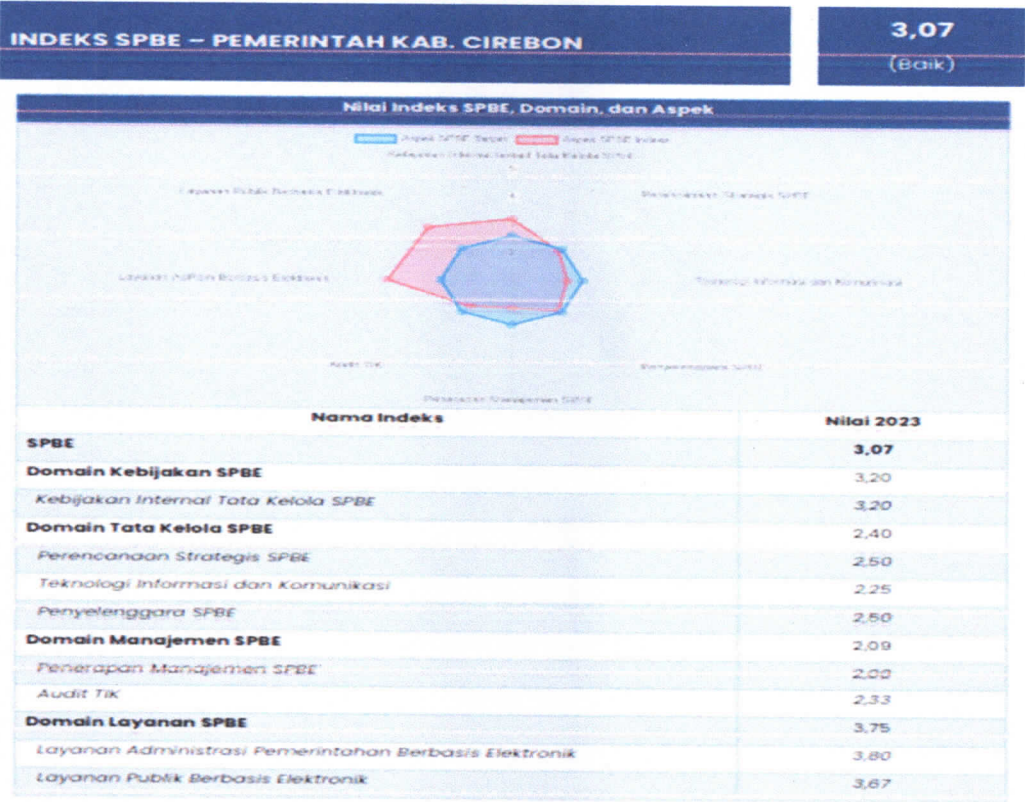
Pemerintahan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang berakhir pada periode perencanaan jangka menengah di Tahun 2024 sebagaimana berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati pada periode 2019- 2024. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengamanatkan untuk dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Konsekuensi regulasi tersebut terutama bagi daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 atau tahun 2024 akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah. Salah satu konsentrasi terbesar di daerah kemudian adalah penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah yang habis masa berlakunya seiring habisnya masa jabatan kepala daerah.

Menindaklanjuti konsekuensi regulasi tersebut Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi bagi daerah dengan periode rencana pembangunan jangka menengah berakhir pada tahun 2024 agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2025-2026 yang kemudian disebut dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2025-2026. Bersamaan dengan itu, kepala perangkat daerah juga diperintahkan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota berdasarkan RPD yang ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penyesuaian dokumen arsitektur SPBE yang sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan

Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon sehingga penyelarasan program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan antara dokumen pembangunan dengan dokumen arsitektur SPBE.

Pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 telah dilaksanakan oleh evaluator eksternal Kemenpan-RB dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan sebanyak 47 indikator. Instrumen ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang tata cara pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah dilakukan evaluasi SPBE secara eksternal dengan hasil sebagai berikut.



Gambar 1 Hasil Indeks SPBE Tahun 2023 Kabupaten Cirebon

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2023 tersebut menjadi dasar penyusunan arsitektur SPBE 2025-2026. Dokumen ini merupakan bagian strategi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan digitalisasi SPBE Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan pelayanan publik dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka reformasi birokrasi. Implementasi SPBE diharapkan sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 tertuang dalam RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, yang didalamnya berisi tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Cirebon tentang kondisi atau situasi yang akan diwujudkan dalam 2 (dua) tahun ke depan.

Berdasarkan dengan visi tersebut, maka perlu adanya peningkatan pelayanan publik untuk sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi kreatif. Saat ini revolusi industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet untuk segalanya (*Internet of Things or IoT*), kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi (*Big Data*), teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi (*Cloud Computing*), hingga kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Perubahan pada lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi revolusi industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintah ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan yang dapat diimplementasikan pada reformasi di kegiatan pemerintahan.

Penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dengan penerapan sistem, proses, prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien dan terukur. Secara umum SPBE juga mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan

menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan. Selain Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai dasar regulasi penerapan digitalisasi pemerintahan, diperlukan juga akselerasi pembangunan aparatur sipil negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan delapan area perubahan yang melingkupi penataan dan pengelolaan pengawasan, akuntabilitas kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

SPBE merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk itu SPBE harus dibangun secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama terjadinya integrasi pemerintahan.

Oleh karena itu, perlu disusun sebuah dokumen yang dijadikan sebagai cantolan perencanaan selain dokumen RPJMD, RPD yang merupakan dokumen utama namun perlu ditunjang oleh dokumen arsitektur SPBE dimana bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu secara nasional dan lingkup sendiri.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon 2025-2026 ini adalah

- a. Maksud penyusunan Arsitektur SPBE Kab. Cirebon sebagai panduan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengimplementasikan SPBE di Kabupaten Cirebon.
- b. Proses implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon menjadi lebih terarah dan komprehensif.
- c. Serta supaya terciptanya perencanaan dan implementasi SPBE di Kabupaten Cirebon yang terintegrasi antar pemangku kepentingan.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon 2025-2026 ini adalah:

- a. Menyusun kerangka kerja (*framework*) tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat berbasis sistem elektronik yang efektif dan efisien;
- b. Memberikan arahan strategis pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Kabupaten Cirebon agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Arsitektur dijadikan sebagai pengembangan dan pengelolaan layanan SPBE di Kabupaten Cirebon.

1.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 12, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96).

BAB II

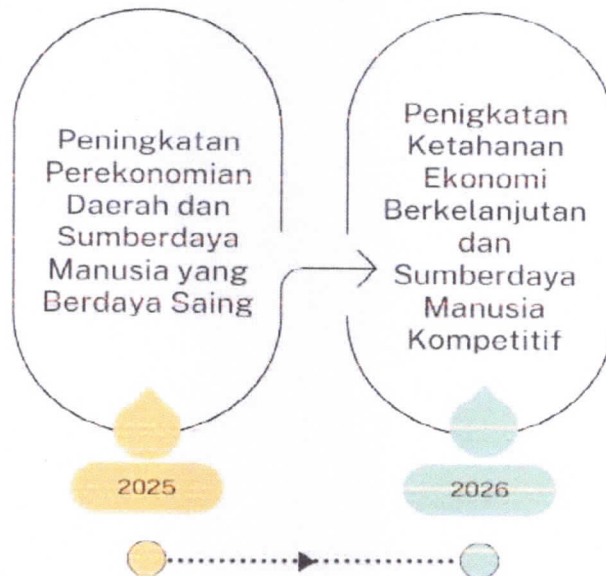
KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS SPBE

2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Bab ini memberikan penjelasan terkait upaya-upaya yang akan dilakukan berupa strategi yang dipilih dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon serta arah kebijakan dari setiap strategi pembangunan terpilih. Upaya yang dilakukan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 2025 - 2026 yang akan datang didukung oleh program pembangunan daerah yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran Pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi pembangunan terdiri dari tema-tema yang secara simultan dari tahun 2025-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon yang telah ditetapkan.

Penyusunan tema pembangunan RPD Tahun 2025-2026 dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran RPD, prioritas pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan, isu strategis, dan kebijakan nasional serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun fokus atau tema pembangunan Kabupaten Cirebon setiap tahun selama 2 (dua) tahun periode RPD 2025-2026 disajikan sebagai berikut:



Gambar 2 Tema Pembangunan untuk Perwujudan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Tema pembangunan 2025 sampai 2026 menekankan keberlanjutan pembangunan dari periode sebelumnya yang dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, dengan penjelasan tema dan arah kebijakan tahunan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Fokus Pembangunan tahun 2025 dengan tema “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing” diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan optimalisasi pelayanan dan pengembangan potensi SDM yang berdaya saing untuk menjawab tantangan perkembangan zaman, peningkatan sektor ekonomi memiliki nilai strategis tinggi. Pengembangan ekonomi diarahkan pada sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan; perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif; dan pertanian, peternakan, dan perikanan. Sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal. Berkembangnya perekonomian daerah yang dibarengi dengan meningkatnya produktivitas daerah terutama diarahkan

dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan mendorong daya saing daerah dan berdampak positif bagi investasi daerah, dengan arah kebijakan meliputi:

1. Peningkatan kompetensi dan kinerja ASN berdasarkan kebutuhan organisasi.
2. Peningkatan kualitas penatausahaan kinerja keuangan.
3. Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan kualitas dan partisipasi Angkatan kerja di berbagai bidang termasuk bagi penyandang disabilitas
5. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan serta pariwisata.
6. Mendorong peningkatan persebaran investasi serta peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah.
7. Peningkatan kualitas SDM Masyarakat miskin, penguatan pemberdayaan Masyarakat, pemberian kemudahan akses usaha dan pasar berbasis potensi lokal serta peningkatan kualitas layanan dasar kepada Masyarakat miskin.
8. Penguatan ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan kualitas Pendidikan.
9. Peningkatan pemerataan dan kualitas akses pelayanan Kesehatan dengan pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan jumlah dan distribusi SDM Kesehatan secara bertahap dan menyeluruh.
10. Perkuatan jejaring kemitraan dan peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan penanganan stunting.
11. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi Perempuan dalam Pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan.
12. Pemantapan kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, Termasuk kelompok rentan, serta

implementasi Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.

13. Peningkatan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi.

2.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026

Fokus Pembangunan tahun 2026 dengan tema “Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan dan Sumberdaya Manusia Kompetitif” diarahkan dalam rangka pencapaian target akhir Pembangunan jangka menengah periode 2 tahun. Penekanan pembangunan masih diberikan pada pemantapan perekonomian berbasis sektor-sektor unggulan dengan mengoptimalkan pemberdayaan SDM serta infrastruktur yang berdaya saing. Pembangunan pada akhir periode RPD diarahkan pada perwujudan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang berarti bahwa Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk pertumbuhan namun juga pemerataan serta perluasan akses dan kesempatan dengan arah kebijakan meliputi:

1. Pemantapan manajemen organisasi pemerintahan, kompetensi dan kinerja ASN.
2. Pemantapan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.
3. Penguatan akses dan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi publik yang didukung oleh peningkatan informasi digital.
4. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja di berbagai bidang pembangunan serta kualitas kompetensi tenaga kerja dengan pemberdayaan angkatan kerja, pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang layak termasuk bagi penyandang disabilitas.
5. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata dan mendorong akses pemasaran yang lebih luas.

6. Penguatan kelembagaan mendukung industri yang berbasis teknologi, inovasi; menguatkan kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM berbasis sektor unggulan; penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam mendorong penanaman modal yang berkelanjutan; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah.
7. Pemantapan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat miskin yang mendorong kemandirian yang didukung oleh pemantapan kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin.
8. Peningkatan sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan.
9. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standar melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi.
10. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan.
11. Penguatan koordinasi antar *stakeholder* dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.
12. Pemantapan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi.

2.2 Program Prioritas

Program prioritas daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Program prioritas daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran Pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, strategi pembangunan daerah. Mengingat strategis dan pentingnya program prioritas daerah, maka dalam pelaksanaannya perlu diprioritaskan dan mendapatkan dukungan penganggaran yang seimbang dengan

target yang akan dicapai. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 2 (dua) tahun kedepan, Pembangunan Kabupaten Cirebon diprioritaskan pada:

1. Pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK.
2. Pelayanan kesehatan sesuai standar dan terjangkau.
3. Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan.
4. Kualitas dan taraf hidup masyarakat serta perlindungan sosial.
5. Keamanan, ketertiban dan ketahanan daerah.
6. Infrastruktur wilayah yang baik dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
7. Reformasi birokrasi serta inovasi pelayanan publik.

2.3 Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Kabupaten Cirebon

Dalam rangka melaksanakan prioritas agenda pembangunan (pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi) perlu ditentukan metode pelaksanaan untuk kelima agenda tersebut secara cepat, tepat dan terukur. Penerapan SPBE dalam menyelenggarakan pemerintahan diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut. Pelaksanaan penerapan SPBE tersebut dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon.

Kerangka kerja SPBE pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang didesain sedemikian rupa, sebagai konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional, maupun di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta peningkatan pelayanan publik yang

berkualitas dan terpercaya diharapkan dapat diwujudkan melalui tata kelola SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

- a) Arsitektur SPBE;
- b) Peta Rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Rencana dan Anggaran SPBE;
- d) Proses Bisnis;
- e) Data dan Informasi;
- f) Infrastruktur SPBE;
- g) Aplikasi SPBE;
- h) Keamanan SPBE; dan
- i) Layanan SPBE.

Salah satu unsur SPBE di atas adalah Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang terdiri dari:

- a) Domain Arsitektur Proses Bisnis;
- b) Domain Arsitektur Layanan SPBE;
- c) Domain Arsitektur Data dan Informasi;
- d) Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e) Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
- f) Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang didalamnya memuat Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon menggambarkan keterpaduan Proses Bisnis, Data dan Informasi, Layanan SPBE, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE. Kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah

Kabupaten Cirebon dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar di bawah ini.

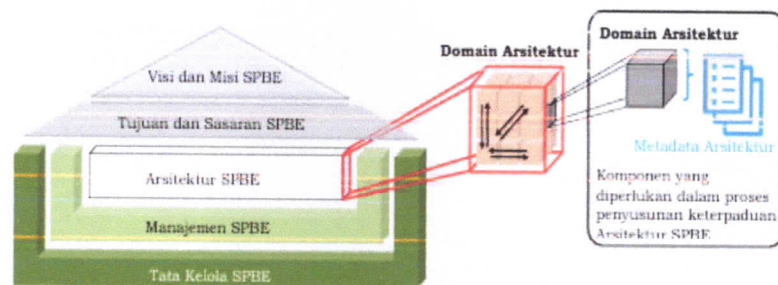


Gambar 3 Kerangka Kerja SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan Arsitektur SPBE yang diterapkan secara menyeluruh melalui pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, dengan menggambarkan secara terpadu, pada seluruh domain didalamnya, sehingga memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan panduan dalam tata kelola SPBE di Perangkat Daerah. Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk melakukan identifikasi pada setiap domain, maka pada setiap domain terdapat struktur bertingkat, yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut

dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi antar domain dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten Cirebon, yang merupakan deskripsi dari setiap substansi domain arsitektur SPBE, sebagaimana terlihat pada ilustrasi di Gambar di bawah ini.



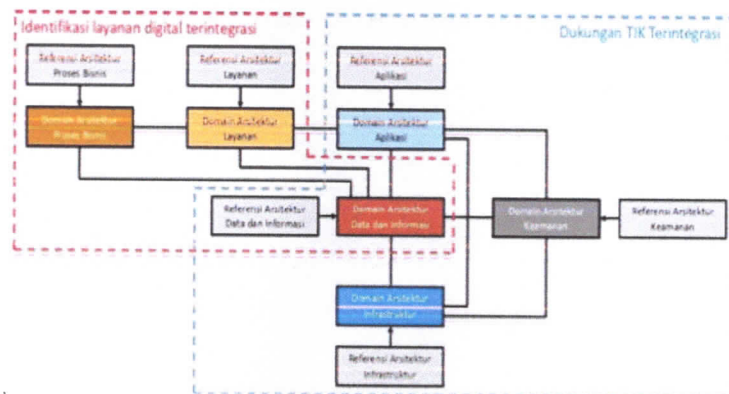
Gambar 4 Substansi Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Kerangka Kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan kerangka kerja SPBE sebagai panduan penerapan dan pengelolaan SPBE nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, maka kerangka kerja Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon yang akan dijelaskan pada bab ini, menjadi panduan untuk mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Kabupaten Cirebon, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a) Referensi Arsitektur Proses Bisnis;
- b) Referensi Arsitektur Data dan Informasi;
- c) Referensi Arsitektur Layanan SPBE;

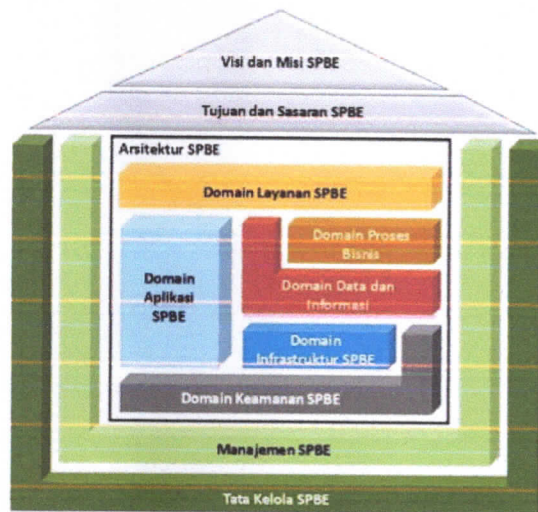
- d) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE;
- e) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
- f) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu: a. Domain Arsitektur Proses Bisnis, b. Domain Arsitektur Data dan Informasi, c. Domain Arsitektur Layanan SPBE, d. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE, e. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE dan f. Domain Arsitektur Keamanan SPBE. Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar berikut.



Gambar 5 Keterkaitan Referensi Arsitektur SPBE

Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi Layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru). Selanjutnya ilustrasi kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat dimasukkan dalam ilustrasi kerangka kerja SPBE, sebagaimana pada Gambar berikut.



Gambar 6 Pengelompokan Penyelenggaraan Arsitektur SPBE

2.4 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Kabupaten CIREBON

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi dan SDM SPBE.

1. Tata Kelola SPBE

Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon.

a. Masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dalam rangka mewujudkan SPBE yang terpadu. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar

instansi pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon adalah:

- 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
- 2) membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon; dan
- 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu meliputi:

- a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
- b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
 - 1) meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 - 2) melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah dan pimpinan perangkat daerah;
 - 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

2. Layanan SPBE

Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat:

- a. layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 - 1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 - 2) membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.

Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

- a. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. meneruskan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.
3. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
 - 1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah;

- 2) Peningkatan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dalam penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dengan cara:
 - a) mandiri yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah;
 - b) terintegrasi yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon;
 - c) terstandarisasi yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - d) menjangkau semua instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.
- 3) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan sentralisasi Pusat Data di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
- 4) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi dan menjangkau instansi pemerintah daerah adalah:
 - a) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 - b) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan SPBE dan memudahkan integrasi umum proses bisnis pemerintahan. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi terintegrasi.

c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas:

- 1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan penyusunan program kegiatan.
- 2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
- 3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - a) menerapkan manajemen data yang terpadu;
 - b) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
 - c) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon:

- 1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah melalui komitmen, keteladanan dan arahan dari pimpinan. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
- 2) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di masing-masing instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon adalah:
 - a) meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cirebon; dan

- b) membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
 - b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan dan memenuhi harapan/ kebutuhan pengguna.
 - 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - a) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
 - b) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

Tabel 1 Inisiatif strategis SPBE Perangkat Daerah

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
A. Tata Kelola SPBE				
1.	Pembangunan Arsitektur SPBE	Arsitektur SPBE	Diskominfo	2024
2.	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	Diskominfo	Setiap Tahun
3.	Penguatan Kebijakan SPBE	Regulasi per tahapan	Diskominfo	Setiap Tahun

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
B. Layanan SPBE				
4.	Survei Pengguna SPBE	Survei Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	Diskominfo /Bagian Organisasi	Setiap Tahun
5.	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Diskominfo /Bagian Organisasi	2024
		Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah		
6.	Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Administasi Pemerintahan Pemerintah Daerah	Diskominfo /Bagian Organisasi	2024
		Portal Pelayanan Administasi Pemerintahan Pemerintah Daerah		
7.	Penyelenggara an Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE	Diskominfo	2024
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
8.	Penyediaan Pusat Data	Pusat Data	Diskominfo	2024 ISO 27001
9.	Penyediaan Jaringan Intra	Jaringan Internet	Diskominfo	2024

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
	Pemerintah	untuk seluruh PD dan NOC		
10.	Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Diskominfo	2024
11.	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai	Cloud Service <ul style="list-style-type: none">• Integrasi Kanal Layanan• Repositori Aplikasi Umum• Kajian Teknologi Cloud Service	Diskominfo	2024
12.	Pembangunan Portal Data	<ul style="list-style-type: none">• Dukungan TIK Portal Data• Integrasi Data dan• Pengelolaan Portal Data	Diskominfo	2024
13.	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi	Manajemen Keamanan Informasi <ul style="list-style-type: none">• Teknologi Keamanan Informasi	Diskominfo	2024
14.	Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan Untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat	Penerapan Big Data Pemerintah	Diskominfo	2025

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Penanggung Jawab	Target Waktu
D. Sumber Daya Manusia SPBE				
15.	Promosi Literasi SPBE	Pelatihan dan Sosialisasi	BKPSDM	2024
16.	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	Standar Kompetensi Teknis SPBE <ul style="list-style-type: none"> • Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE • Pola Remunerasi Bidang SPBE • Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi 	BKPSDM & Bag. Organisasi Sekretariat Daerah	2024
17.	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	Forum Kolaborasi SPBE	Bappelitbangda & Bag. Organisasi Sekretariat Daerah	2024

BAB III

ARSITEKTUR SPBE EKSISTING

3.1. Arsitektur Domain Proses Bisnis

Arsitektur domain proses bisnis menggambarkan kondisi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah sesuai ketugasan dan fungsi berdasarkan dokumen SOTK. Pemetaan proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah ini selanjutnya dianalisis untuk dipetakan ke dalam taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis SPBE Nasional. Arsitektur proses bisnis ini terdiri atas katalog proses bisnis yang ditunjukkan sebagai berikut ini.

3.1.1. Katalog Proses Bisnis

Katalog proses bisnis ini berisi deskripsi mengenai proses yang dilakukan di masing-masing perangkat daerah untuk mendukung tercapainya target dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon 2025-2026. Katalog ini disusun berdasarkan hasil pemetaan terhadap peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 169 Tahun 2023. Sedangkan Level 1,2 dan 3 mengacu pada kodifikasi arsitektur proses bisnis SPBE nasional dan untuk level 4 hingga level 6 mengacu pada proses bisnis daerah.

Tabel 2 Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kabupaten Cirebon

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.05 PENGUATAN KEWIRUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
	lingkungan								MENENGAH
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.01 INDUSTRI	RAB.02.01.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.02 PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
CNB-	Meningkatkan	CNB-	Meningkatkan	Perekonomian	Program	Dinas	RAB.02	RAB.02.02	RAB.02.02.04

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
05	pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	05.1	Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	peningkatan sarana distribusi perdagangan	Perdagangan dan Perindustrian	EKONOMI DAN INDUSTRI	PERDAGANGAN	OPTIMALISASI AKSES PASAR INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI PERDAGANGAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.02 PERDAGANGAN	RAB.02.02.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBUAKAN PERDAGANGAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta	Program peningkatan diversifikasi dan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
	berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		masyarakat	ketahanan pangan	ketahanan pangan Masyarakat				TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.05 PENINGKATAN PENGELOLAAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-	Meningkatkan	CNB-	Meningkatkan	Perekonomian	Program	Dinas Pertanian	RAB.02	RAB.02.03	RAB.02.03.07

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
05	pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	05.2	ketahanan pangan masyarakat	inklusiif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		EKONOMI DAN INDUSTRI	PERTANIAN	PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusiif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusiif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusiif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan	Perekonomian inklusiif dan berdaya saing serta	Program peningkatan diversifikasi dan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
	berkeadilan, berkelanjutan dan berawasan lingkungan		masyarakat	ketahanan pangan	ketahanan pangan Masyarakat	Pangan dan Perikanan			DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBUAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berawasan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
	lingkungan				kemandirian pangan				
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.17 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program penanganan kerawanan pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.19 KETERSEDIAAN PANGAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program penangananan kerawanan pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengawasan keamanan pangan	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.22 KEAMANAN PANGAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.03 PERTANIAN	RAB.02.03.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.03 PENGELOLAAN

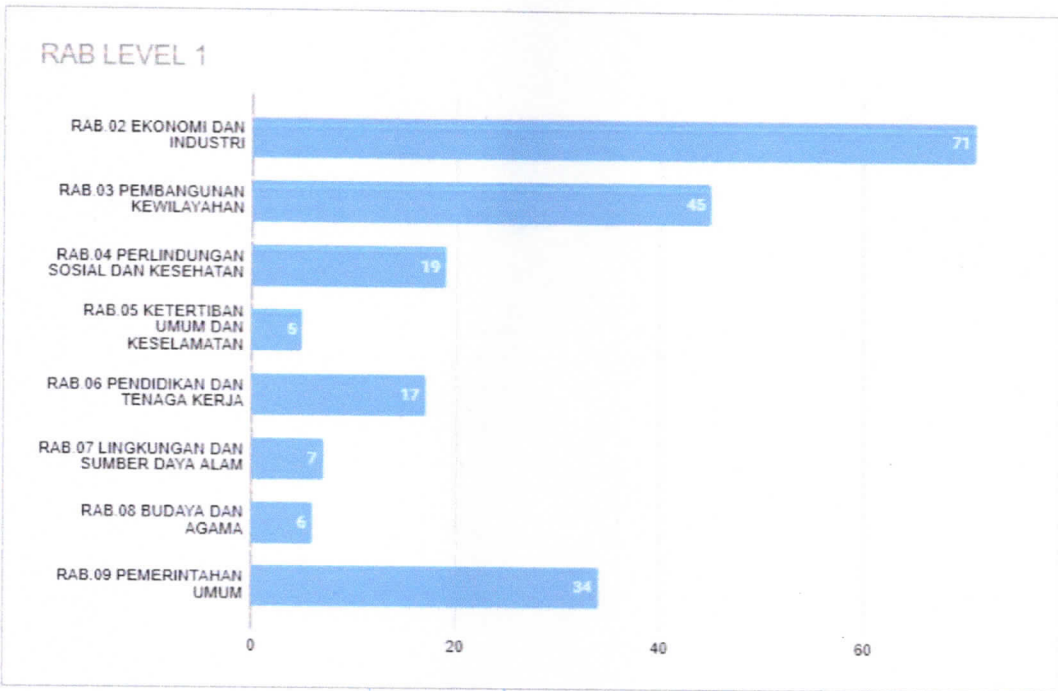
ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
	pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		pangan masyarakat	berdaya saing serta ketahanan pangan	diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat		INDUSTRI		PAKAN TERNAK
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan Masyarakat	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.06 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PETERNAKAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk ketahanan pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.08 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
	dan berwawasan lingkungan				Kedaulatan dan kemandirian pangan				KOMODITAS PETERNAKAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS PETERNAKAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN PETERNAKAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Dinas Pertanian	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.05 PETERNAKAN	RAB.02.05.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI, PEMBANGUNAN, PETERNAKAN
CNB-	Meningkatkan	CNB-	Meningkatkan	Perekonomian	Program	Dinas Ketahanan	RAB.02	RAB.02.06	RAB.02.06.01

ID Proses	Nama Proses	ID Sub Proses	Nama Sub Proses	Prioritas Daerah RPD 2025-2026	Nama Program RPD 2025-2026	Perangkat Daerah Pengampu	RAB LEVEL 1	RAB LEVEL 2	RAB LEVEL 3
05	pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	05.2	ketahanan pangan masyarakat	inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	pengelolaan perikanan tangkap	Pangan dan Perikanan	EKONOMI DAN INDUSTRI	PERIKANAN	PENGLOLAAN PERIKANAN TANGKAP
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengelolaan perikanan budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.02 PENGLOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
CNB-05	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	CNB-05.2	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.06 PERIKANAN	RAB.02.06.04 PENGAWASAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
CNB-03	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	CNB-03.2	Meningkatkan daya Saing Angkatan Kerja	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pengembangan iklim penanaman modal	DPMPTSP	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
CNB-03	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial	CNB-03.2	Meningkatkan daya Saing Angkatan Kerja	Perekonomian inklusif dan berdaya saing serta ketahanan pangan	Program pelayanan penanaman modal	DPMPTSP	RAB.02 EKONOMI DAN INDUSTRI	RAB.02.08 INVESTASI	RAB.02.08.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL

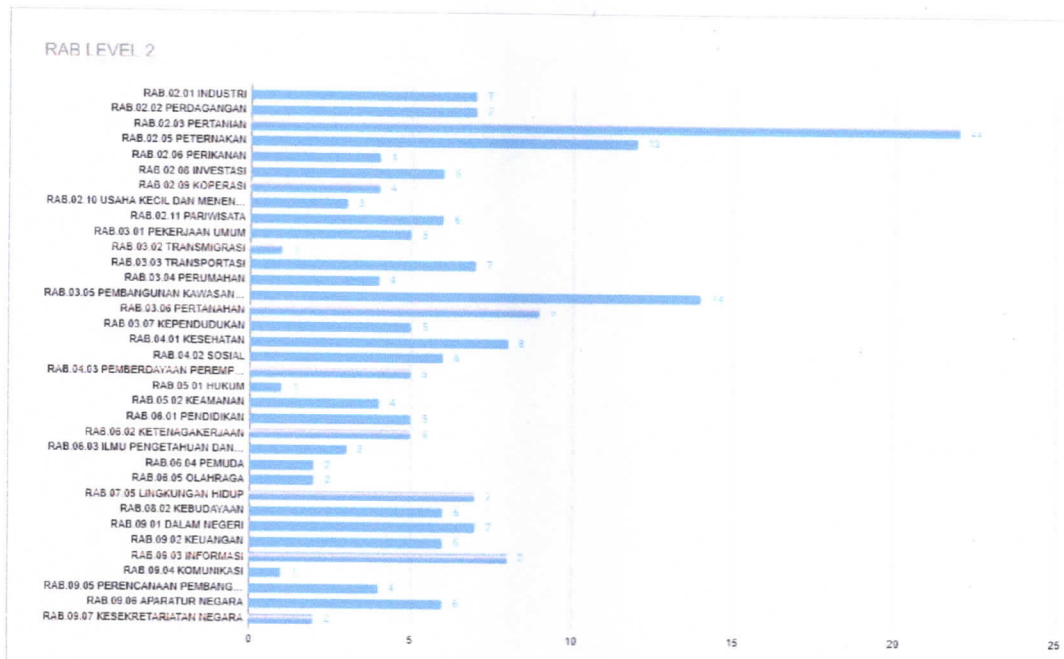
3.1.2. Analisis Proses Bisnis

Berikut beberapa analisa singkat terhadap proses bisnis eksisting berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan bersama dengan Perangkat Daerah (PD) terkait.



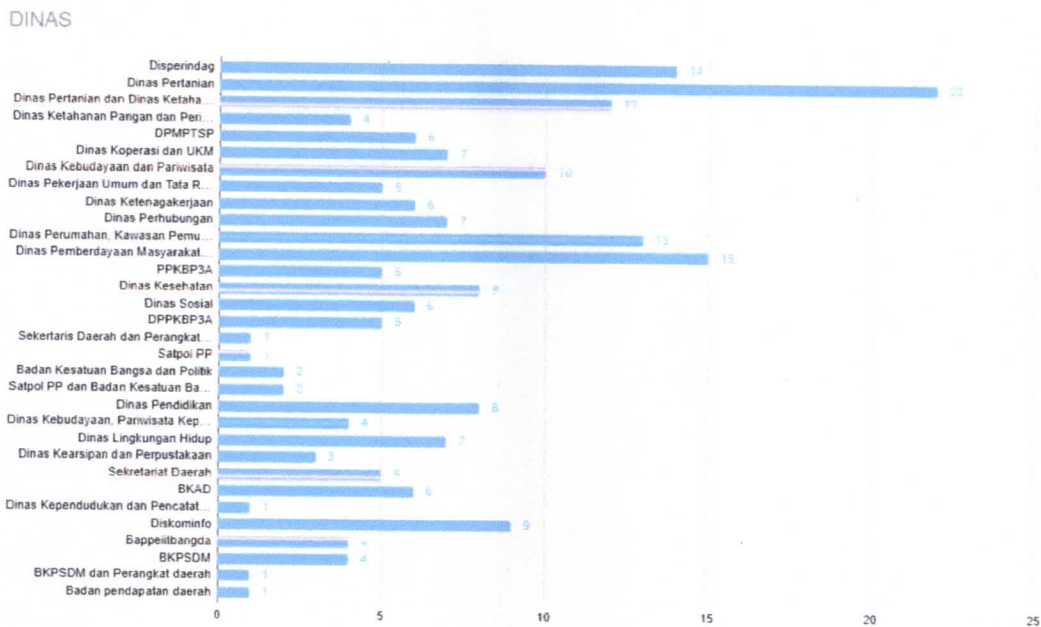
Gambar 7 RAB level 1 Nasional

Berdasarkan Grafik diatas terlihat bahwa sebagian besar proses bisnis yang terinventarisir masuk pada kategori RAB 02 Ekonomi dan Industri, diikuti dengan RAB 03 Pembangunan Kewilayahan dan RAB 04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan. Adapun kondisi ini tentu bisa terus bergerak dan berubah sesuai dengan perkembangan daftar metadata probis yang terus dikembangkan dan diinovasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.



Gambar 8 RAB level 2 Nasional

Berdasarkan informasi yang tertuang pada grafik RAB level 2 RAB nasional diatas, dari 204 Proses Bisnis Eksisting, RAB masuk dalam 3 besar terbanyak terdapat pada, RAB.02.03 Pertanian dengan jumlah 22 probis, diikuti dengan RAB.03.05 Pembangunan kawasan atau daerah tertinggal dan RAB.02.05 Peternakan dengan jumlah 12 probis. Sedangkan urutan untuk RAB lainnya dilanjutkan oleh RAB.03.06 Pertanahan dan RAB.04.01 Kesehatan dengan jumlah 8 probis, Selain itu, terdapat pula RAB yang hanya memiliki 1 probis yakni pada RAB.03.02 Transmigrasi, RAB.05.01 Hukum, RAB.09.04 Komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa dari 45 Referensi Arsitektur Bisnis Nasional di Pemerintah Kabupaten Cirebon hanya mencakup 35 Referensi Arsitektur Bisnis Nasional. Adapun kondisi ini tentu dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan aktivitas meng-update arsitektur proses bisnis secara berkelanjutan.



Gambar 9 Jumlah Proses Bisnis Perangkat Daerah

Mengacu pada diatas terkait kepemilikan proses bisnis di masing-masing Perangkat Daerah (PD), grafik tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan proses bisnis terbagi di setiap PD dengan beberapa proses bisnis yang dimiliki. Dinas Pertanian merupakan PD yang memiliki proses bisnis terbanyak dengan jumlah 22 proses bisnis, diikuti dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15 proses bisnis, dan Disperindag dengan jumlah 14 proses bisnis. Berdasarkan hasil grafik tersebut, dapat diungkapkan bahwa kepemilikan proses bisnis di masing-masing PD sangat beragam dan tergantung pada karakteristik dan tanggung jawab masing-masing PD. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang diberikan terkait proses bisnis masih belum mencakup seluruh bidang di PD. Adapun kondisi ini tentu dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan mengupdate arsitektur proses bisnis secara berkelanjutan.

3.2 Arsitektur Domain Proses Layanan

3.2.1. Katalog Layanan

Layanan dalam Arsitektur SPBE Nasional merupakan sebuah proses pemerintahan yang memiliki pelanggan (customer), baik itu internal (PD, ASN) maupun eksternal (instansi luar, swasta dan masyarakat). Berikut ini dijelaskan mengenai katalog layanan dari seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Cirebon, dimana Level 1 & 2 mengacu pada modifikasi referensi arsitektur layanan SPBE nasional. Selanjutnya untuk level 3 mengacu pada layanan yang ada di seluruh PD. Berdasarkan hasil survei telah terinventarisir sejumlah 29 layanan dimana terdapat 20 layanan yang terdigitalisasi sehingga bisa disimpulkan bahwa digitalisasi di Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah berjalan 68,97%.

Tabel 3 Arsitektur Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
LAY - 001	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Perencanaan dan Pembangunan Industri	DATA Nilai Produksi	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.01 PENINGKATAN DAYA SAING DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI
LAY - 002	Layanan pengelolaan sistem informasi industri nasional	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Data Nilai Investasi Industri	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.02 PENGUATAN IMPLEMENTASI MAKING INDONESIA 4.0
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pembinaan Industri Regional	Data Kapasitas Produksi Industri	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.03 PENINGKATAN KEMAMPUAN INDUSTRI BARANG DAN JASA SERTA INDUSTRI HALAL DALAM NEGERI
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Data Nilai Investasi Industri	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pembinaan Industri Regional	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.05 PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Data Jumlah Perusahaan Industri	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.06 PEMERATAAN PERSEBARAN INDUSTRI
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.05 INDUSTRI	RAL.01.05.07 PENGELOLAAN INDUSTRI KREATIF

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pengelolaan Perdagangan	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.01 PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pengelolaan Perdagangan	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.02 PENGUATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pengelolaan Perdagangan	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.03 PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Data Nilai Ekspor terinci	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.04 OPTIMALISASI AKSES PASAR INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI PERDAGANGAN
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Data Nilai Ekspor terinci	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.05 PENINGKATAN KINERJA EKSPOR NASIONAL
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	Data Jumlah Kegiatan Pengawasan	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.06 OPTIMALISASI PERANAN PBK, SRG, DAN PLK
LAY - 003	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pengelolaan Perdagangan	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.06 PERDAGANGAN	RAL.01.06.07 OPTIMALISASI REKOMENDASI KEBIJAKAN PERDAGANGAN
LAY - 004	Layanan sarana pertanian yang	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.01 PENGELOLAAN BENIH

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
	dikembangkan (Benih Padi)		Pertanian					TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 005	Layanan sarana pertanian yang dikembangkan (Benih Mangga)	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 006	Layanan luas tanam padi	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 007	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.01 PENGELOLAAN BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 007	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 007	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.03 PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 007	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.04 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 007	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.05 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
LAY - 007	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.06 PENINGKATAN PEMASARAN HASIL KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 008	Layanan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian	DINAS PERTANIAN	Penyuluhan Pertanian	Data Jumlah Kelompok Tani	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.07 PENGEMBANGAN KUALITAS SDM PERTANIAN
LAY - 008	Layanan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian	DINAS PERTANIAN	Penyuluhan Pertanian	Data Jumlah Kelompok Tani	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.08 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PETANI
LAY - 009	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Pembinaan Pertanian Regional	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.09 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 009	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Pembinaan Pertanian Regional	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.10 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 009	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Pembinaan Pertanian Regional	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.11 PENGELOLAAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
LAY - 009	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Pembinaan Pertanian Regional	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 009	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Data Luas Tanam dan Panen	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.13 PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN
LAY - 010	Layanan kejadian zoonosis	DINAS PERTANIAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Data Jumlah Realisasi Penyaluran Pupuk	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.14 PENGELOLAAN PUPUK DAN PESTISIDA
LAY - 010	Layanan kejadian zoonosis	DINAS PERTANIAN	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian	Data Saluran Irigasi Tersier	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.15 PENGELOLAAN IRIGASI PERTANIAN, KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP
LAY - 011	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Sebaran Penerima Bantuan Alsintan	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.16 PENGELOLAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN
LAY - 011	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Daftar Rekapitulasi Bantuan Pemerintah	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.17 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
LAY - 011	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.18 PENGELOLAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BIDANG PERTANIAN DAN PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
LAY - 011	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Lahan Pangan dan Pertanian	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.19 KETERSEDIAAN PANGAN
LAY - 012	Layanan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Lahan Pangan dan Pertanian	Website Dinas Pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.20 STABILITAS PASOKAN DAN HARGA PANGAN
LAY - 012	Layanan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Dinas Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Nilai Indeks Ketahanan Pangan	SISTEM INFORMASI KOMODITAS HARGA PANGAN (SIKOMPA)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.21 KERAWANAN PANGAN DAN GIZI
LAY - 012	Layanan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Dinas Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Nilai Indeks Ketahanan Pangan	SISTEM INFORMASI KOMODITAS HARGA PANGAN (SIKOMPA)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.22 KEAMANAN PANGAN
LAY - 012	Layanan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Dinas Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Perkembangan Ketersediaan Energi	SISTEM INFORMASI KOMODITAS HARGA PANGAN (SIKOMPA)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.07 PERTANIAN	RAL.01.07.23 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
	Pertanian							
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.01 PENGELOLAAN BENIH/ BIBIT TERNAK
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.02 PENGEMBANGAN KOMODITAS PETERNAKAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.03 PENGELOLAAN PAKAN TERNAK
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.04 PENGELOLAAN KESEHATAN HEWAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.05 PENGELOLAAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.06 PENINGKATAN PENGELOLAAN PASCA PANEN PETERNAKAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.07 PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL KOMODITAS PETERNAKAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.08 PEMASARAN HASIL KOMODITAS

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	PETERNAKAN RAL.01.09.09 PENGELOLAAN STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN KOMODITAS PETERNAKAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.10 PENGELOLAAN STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PASCA PANEN PETERNAKAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.11 PENGELOLAAN STANDARISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN PRASARANA DAN SARANA PETERNAKAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.12 PENGELOLAAN REKOMENDASI KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI PEMBANGUNAN PETERNAKAN
LAY - 013	Layanan Peningkatan kualitas Peternakan	DINAS PERTANIAN	Peningkatan Produksi Pertanian	Data Jumlah Populasi Ternak	website dinas pertanian	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.09 PETERNAKAN	RAL.01.09.13 PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PETERNAKAN
LAY - 014	Layanan produksi perikanan tangkap	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Data Produksi Perikanan Tangkap	Website DInas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.01 PENGELOLAAN PERIKATAN TANGKAP

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
LAY - 015	Layanan Produksi perikanan budidaya	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Data Produksi Perikanan Budidaya	Website Dinas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.02 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDI DAYA
LAY - 016	Layanan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Hasil Perikanan	Data Nilai Produksi Perikanan	Website Dinas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.03 PENGUATAN DAYA SAING PRODUK PERIKANAN
LAY - 017	Layanan prosentase kepatuhan usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Website Dinas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.10 PERIKANAN	RAL.01.10.04 PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN
LAY - 019	Layanan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) di Kabupaten Cirebon	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Data Jenis Pelayanan Perizinan	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.01 PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
LAY - 019	Layanan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) di Kabupaten Cirebon	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Data Jumlah Investor	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.02 KERJA SAMA PENANAMAN MODAL
LAY - 020	Layanan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) yang mendapatkan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pelayanan Penanaman Modal	Data Jumlah Investor	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.03 PROMOSI PENANAMAN MODAL

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
	Informasi Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Cirebon	PINTU						
LAY - 021	Layanan tingkat kepatuhan dalam sektor penanaman modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	Data Jumlah perusahaan mendapatkan pengawasan dan penanaman modal	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.04 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
LAY - 022	Layanan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) di Kabupaten Cirebon	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	Data Jumlah Investor	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.05 HILIRISASI INVESTASI STRATEGIS
LAY - 023	Layanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perizinan dan Pendaftaran Usaha	Data Jenis Pelayanan Perizinan	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.12 INVESTASI	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAY - 024	Layanan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Data Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.01 PEMBINAAN KOPERASI
LAY - 024	Layanan Penguatan Tata Kelola	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi	Data Jumlah Koperasi yang mengikuti	SISTEM INFORMASI PENDATAAN	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.02 PENGELOLAAN PRODUKSI DAN PEMASARAN

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
	Kelembagaan Koperasi, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi			Pendidikan dan Pelatihan	UMKM (SITERUSMI)			KOPERASI
LAY - 025	Layanan koperasi yang mengalami peningkatan usaha	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemberdayaan dan Pembiayaan Koperasi	Data Jumlah Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.03 PEMBERDAYAAN DAN PEMBIAYAAN KOPERASI
LAY - 026	Layanan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Data Jumlah Koperasi	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.13 KOPERASI	RAL.01.13.04 PENGAWASAN KOPERASI
LAY - 027	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemberdayaan dan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Data Jumlah Usaha Mikro	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 USAHA MIKRO
LAY - 028	Layanan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Data Jumlah Usaha Mikro	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.01 USAHA MIKRO
LAY - 029	Layanan Pemberdayaan	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	Penggunaan dan Pemasaran	Data Jumlah Usaha Mikro	SISTEM INFORMASI	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL	RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH

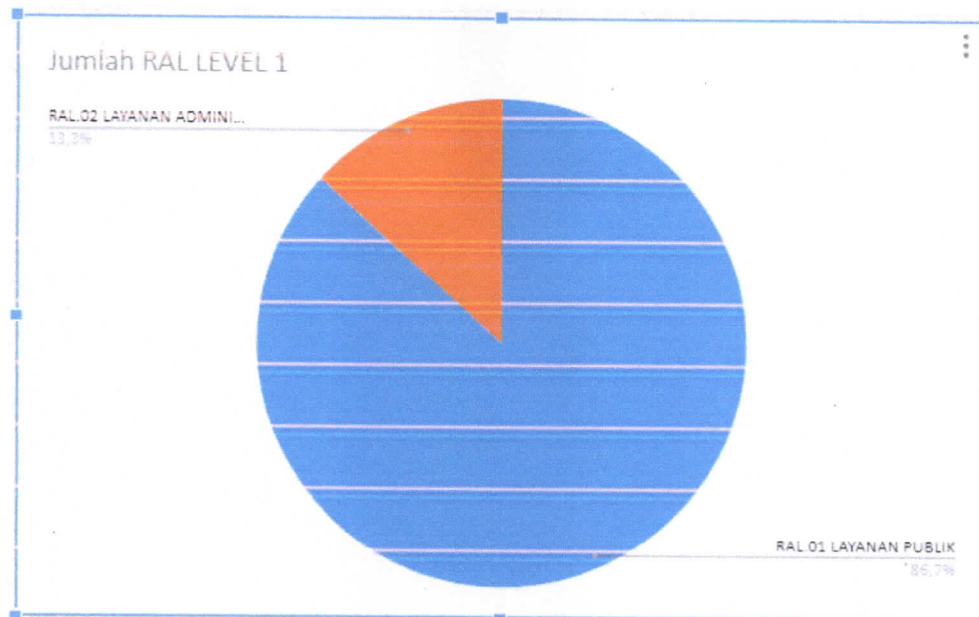
ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
	Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DAN MENENGAH	Produk Menengah, Usaha Dalam Negeri		PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)		DAN MENENGAH	
LAY - 030	Layanan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penggunaan dan Pemasaran Produk Menengah, Usaha Dalam Negeri	Data Jumlah Usaha Mikro	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.02 USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAY - 031	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penggunaan dan Pemasaran Produk Menengah, Usaha Dalam Negeri	Data Jumlah Wirausaha	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.03 KEWIRAUSAHAAN
LAY - 032	Layanan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Penggunaan dan Pemasaran Produk Menengah, Usaha Dalam Negeri	Data Jumlah Pertumbuhan Wirausaha	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.14 USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAL.01.14.03 KEWIRAUSAHAAN
LAY - 033	Layanan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Bersertifikat	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Data Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.01 SUMBERDAYA DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
LAY - 034	Layanan Pertumbuhan Kunjungan ada Obyek Daya Tarik Wisata diatas 10%	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Peningkatan daya tarik pariwisata	Data Jumlah Objek Wisata	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.02 DESTINASI PARIWISATA
LAY -	Layanan Market	DINAS	Pembinaan	Data Jumlah	Website Dinas	RAL.01 LAYANAN	RAL.01.15	RAL.01.15.03 INDUSTRI

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
035	Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pariwisata Regional	Objek Wisata	Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	PUBLIK	PARIWISATA	PARIWISATA
LAY - 035	Layanan Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Peningkatan daya tarik pariwisata	Data Kunjungan Wisatawan	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.04 PEMASARAN PARIWISATA
LAY - 036	Layanan HKI Ekonomi Kreatif yang dikembangkan	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Peningkatan daya tarik pariwisata	Data Kunjungan Wisatawan	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.05 PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENTS)
LAY - 037	Layanan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Bersertifikat	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pembinaan Pariwisata Regional	Data Daftar Usaha Pariwisata	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.15 PARIWISATA	RAL.01.15.06 KEBIJAKAN STRATEGIS PARIWISATA
LAY - 038	Layanan kualitas pelayanan DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Penyelenggaraan Jalan	Data Panjang Jalan	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.01 PENGELOLAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
LAY - 038	Layanan kualitas pelayanan DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Data Jumlah Sertifikat Laik Fungsi	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.02 PENGELOLAAN PEREKAYASAAN TEKNOLOGI DAN LAYANAN ADMINISTRATIF BIDANG PUPR
LAY -	Layanan kualitas	DINAS	Pengelolaan	Data Jumlah	Website Dinas	RAL.01 LAYANAN	RAL.01.17	RAL.01.17.03

ID LAYANAN	NAMA LAYANAN	UNIT KERJA	Program RPD	Nama DATA	APLIKASI	RAL LEVEL 1	RAL LEVEL 2	RAL LEVEL 3
038	pelayanan DPUTR	PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Sarana dan Prasarana Transportasi	Sertifikat Laik Fungsi	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PUBLIK	PEKERJAAN UMUM	PENGLOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PUPR
LAY - 038	Layanan kualitas pelayanan DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Data Jumlah Sertifikat Laik Fungsi	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.04 PENGLOLAAN KERJA SAMA DAN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR
LAY - 038	Layanan kualitas pelayanan DPUTR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Transportasi	Data Panjang Jalan	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.17 PEKERJAAN UMUM	RAL.01.17.05 PENGLOLAAN FASILITASI INFRASTRUKTUR DAERAH BIDANG PUPR
LAY - 043	Layanan tatakelola sektor perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data Jumlah Angkutan	Website Dinas Perhubungan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
LAY - 044	Layanan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data Jumlah Angkutan	Website Dinas Perhubungan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.01 PELAYANAN TRANSPORTASI
LAY - 045	Layanan kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum	DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data Jumlah Kendaraan wajib uji	Website Dinas Perhubungan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.02 PENGLOLAAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI
LAY - 046	Layanan Ketersediaan Perlengkapan Jalan	DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data Jumlah Pemasangan Sarana Prasarana Lalu Lintas	Website Dinas Perhubungan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.03 PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI
LAY - 047	Layanan tatakelola sektor perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Data Jumlah Kendaraan Angkutan	website Dinas Perhubungan	RAL.01 LAYANAN PUBLIK	RAL.01.19 TRANSPORTASI	RAL.01.19.04 AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS TRANSPORTASI

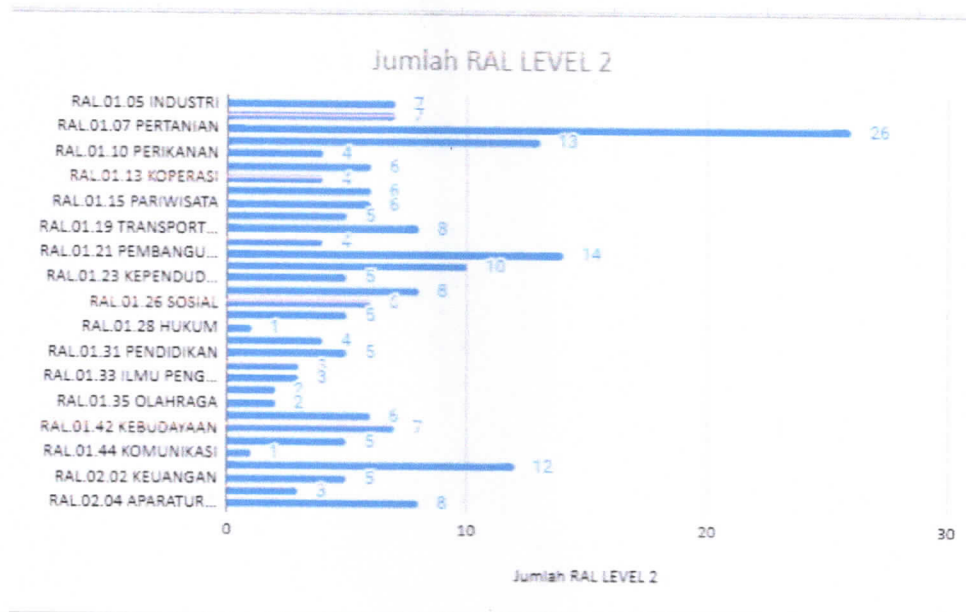
3.2.2 Analisis Diagram Layanan

Berdasarkan dari katalog layanan diatas, analisa terhadap kondisi Layanan eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 10 Persentase Arsitektur Layanan Kabupaten Cirebon

Berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Nasional terdapat 211 layanan yang dibagi menjadi 2 jenis layanan yaitu Layanan Publik dan Layanan Administrasi Pemerintahan. Untuk referensi arsitektur Layanan Publik sebanyak 183 layanan sedangkan layanan Administrasi Pemerintahan berjumlah 28 Layanan. Atas dasar tersebut, referensi layanan Nasional harus dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyesuaian dengan layanan daerah terutama untuk menciptakan layanan publik yang maksimal dan layanan pemerintahan yang terintegrasi, efisien dan transparan.



Gambar 11 Referensi Arsitektur Layanan Kabupaten Cirebon

Grafik ini menunjukkan jumlah layanan di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Data dibagi menjadi dua tingkat: Level RAL 1 dan Level RAL 2. Setiap arsitektur Layanan diwakili oleh kode RAL.01 untuk urusan pemerintahan. Sedangkan di diagram batang menjelaskan banyaknya fungsi layanan Pemerintahan/Perangkat daerah sesuai urusan Pemerintahan. Data Level RAL Level 2 menunjukkan jumlah total 17 Urusan Pemerintahan sesuai referensi arsitektur layanan Nasional, dengan fungsi layanan Pemerintahan terbanyak berada pada urusan Pertanian dengan jumlah fungsi sebanyak 26 fungsi layanan. Sebaliknya, bidang Hukum memiliki jumlah fungsi layanan paling sedikit, yaitu 1 layanan. Selain itu, berdasarkan hasil survei yang diberikan terkait layanan masih belum mencakup seluruh bidang di Perangkat Daerah. Adapun kondisi ini tentu dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan meng-update arsitektur layanan secara berkelanjutan.

3.3 Arsitektur Domain Data dan Informasi

3.3.1. Katalog Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

Tabel 4 Arsitektur Data dan Informasi SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 001	DATA Nilai Produksi	Data Nilai Produksi Industri satuan ribu rupiah untuk memberikan detail yang lebih akurat dan memungkinkan perbandingan yang lebih jelas antara berbagai jenis industri.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
DAT - 002	Data Nilai Investasi Industri	Data yang direkam dalam satuan ribu rupiah untuk memberikan detail yang lebih akurat dan memungkinkan perbandingan yang lebih jelas antara berbagai jenis industri.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan pengelolaan sistem informasi industri nasional	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
DAT - 003	Data Kapasitas Produksi Industri	Dalam analisis ini, kapasitas produksi direkam berdasarkan jenis komoditi unggulan untuk memperlihatkan potensi sektor-sektor industri yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
DAT - 004	Data Nilai Investasi Industri	Data ini mempunyai satuan ribu rupiah untuk memberikan detail yang lebih akurat dan memungkinkan perbandingan yang lebih jelas antara berbagai jenis industri.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 005	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	Data ini melacak pertumbuhan sektor industri utama, mencatat jumlah tenaga kerja yang terlibat, menganalisis nilai investasi yang masuk, merekam nilai produksi, serta memeriksa jumlah ekspor dari berbagai jenis komoditi industri yang menjadi fokus utama Kabupaten Cirebon.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
DAT - 006	Data Jumlah Perusahaan Industri	Data Jumlah Perusahaan Industri di Kabupaten Cirebon yang Terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) memberikan informasi terperinci tentang jumlah entitas industri yang terdaftar dan terdaftar secara resmi dalam sistem tersebut.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
DAT - 007	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	Data ini melacak pertumbuhan sektor industri utama, mencatat jumlah tenaga kerja yang terlibat, menganalisis nilai investasi yang masuk, merekam nilai produksi, serta memeriksa jumlah ekspor dari berbagai jenis komoditi industri yang menjadi fokus utama Kabupaten Cirebon.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.01 DATA INDUSTRI
DAT - 008	Data Nilai Ekspor terinci	Data Nilai Ekspor terinci Berdasarkan Komoditi di Kabupaten Cirebon (per bulan) nilai ekspor dari berbagai komoditi yang dihasilkan oleh industri lokal atau diperdagangkan di wilayah Kabupaten Cirebon.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 009	Data Jumlah Kegiatan Pengawasan	Data yang memberikan gambaran yang terinci tentang seberapa sering pengawasan terhadap barang-barang yang dikemas dilakukan di wilayah tersebut.	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
DAT - 010	Data Perkembangan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi	Perkembangan Industri, Tenaga Kerja, Nilai Investasi, Nilai Produksi, dan Ekspor Komoditi Industri Unggulan di Kabupaten Cirebon	SISTEM INFORMASI PERDAGANGAN	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Layanan Perencanaan dan Pembangunan Industri	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.02 DATA PERDAGANGAN
DAT - 011	Data Luas Tanam dan Panen	Data ini mencakup luas lahan yang digunakan untuk menanam suatu komoditas, volume panen yang berhasil dihasilkan dari lahan tersebut, total produksi yang diperoleh, serta tingkat produktivitas dari hasil pertanian tersebut.	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan sarana pertanian yang dikembangkan (Benih Padi)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
DAT - 012	Data Jumlah Kelompok Tani	Informasi ini mencatat jumlah kelompok tani yang aktif di setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon, yang merupakan unit organisasi yang terdiri dari petani atau pelaku pertanian lainnya yang bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas, mendapatkan akses ke sumber daya, dan meningkatkan kesejahteraan bersama.	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 013	Data Luas Tanam dan Panen	Data ini mencakup luas lahan yang digunakan untuk menanam suatu komoditas, volume panen yang berhasil dihasilkan dari lahan tersebut, total produksi yang diperoleh, serta tingkat produktivitas dari hasil pertanian tersebut.	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
DAT - 014	Data Jumlah Realisasi Penyaluran Pupuk	Data mentah tentang jumlah realisasi penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan jenis pupuk di Kabupaten Cirebon adalah kumpulan informasi yang memberikan gambaran detail tentang distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan kejadian zoonosis	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
DAT - 015	Data Saluran Irigasi Tersier	Saluran irigasi tersier merujuk pada saluran atau sistem distribusi air yang menjadi bagian dari jaringan irigasi yang mengalirkan air dari saluran irigasi sekunder ke lahan pertanian secara langsung.	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan kejadian zoonosis	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 016	Data Sebaran Penerima Bantuan Alsintan	Sebaran penerima bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) per jenis Alsintan di Kabupaten Cirebon mencakup informasi yang terperinci distribusi dan alokasi Alsintan di wilayah tersebut.	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
DAT - 017	Data Daftar Rekapitulasi Bantuan Pemerintah	Daftar rekapitulasi bantuan pemerintah untuk pembangunan prasarana pertanian di Kabupaten Cirebon menyajikan rangkuman secara terperinci tentang berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan infrastruktur pertanian di wilayah tersebut.	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
DAT - 018	Data Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	Data jumlah usulan izin usaha pertanian yang difasilitasi di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang total permohonan izin usaha yang diajukan dan diproses oleh instansi terkait dalam sektor pertanian di wilayah tersebut	Websites Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN	Layanan pelayanan pertanian sesuai standar	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data		APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 020	Data Nilai Indeks Ketahanan Pangan	Data ini memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan pangan di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon, yang mencakup informasi tentang tingkat produksi pangan lokal, distribusi dan aksesibilitas pangan, keamanan pangan, serta pola konsumsi pangan sehat.		SISTEM INFORMASI KOMODITAS HARGA PANGAN (SIKOMPA)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Layanan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Dinas Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
DAT - 021	Data Perkembangan Ketersediaan Energi	Data ini mencakup informasi tentang jumlah energi, protein, dan lemak yang tersedia dalam makanan yang dikonsumsi oleh penduduk setiap hari dalam suatu periode waktu tertentu.		SISTEM INFORMASI KOMODITAS HARGA PANGAN (SIKOMPA)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Layanan kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian di Dinas Pertanian	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.03 DATA PERTANIAN
DAT - 022	Data Jumlah Populasi Ternak	Data ini mencakup informasi tentang jumlah ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba yang tercatat di setiap kecamatan, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang profil peternakan di daerah tersebut.		Website Dinas Pertanian	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PERTANIAN		RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.05 DATA PETERNAKAN

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 023	Data Produksi Perikanan Tangkap	Data ini mencakup informasi tentang jumlah dan jenis hasil tangkapan yang diperoleh dari berbagai metode penangkapan. Dengan memantau produksi perikanan tangkap berdasarkan bulan dan jenis alat tangkap, dapat dianalisis pola musiman dalam hasil tangkapan ikan serta efektivitas penggunaan alat tangkap tertentu.	Website Dinas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Layanan produksi perikanan tangkap	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
DAT - 024	Data Produksi Perikanan Budidaya	Data ini mencakup informasi tentang jumlah dan jenis hasil produksi perikanan budidaya. Dengan memantau produksi perikanan budidaya berdasarkan bulan dan jenis budidaya, dapat dianalisis pola musiman dalam produksi perikanan budidaya serta evaluasi kinerja budidaya tertentu dalam menghasilkan hasil yang optimal.	Website Dinas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Layanan Produksi perikanan budidaya	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
DAT - 025	Data Nilai Produksi Perikanan	Data nilai produksi perikanan budidaya berdasarkan jenis ikan dan jenis budidaya di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang nilai ekonomi dari hasil produksi budidaya ikan berbagai jenis yang dilakukan di wilayah tersebut.	Website Dinas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Layanan produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.06 DATA PERIKANAN
DAT - 026	Data Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya	Data jumlah rumah tangga perikanan budidaya menurut kecamatan dan jenis budidaya di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan budidaya perikanan di setiap kecamatan, yang dibedakan berdasarkan jenis budidaya yang dilakukan.	Website Dinas PKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Layanan prosentase kepatuhan usaha perikanan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 027	Data Jenis Pelayanan Perizinan	Pelayanan perizinan berbasis online meliputi berbagai layanan yang dapat diakses secara digital melalui platform online. Ini termasuk berbagai jenis perizinan dan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, seperti izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), izin reklame, dan izin lainnya.	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Layanan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) di Kabupaten Cirebon	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI
DAT - 028	Data Jumlah Investor	Data jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah total investor dari perusahaan-perusahaan besar atau berskala nasional yang telah melakukan investasi atau mengembangkan proyek bisnis di wilayah tersebut.	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Layanan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) di Kabupaten Cirebon	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI
DAT - 029	Data Jumlah perusahaan mendapatkan pengawasan dan penanaman modal	mencakup informasi tentang total perusahaan yang telah menerima pengawasan dan fasilitas dari pemerintah daerah terkait dengan investasi dan penanaman modal.	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Layanan tingkat kepatuhan dalam sektor penanaman modal	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI
DAT - 030	Data Jumlah Investor	Data jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah total investor dari perusahaan-perusahaan besar atau berskala nasional yang telah melakukan investasi atau mengembangkan proyek bisnis di wilayah tersebut.	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Layanan Pelaku Usaha (PMA/PMDN) di Kabupaten Cirebon	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI

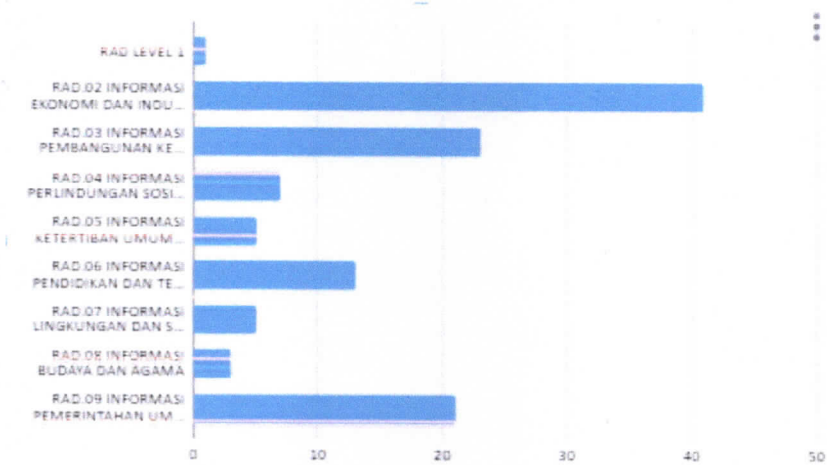
ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 031	Data Jenis Pelayanan Perizinan	pelayanan perizinan berbasis online meliputi berbagai layanan yang dapat diakses secara digital melalui platform online.	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Layanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.08 DATA INVESTASI
DAT - 032	Data Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Data jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan merupakan informasi penting yang mencakup jumlah koperasi di suatu wilayah yang aktif dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas operasional mereka.	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Layanan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI
DAT - 033	Data Jumlah Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam	Data jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah total izin usaha yang diterbitkan oleh pihak berwenang kepada lembaga simpan pinjam di wilayah tersebut. keuangan bagi masyarakat setempat.	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Layanan koperasi yang mengalami peningkatan usaha	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI
DAT - 034	Data Jumlah Koperasi	Data jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah total koperasi yang telah menjalani proses pemeriksaan dan pengawasan oleh instansi terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM setempat atau lembaga pengawas koperasi lainnya.	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Layanan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.09 DATA KOPERASI

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 035	Data Jumlah Usaha Mikro	Data yang berisi informasi tentang pelaku usaha mikro, seperti nama, alamat, jenis	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, dan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAT - 036	Data Jumlah Wirausaha	Data jumlah wirausaha di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah total individu atau entitas yang terlibat dalam berbagai jenis kegiatan wirausaha di wilayah tersebut.	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Layanan Pemberdayaan Usaha Menengah, dan Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAT - 037	Data Jumlah Pertumbuhan Wirausaha	Data jumlah pertumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah total wirausaha baru yang muncul atau didirikan dalam periode waktu tertentu di wilayah tersebut.	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	Layanan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.10 DATA USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAT - 038	Data Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Data ini mencakup jumlah individu yang telah memperoleh sertifikasi atau kualifikasi resmi dalam bidang pariwisata, seperti pemandu wisata, petugas hotel dan restoran, petugas kebersihan, dan tenaga kerja lainnya yang terlibat langsung dalam melayani wisatawan atau menjalankan operasi pariwisata.	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Layanan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Bersertifikat	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA

ID DATA	Nama DATA	Uraian Data	APLIKASI	SIFAT DATA	VALIDITAS DATA	UNIT KERJA	NAMA LAYANAN	RAD LEVEL 1	RAD LEVEL 2
DAT - 039	Data Jumlah Objek Wisata	Jumlah objek wisata menurut kategori di Kabupaten Cirebon adalah data yang mencakup informasi tentang berbagai jenis tempat atau atraksi wisata yang tersedia di wilayah tersebut, yang diklasifikasikan berdasarkan jenisnya	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Layanan Pertumbuhan Kunjungan ada Obyek Daya Tarik Wisata diatas 10%	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
DAT - 040	Data Kunjungan Wisatawan	Data kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Cirebon mencakup statistik tentang jumlah kunjungan wisatawan yang berasal dari luar negeri (wisatawan mancanegara) dan wisatawan yang berasal dari dalam negeri (wisatawan domestik) ke destinasi wisata di wilayah tersebut.	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Layanan Market Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
DAT - 041	Data Daftar Usaha Pariwisata	Data jumlah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang dikeluarkan di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang jumlah total izin usaha pariwisata yang telah diberikan oleh otoritas setempat kepada pelaku usaha pariwisata di wilayah tersebut.	Website Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Layanan Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Terstandarisasi/Obersertifikasi	RAD.02 INFORMASI EKONOMI DAN INDUSTRI	RAD.02.11 DATA PARIWISATA
DAT - 042	Data Panjang Jalan	Data panjang jalan di Kabupaten Cirebon mencakup informasi tentang total panjang jalan yang ada di wilayah tersebut. Data ini mencakup jaringan jalan utama, jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.	Website Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	TERBUKA	TAHUNAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Layanan kualitas pelayanan DPUPR	RAD.03 INFORMASI PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	RAD.03.01 DATA PEKERJAAN UMUM

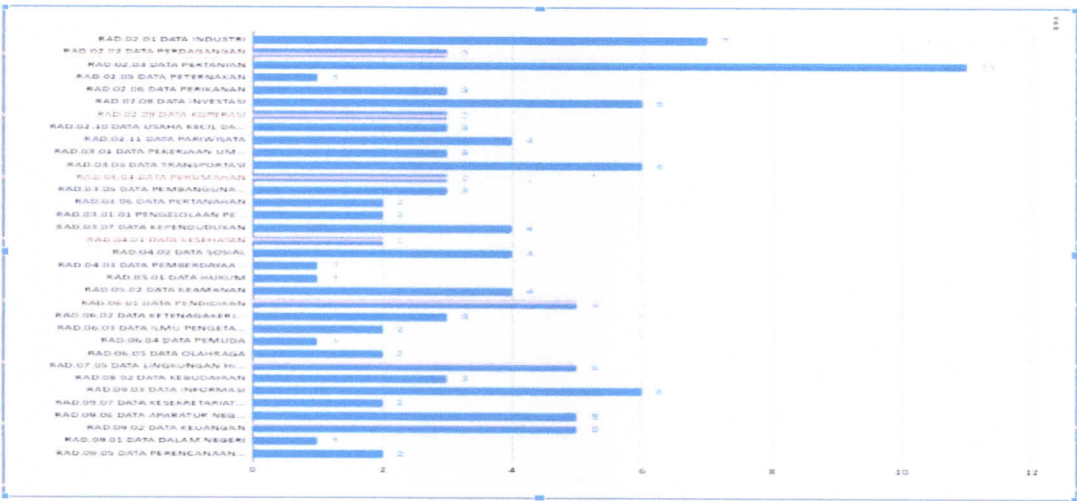
3.3.2 Analisis Diagram Data dan Informasi

Analisa terhadap kondisi data dan informasi eksisting dapat dijabarkan sebagai berikut



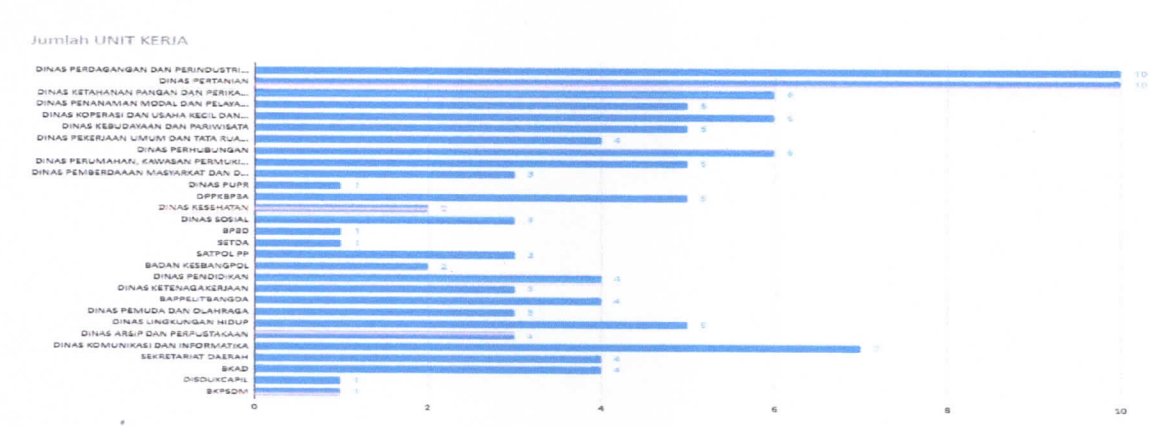
Gambar 12 Diagam RAD Level 1

Berdasarkan Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon terdapat 119 arsitektur data. Atas dasar tersebut, referensi data Nasional harus dijadikan acuan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan penyesuaian dengan layanan daerah terutama untuk menciptakan data publik yang maksimal dan layanan pemerintahan yang terintegrasi, efisien dan transparan.



Gambar 13 Diagram RAD Level 2

Grafik ini menunjukkan jumlah Data di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Data dibagi menjadi 35 (tiga puluh lima) bagian dari Level RAD 02.01 sampai dengan Level RAD 09.05. Setiap arsitektur Data diwakili oleh kode RAD.02.01 untuk urusan pemerintahan. Sedangkan di diagram batang menjelaskan banyaknya fungsi Data Pemerintahan/Perangkat daerah sesuai urusan Pemerintahan Data Level RAD Level 2 menunjukkan jumlah total 119. Urusan data Pertanian merupakan yang terbanyak dengan jumlah 11 fungsi data. Sebaliknya, data terkait Informasi Hukum memiliki jumlah fungsi data paling sedikit, yaitu 1 data. Selain itu, berdasarkan hasil survey yang diberikan terkait data masih belum mencakup seluruh bidang di Perangkat Daerah. Adapun kondisi ini tentu dapat terus bergerak dan berubah sesuai dengan meng-update arsitektur data secara berkelanjutan.



Gambar 14 Diagram RAD Level 3

Berdasarkan grafik di atas terdapat jumlah data yang terbanyak ada pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Pertanian (10 Data) dan paling sedikit ada di Dinas PUTR, BPBD, SETDA, Disdukcapil dan BKPSDM. Untuk saat ini keadaan kondisi tersebut harus dilaksanakan evaluasi dan inventarisasi apakah Data pada Perangkat daerah tersebut sudah sesuai.

3.4 Arsitektur Domain Aplikasi

3.4.1 Katalog Aplikasi Eksisting

Aplikasi khusus dan aplikasi umum merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional yang digunakan untuk menunjang layanan di seluruh Perangkat Daerah. Di bawah ini adalah daftar aplikasi eksisting yang digunakan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon untuk menunjang pelayanan masyarakat.

Tabel 5 Arsitektur Domain Aplikasi SPBE Kabupaten Cirebon

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan- RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.01	LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (LAPOR)	Layanan Penyampaian Semua Aspirasi Dan Pengaduan Masyarakat Yang Terintegrasi Secara Nasional Dengan Laman Akses Website www.Lapor.go.id	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Cirebon	WEB BASED	MYSQL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.01 APLIKASI UMUM LAYANAN PUBLIK	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.02	SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI)	Sistem Informasi Surat Menyurat	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Data Arsip	WEB BASED	MYSQL	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan- RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.03	MOBILE PRESENSI ASN (MPRAS)	Aplikasi Absensi Asn Kabupaten Cirebon	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Data Presensi Pegawai	MOBILE	MONGO DB	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.04	SISTEM PELAPORAN PEMBANGUNAN (SIMPELBANG)	Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Data Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	WEB BASED	MONGO DB	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI KHUSUS MISI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.05	ANALISIS JABATAN EVALUASI JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ANJAB)	Sistem Informasi Analisis Jabatan	RAL.02.04.03 PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Data anjab dan ABK	WEB BASED	MONGO DB	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan-RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.06	GITLAB KAB CIREBON	Sistem Informasi Repository Source Code	RAL.01.43.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT INFORMATIKA	Data Source Code untuk membangun Program di Pemerintah Kabupaten Cirebon	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.07	PERIZINAN ONLINE KABUPATEN CIREBON	Sistem Informasi Pengajuan Perizinan Secara Online	RAL.01.12.06 PENGELOLAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	Data Jenis Pelayanan Perizinan	WEB BASED	MONGO DB	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI KHUSUS MISI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.08	SISTEM E-KINERJA PEGAWAI KABUPATEN CIREBON(EKIN)	Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Asn	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Data Presensi Pegawai	WEB BASED	MONGO DB	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan-RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.09	SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	RAL.02.03.03 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN	Data Laporan Produktivitas	WEB BASED	MYSQL	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAA.01 APLIKASI UMUM	RAA.01.02 APLIKASI UMUM ADMINIST RASI PEMERINTAHAN	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.10	SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	Sistem Informasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Skpd	RAL.02.04.04 PENINGKATAN KUALITAS REFORMASI BIROKRASI, PENGAWASAN, DAN AKUNTABILITAS KINERJA	Data SAKIP (SISTEM Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	WEB BASED	MONGO DB	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI KHUSUS MISI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.11	APLIKASI MANAGEMENT SURAT MENYURAT(MSM)	Sistem Informasi Manajemen Surat Menyurat	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Data Arsip	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan-RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.12	SIPEPEK KABUPATEN CIREBON(SIPEPEK)	Sistem Informasi Pelayanan Puskesmas	RAL.02.04.05 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	WEB BASED	MONGO DB	DINAS SOSIAL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI KHUSUS MISI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.13	ESIGN CIREBON KAB	Sistem Informasi Tanda Tangan Online Kabupaten Cirebon	RAL.02.04.06 PENYELENGGARAAN KEARSIPAN	Data Arsip	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.14	CIREBON KATON(CIKA)	Sistem Informasi Super Apps	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Perangkat Daerah yang terakses Internet di Kabupaten Cirebon dan Data jumlah Aplikasi	MOBILE	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.15	MAIL CIREBONKAB	Aplikasi Surat Elektronik Kabupaten Cirebon	RAL.01.44.01 PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS	Data Email Masuk dan keluar Pemerintah kabupaten Cirebon	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan- RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.16	SATU DATA KABUPATEN CIREBON	Platform Untuk Pengelolaan Dan Berbagi Pakai Data Antar Perangkat Daerah	RAL.01.43.02.01 LAYANAN DATA TERBUKA	Data sektoral bisa merujuk kepada statistik	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.17	OPEN DATA KABUPATEN CIREBON	Sistem Informasi Publikasi Data Kabupaten Cirebon	RAL.01.43.02.01 LAYANAN DATA TERBUKA	Data sektoral bisa merujuk kepada statistik	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.18	READING ON DEMAND (REBOND)	Aplikasi Perpustakaan Digital Kabupaten Cirebon	RAL.02.05.06.01 PEMBINAAN ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH	Data Buku Perpustakaan Data Baca Perpustakaan	MOBILE	MONGO DB	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAK AAN	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.19	SISTEM INFORMASI PENGLOLAAN BARANG MILIK DAERAH (SIMPBMD)	Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	RAL.01.43.02.01 LAYANAN DATA TERBUKA	Data Rincian Paket E-tendering	WEB BASED	MONGO DB	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

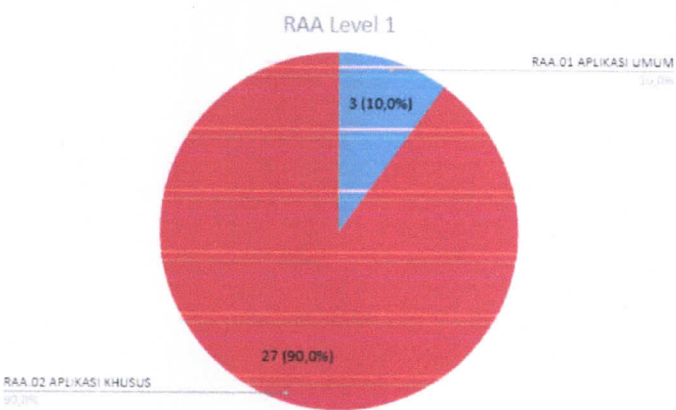
ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan- RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepermilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.20	HIBANSOS ONLINE	Sistem Informasi Pengajuan Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial Kabupaten Cirebon	RAL.01.26.03.01 SISTEM LAYANAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	WEB BASED	MONGO DB	DINAS SOSIAL	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.01 APLIKASI KHUSUS MISI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.21	SICERIA	Sistem Informasi Rujukan Rumah Sakit	RAL.01.25.02.01 LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	Data SDM Kesehatan	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KESEHATAN	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.22	SISTEM INFORMASI KEUANGAN KABUPATEN CIREBON (SIKATON)	Sistem Informasi Keuangan Kabupaten Cirebon	RAL.02.02.05.01 PENGANGGARAN DAERAH	Data APBD	WEB BASED	MONGO DB	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.23	SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH (SIKD)	Sistem Informasi Kearsipan Daerah Kabupaten Cirebon	RAL.02.05.06.01 PEMBINAAN ARSIP DINAMIS PEMERINTAH DAERAH	Data Arsip	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan- RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.24	SISTEM INFORMASI KOMODITAS HARGA PANGAN (SIKOMPA)	Sistem Informasi Komoditas Harga Pangan	RAL.01.05.04 PERLUASAN PENGUASAAN PASAR INDUSTRI	Data Nilai Indeks Ketahanan Pangan	WEB BASED	MONGO DB	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.25	SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH (SIMPAD)	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	RAL.02.02.03 PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENDAPATAN NEGARA	Data APBD	WEB BASED	MONGO DB	BADAN PENDAPATAN DAERAH	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.26	SISTEM INFORMASI REKONSILIASI ONLINE SKPD (SIRAOS)	Sistem Informasi Rekonsiliasi Online Skpd	RAL.02.02.01 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN	Data APBD	WEB BASED	MONGO DB	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.27	SISTEM INTEGRASI (SITERASI)	Sistem Integrasi Layanan Aplikasi	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Data Aplikasi	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

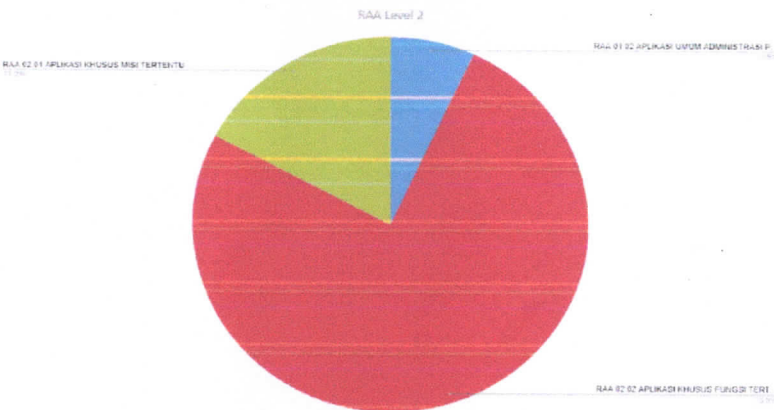
ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Layanan	Data Yang Digunakan- RAD Level3	Basis Aplikasi	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	RAA Level 1	RAA Level 2	Kepemilikan Instansi
CRBKAB-DAA 01.01.28	SISTEM INFORMASI PENDATAAN UMKM (SITERUSMI)	Sistem Pendataan Umkm Di Kabupaten Cirebon	RAL.01.43.02.01 LAYANAN DAFTAR TERBUKA	Data Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	WEB BASED	MONGO DB	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.29	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN OBAT (SIMO)	Sistem Informasi Manajemen Obat	RAL.01.25.04 PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN	Data SDM Kesehatan	WEB BASED	POSTGR ESSQL	DINAS KESEHATA DAN PUSKESMAS	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CRBKAB-DAA 01.01.30	SUPER APP	Aplikasi Pelayanan Satu Pintu	RAL.01.43.02 PENATAKELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Aplikasi Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon	MOBILE	SQL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	RAA.02 APLIKASI KHUSUS	RAA.02.02 APLIKASI KHUSUS FUNGSI TERTENTU	PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

3.4.2 Analisis Diagram Aplikasi Eksisting

Kondisi aplikasi eksisting di atas dapat digambarkan dengan diagram lingkaran berikut:



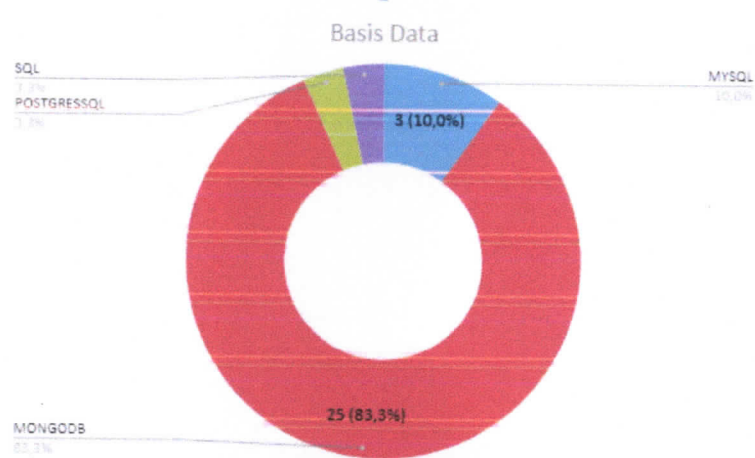
Gambar 15 Diagram RAA LEVEL 1



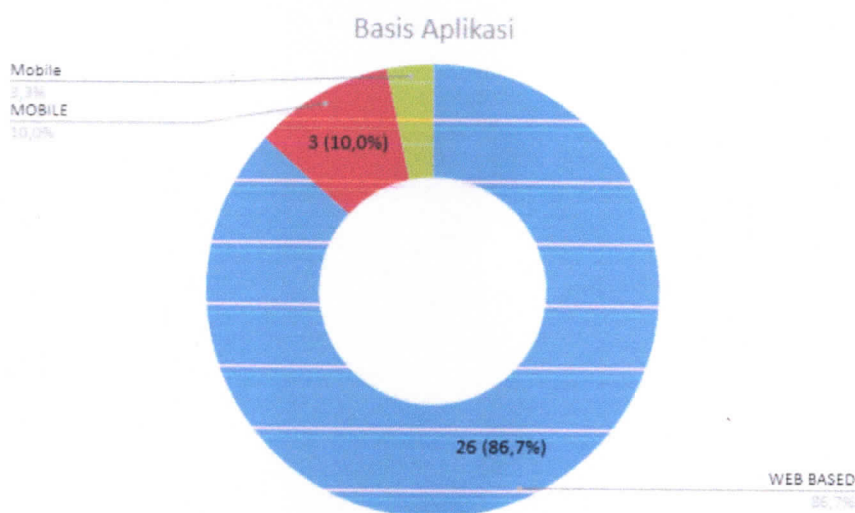
Gambar 16 Diagram RAA LEVEL 2

Berdasarkan grafik diatas pada RAA level 1 yang merupakan bagian dari Arsitektur SPBE Nasional dari total 30 aplikasi. 90 % (27 Aplikasi) merupakan RAA.02 Apikasi khusus, sedangkan RAA 01 Aplikasi umum. Pada grafik sebelah kanan menggambarkan ada 22 Aplikasi yang termasuk RAA Aplikasi Fungsi Khusus tertentu dan ada 5 aplikasi pada RAA 02.01 Apikasi khusus Misi Tertentu. Sedangkan RAA 01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan ada 2 data aplikasi eksisting. Dari grafik diatas kita dapat menyimpulkan bahwa Aplikasi khusus yang paling banyak

digunakan di Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk pengelolaan interoperabilitas data baik internal maupun eksternal.



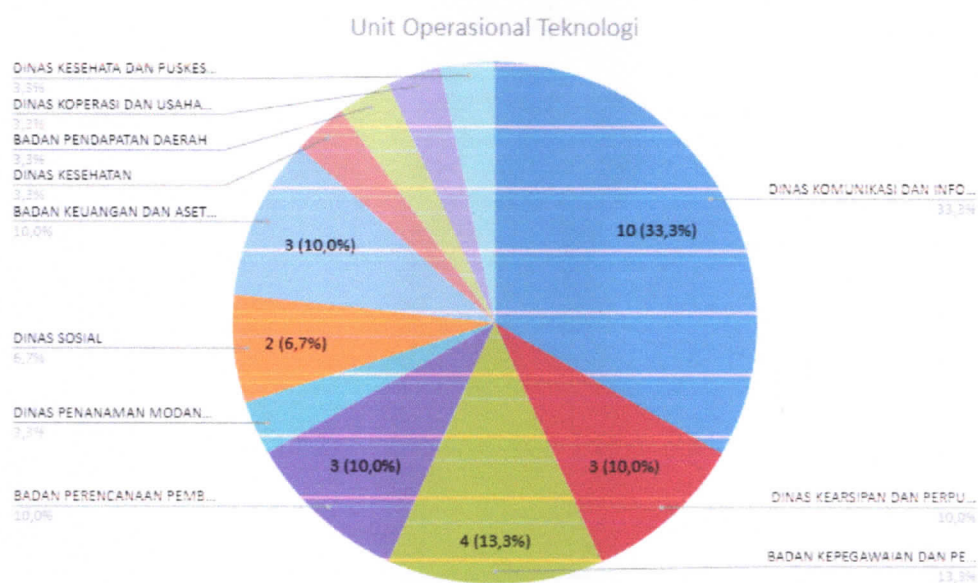
Gambar 17 Diagram Basis Data



Gambar 18 Diagram Basis Apikasi

Pada grafik di atas terdapat aplikasi terbanyak ada pada aplikasi berbasis Web yang terdapat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan 26 aplikasi (86,7 %) oleh karena itu jumlah web Programmer di Pemerintah Kabupaten Cirebon harus dapat mengakomodir pemeliharaan aplikasi yang telah dibangun. Untuk Grafik sebelah kanan terdapat grafik Basis Data yang digunakan untuk membangun aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan mayoritas menggunakan Basis Data Mongo DB yaitu 25 Aplikasi sedangkan SQL dan Postgressql paling sedikit yang menggunakan basis data tersebut yakni 1 aplikasi. Hal

ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun sudah mengikuti kondisi teknologi saat ini.



Gambar 19 Diagram Unit Operasional Pengampu

Berdasarkan grafik di atas bahwa ada 10 aplikasi yang dikelola di Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan aplikasi pengelola terbanyak di Pemerintah Kabupaten Cirebon diikuti dengan 4 aplikasi yang dikelola oleh BKPSDM. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Dinas Koperasi dan UKM, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kesehatan serta Dinas Penanaman Modal hanya mengelola 1 aplikasi. Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa Diskominfo merupakan Dinas terkait untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur SPBE yang terdapat di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Cirebon antara lain Ruang Pusat Data beserta fasilitas pendukung, Jaringan intra pemerintah, Jaringan LAN OPD (Organisasi Perangkat Daerah), Pusat komputasi atau Server dan infrastruktur pendukung. Berikut ini adalah uraian dari komponen infrastruktur SPBE.

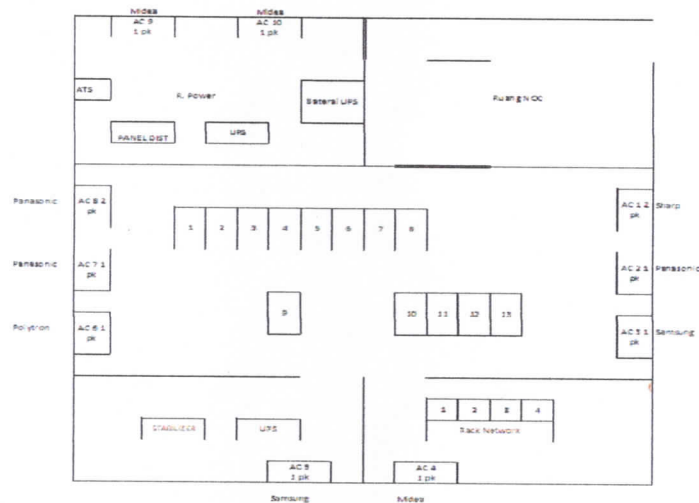
3.5.1 Fasilitas Komputasi

3.5.1.1 Pusat Komputasi

Ruang pusat data difungsikan sebagai tempat untuk menaruh aset elektronik penting seperti: perangkat jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, database dan perangkat pendukung ruang pusat data. Adapun detailnya sebagai berikut:

1) Layout Ruang Pusat Data

Ruang Pusat Data terdiri dari ruang server, dan ruang kelistrikan. Di dalam ruang server terdapat 13 (tiga belas) unit rack server.



Gambar 20
Topologi Ruang Pusat Data Diskominfo
Kabupaten Cirebon

2) Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung Pusat Data terdiri dari:

1. Rak server;
2. Sistem pendingin (*wall mount AC*);
3. Sistem kelistrikan (UPS dan generator);
4. Cable Management (*Cable Tray, Wire management*);
5. *Raised Floor*; dan
6. Alat pemadam api ringan

3) Rak Server

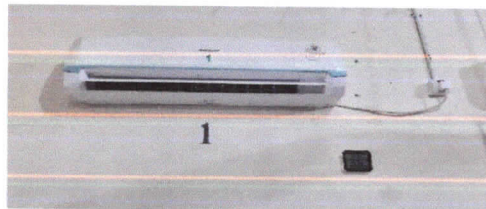
Terdapat 13 rak yang digunakan untuk menyimpan storage dan server, dan 4 rak yang digunakan untuk menaruh perangkat jaringan.



Gambar 21
Kondisi Rack Server di Ruang Pusat Data

4) Sistem Pendingin

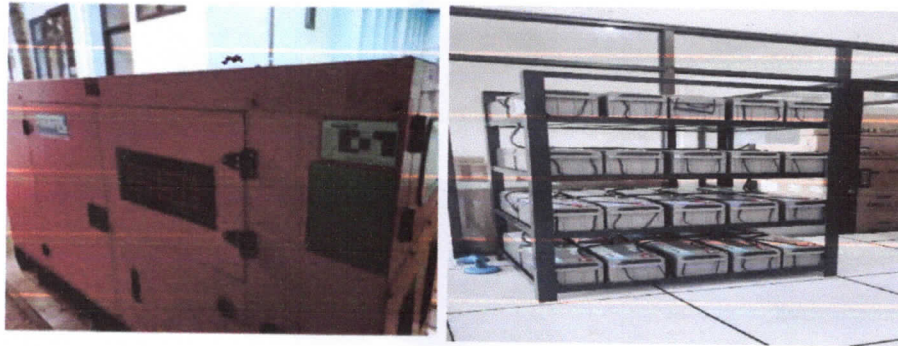
Sistem pendingin ruang pusat data menggunakan AC Dinding merk Sharp dan Polytron AC ini sebagai pendingin utama di ruang pusat data. Suhu ruang terjaga antara 16 sampai dengan 28 °C, tetapi untuk kelembaban udara belum memiliki alat pengukur.



Gambar 22.
Kondisi Pendingin di Ruang Pusat Data

5) Sistem Kelistrikan

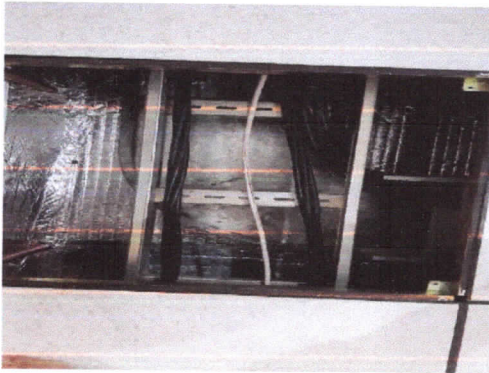
Sebagai upaya menyediakan ketersediaan tinggi pada data center, telah disediakan cadangan sumber listrik yaitu generator dan UPS. Generator akan otomatis hidup dan menyuplai listrik dalam hitungan kurang lebih 10 detik dari listrik PLN mati. Rentang proses perpindahan suplai listrik dari PLN ke genset, listrik ditangani oleh UPS. UPS mampu menyuplai listrik selama kurang lebih 10 menit



Gambar 23
Kondisi Catu Daya Listrik Cadangan (UPS dan Genset)

6) Manajemen Kabel

Kondisi saat ini terdapat jalur kabel data antar server yang berada di atas rack server dengan menggunakan *cable tray*



Gambar 24 Kabel tray untuk Jalur Kabel Data antar Rack

7) Lantai yang Ditinggikan (Raised Floor)

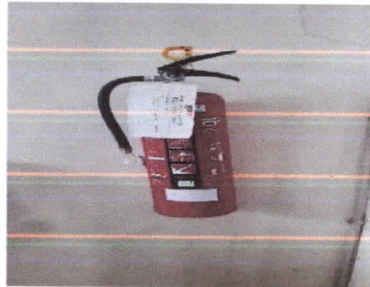
Ruang Pusat Data sudah menggunakan lantai yang ditinggikan (raised floor) seperti ditunjukkan gambar di bawah ini.



Gambar 25 Raised Floor

8) Sistem Pemadam

Sistem pemadam ruang pusat data menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Alat pemadam ini berfungsi secara manual, membutuhkan operator untuk mengungsikannya



Gambar 26 APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

9) Sistem Keamanan Data Center

Sistem keamanan akses data center masih menggunakan kunci tunggal yaitu kunci manual pada pintu. Pembatasan akses telah diterapkan dengan mendaftarkan personil data center, selain orang yang telah terdaftar maka orang tersebut tidak dapat masuk ke ruang data center. Area di sekitar ruang pusat data juga telah disediakan CCTV untuk memantau aktivitas yang terjadi.



Gambar 27 Sistem pengaman akses ke ruang data center

3.5.1.2 Katalog Fasilitas Komputasi

Katalog fasilitas komputasi yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan

ID	Nama Fasilitas Komputasi	Bandwidth Internet	Lokasi	Kepemilikan(Information)	Unit Kerja Penanggung Jawab	Klasifikasi Tier Fasilitas	Sistem Pengamanan Fasilitas	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB-DAI1.01.02.01	CRBKAB-DAI1.01.02.01 Fasilitas jaringan internet dari diskominfo ke 40 kantor kecamatan	30 Mbps/kecamatan	Kecamatan	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tier 1	Non Biometrik	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi
CRBKAB-DAI1.01.02.02	CRBKAB-DAI1.01.02.02 Fasilitas jaringan internet dari diskominfo ke 12 kantor kelurahan	30 Mbps/kelurahan	Kelurahan	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tier 1	Non Biometrik	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi
CRBKAB-DAI1.01.02.03	CRBKAB-DAI1.01.02.03 Fasilitas jaringan internet dari diskominfo ke 33 Perangkat Daerah	50 Mbps/opd	Perangkat daerah	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tier 1	Non Biometrik	RAI.01 Fasilitas Komputasi	RAI.01.02 Pusat Komputasi

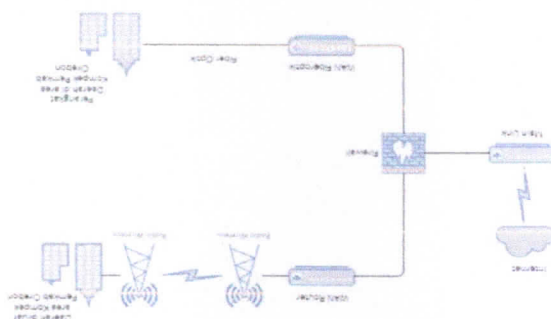
3.5.1.3 Sistem Integrasi

Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pemerintah Daerah dan Pusat

3.5.1.4 Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra Pemerintah (JIP) Kabupaten Cirebon dikelola oleh Diskominfo untuk melayani jaringan antar komputer di lingkungan Perangkat Daerah akses ke server, akses layanan, akses aplikasi dan akses internet di Kabupaten Cirebon. Topologi Jaringan dapat dilihat pada gambar berikut:

pada gambar berikut:



Gambar 28 Topologi Jaringan Intra Pemerintah

Berdasarkan gambar di atas, diperoleh informasi bahwa JIP bisa dibagi menjadi beberapa zona yakni:

dibagi menjadi beberapa zona yakni:

1. Zona Internet

Zona internet terdiri dari 2 (dua) koneksi ke penyedia jasa layanan internet (Internet Service Provider-ISP). Koneksi dari ISP tersebut terhubung ke switch Layer. Kondisi saat ini link internet aktif dan juga memiliki link internet cadangan jika terjadi gangguan pada link utama.

2. Zona Jaringan Area Kota (MAN)

Jaringan area kota atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan untuk koneksi-koneksi dari Diskominfo ke Perangkat Daerah. Koneksi menggunakan jaringan fiber optic milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berada di lingkungan perkantoran Pemerintahan sedangkan untuk perangkat daerah di luar perkantoran pemerintahan menggunakan radio *wireless*., Kondisi saat ini semua Perangkat Daerah sudah terhubung ke Jaringan Intra Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh Diskominfo.

3. Zona Inti

Zona Inti untuk interkoneksi jaringan lokal (LAN) komputer, jaringan server menggunakan perangkat router core untuk zona inti.

4. Zona LAN

Zona LAN untuk interkoneksi komputer-komputer pengguna di seluruh Perangkat Daerah dan Perangkat pendukung yakni switch access dan router distribusi.

3.5.1.5 Domain Jaringan Intra Pemerintahan

Berikut ini adalah tabel Jaringan Intra Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon.

Tabel 6 Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB- DAL.09.02.01.01	JARINGAN DISKOMINFO - SEKRETARIAT DAERAH	JARINGAN DISKOMINFO - SEKRETARIAT DAERAH	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.02	JARINGAN DISKOMINFO - DPRD	JARINGAN DISKOMINFO - DPRD	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.03	JARINGAN DISKOMINFO - INSPEKTORAT	JARINGAN DISKOMINFO - INSPEKTORAT	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.04	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PENDIDIKAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PENDIDIKAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.05	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KESEHATAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KESEHATAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.06	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.07	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.08	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB- DAL.09.02.01.09	PENYELAMATAN JARINGAN DISKOMINFO - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PENYELAMATAN JARINGAN DISKOMINFO - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	PEMERINTAH RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.10	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS SOSIAL	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS SOSIAL	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.11	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI - JL.	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI - JL.	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.12	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI - KESENDEN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI - KESENDEN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.13	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI - UPT BLK	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI - UPT BLK	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.14	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.15	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS LINGKUNGAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS LINGKUNGAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB.	DINAS KOMUNIKASI	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM	RAI.02.01 JARINGAN

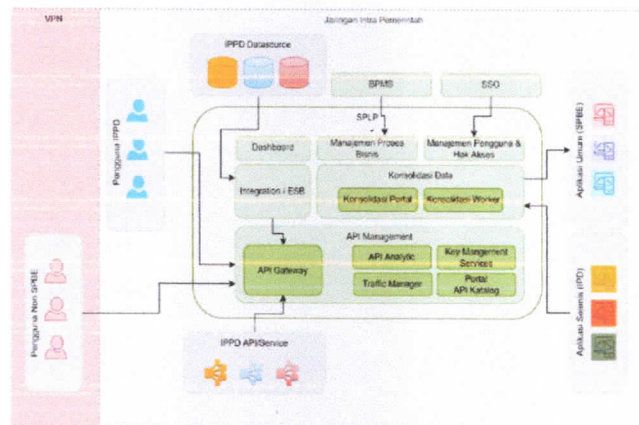
ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	HIDUP	HIDUP			CIREBON	DAN INFORMATIKA			INTEGRASI	INTRA
CRBKAB- DAL.09.02	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA
CRBKAB- DAL.09.02.01.17	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERHUBUNGAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERHUBUNGAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA
CRBKAB- DAL.09.02.01.18	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA
CRBKAB- DAL.09.02.01.19	CRBKAB- DAL.09.02.01.19 JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA
CRBKAB- DAL.09.02.01.20	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERTANIAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERTANIAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA
CRBKAB- DAL.09.02.01.21	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKAMAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA
CRBKAB- DAL.09.02.01.22	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA
CRBKAB- DAL.09.02.01.23	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB- DAL.09.02.01.24	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.25	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.26	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	JARINGAN DISKOMINFO - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.27	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.28	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.29	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB- DAL.09.02.01.30	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN PENDAPATAN DAERAH	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN PENDAPATAN DAERAH	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-	JARINGAN DISKOMINFO	JARINGAN DISKOMINFO	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH	DINAS	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02	RAI.02.01

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
DAI.09.02.01.31	- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	- BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			KAB. CIREBON	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			SISTEM INTEGRASI	JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.32	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	JARINGAN DISKOMINFO - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.33	JARINGAN DISKOMINFO - RSUD ARJAWINANGUN	JARINGAN DISKOMINFO - RSUD ARJAWINANGUN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	FIBER OPTIC	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.34	JARINGAN DISKOMINFO - RSUD WALED	JARINGAN DISKOMINFO - RSUD WALED	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.35	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN ARJAWINANGUN	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN ARJAWINANGUN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	50 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.36	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN ASTANAJAPURA	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN ASTANAJAPURA	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.37	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN BABAKAN	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN BABAKAN	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.38	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN BEBER	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN BEBER	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH
CRBKAB-DAI.09.02.01.39	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN CILEDUG	JARINGAN DISKOMINFO - KECAMATAN CILEDUG	INTERNET	SENDIRI	PEMERINTAH KAB. CIREBON	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	30 MBPS	GELOMBANG RADIO	RAI.02 SISTEM INTEGRASI	RAI.02.01 JARINGAN INTRA PEMERINTAH

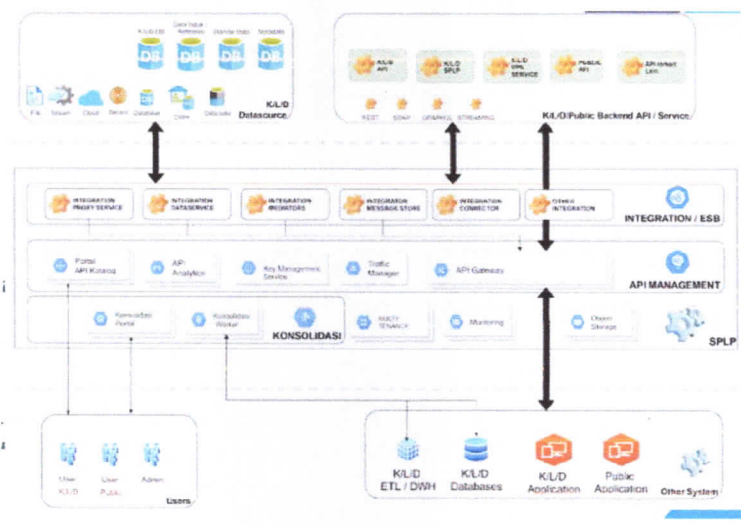
3.5.1.6 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Kondisi saat ini, Diskominfo Kabupaten Cirebon telah memiliki API Manager untuk pengelolaan API dalam rangka pertukaran data antar aplikasi internal di Pemerintah Kabupaten Cirebon, maupun eksternal. Untuk *platform* pertukaran data Kabupaten Cirebon menggunakan SPLP milik Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan arahan Pemerintah Pusat. Platform SPL yang digunakan yakni SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) Integrasi dan Pertukaran Data), program SPLP menjembatani pertukaran data antar instansi pemerintah meskipun berbeda Database, Aplikasi maupun Sistem Operasinya. Aplikasi SPLP dapat difungsikan sebagai GSB (Government Service Bus) dan Web-API (Application Programming Interface).



Gambar 29 arsitektur SPLP nasional

Dalam pelaksanaan kegiatan SPLP Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan menggunakan *platform* SPLP nasional, Kabupaten Cirebon telah menyimpan 4 (empat) API (*Application Programming Interface*) aplikasi khusus Kabupaten Cirebon dan sudah mendapatkan akses aplikasi umum layanan pengaduan lapor.go.id. Berikut adalah gambar proses integrasi SPLP dengan API *management*.



Gambar 30 Intergrasi SPLP Nasional dengan API management

3.5.1.7 Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Katalog Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB No 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 7 Katalog SPLP

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis Sistem Penghubung	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	→ Jaringan Intra Pemerintah (Dependency)
SPLP - CRBKAB- 01	SPLP Layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika	Sistem Manajemen Integrasi dan Pertukaran Data	Sistem Penghubung Pemerintah	Instansi Pemerintah Pusat	Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia	CRB-01 FO DISKOMINFO CIREBON

3.5.1.8 Katalog Perangkat Keras Jaringan

Perangkat keras jaringan merupakan perangkat yang digunakan untuk proses routing, switching dan keamanan pada jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat keras jaringan yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 8 Katalog Perangkat Keras Jaringan

ID	Nama Network	Deskripsi Network	Tipe Network	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network		RAI Level	
						1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)	RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB-DAI.03.03.01.01	ROUTER1	ROUTER IIX	ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR	DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.02	ROUTER2	ROUTER IX	ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR	DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.03	ROUTER3	MAIN ROUTER	ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR	DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.04	ROUTER4	ROUTER INTERNAL	ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR	DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.05	ROUTER5	ROUTER SKPD	ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR	DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.06	ROUTER6	ROUTER DISTRIBUSI	ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR	DAN APLIKASI

ID	Nama Network	Deskripsi Network	Tipe Network	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit		→ RAI Level 1		→ RAI Level 2 (Dependency)	
						Pengelola	Network	(Dependency)			
CRBKAB-DAI.03.03.01.07	ROUTER7	ROUTER SERVER	ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.08	ROUTER8	ROUTER PUBLIK	IP ROUTER	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.09	SWTCH1	SWTCH MANAGEABLE	SWTCH L3	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.10	SWTCH2	SWTCH UNIFI	SWTCH L2	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.11	SWTCH3	SWTCH UNIFI	SWTCH L2	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.12	SWTCH4	SWTCH TP-LINK 24 PORT	SWTCH L2	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.13	SWTCH5	CLOUDCORE SWITCH	SWTCH L3	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.14	SWTCH6	CLOUDCORE SWITCH	SWTCH L3	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.15	FO CONVERTER	HTB CONVERTER	FO TRANSMISSION EQUIPMENT	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	
CRBKAB-DAI.03.03.01.16	ODU	OPTICAL DISTRIBUTION UNIT	TRANSMISSION EQUIPMENT	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM			RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI	

ID	Nama Network	Deskripsi Network	Tipe Network	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Network	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB-DAI.03.03.01.17	ACCESS POINT	UBIQUITY	WIRELESS EQUIPMENT	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.18	UTP	KABEL UTP	TRANSMISSION EQUIPMENT	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.19	FIBER OPTIC	KABEL FIBER OPTIC	TRANSMISSION EQUIPMENT	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.20	ANTENA SEKTORAL	PERANGKAT PENGIRIMAN DENGAN BW YANG BESAR	TRANSMISSION EQUIPMENT	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.03.03.01.21	ANTENA TX RX	PERANGKAT PENGIRIM DAN PENERIMA BANDWIDTH	TRANSMISSION EQUIPMENT	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI

3.5.1.9 Katalog Perangkat Keras Keamanan

Perangkat keras keamanan merupakan perangkat yang digunakan untuk melindungi jaringan, aplikasi, dan pengguna di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat keras keamanan yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KemPANRB Nomor 18Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 9 Katalog Perangkat Keras Keamanan

ID	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Type Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB- DAI.04.03.01.01	FORTINET FIREWALL	FORTINET FIREWALL	FIREWALL	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB- DAI.04.03.01.02	HP FIREWALL CIREBONKAB	HP FIREWALL CIREBONKAB	FIREWALL	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB- DAI.04.03.01.03	FIREWALL UNTANGEL - 225	FIREWALL UNTANGEL - 225	FIREWALL	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB- DAI.04.03.01.04	FIREWALL - 248	FIREWALL - 248	FIREWALL	SENDIRI	DISKOMINFO	DISKOMINFO	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI

3.5.1.10 Katalog Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras media penyimpanan merupakan perangkat yang difungsikan untuk menyimpan data, informasi, database, aplikasi, file virtual machine di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat keras media penyimpanan yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KemPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 10 Katalog Perangkat Keras Keamanan

NO	Nama Data Storage	Deskrip Server	Jenis Penggunaa ⁿ	Status Kepemilikan	Unit Pengelola	Lokasi Perangkat	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas memory	Kapasitas Penyimpana ⁿ	Tenik Penyimpanan
MP-1	Storage A	SERVER BPBD MERK DELL	File Server	BPBD	BPBD	DC Diskominfo	Debian	64 Gb	996 Gb	Raid 1
MP-1	Storage A	server perencanaan BKAD	File Server	Bappelitbangda	Bappelitbangda	DC Diskominfo	Ubuntu	64 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-1	Storage A	Simonek.cirebonkab.go.id	File Server	Bappelitbangda	Bappelitbangda	DC Diskominfo	Ubuntu	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-2	Storage B	SERVER VPS MERK DELL EMC	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-2	Storage B	SERVER SLRT MERK DELL EMC	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-2	Storage B	SERVER DASHBOARD MAIL CIREBONKAB MERK DELL EMC	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-2	Storage B	SERVER OPM - BACKUP MERK DELL EMC	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	OVM	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-2	Storage B	SERVER VIRTUAL - 6 MERK DELL EMC	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-2	Storage B	SERVER BMD	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Debian	64 Gb	1 TiB	Raid 1

NO	Nama Data Storage	Deskrip Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	Unit Pengelola	Lokasi Perangkat	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas memory	Kapasitas Penyimpanan	Tenik Penyimpanan
		MERЕК DELL EMC								
MP-2	Storage B	FIREWALL MERK FORTINET	Security	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Forti OS		1 TiB	Raid 1
MP-3	Storage C	SERVER BKAD MERK SUPERMICRO	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	64 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-3	Storage C	SERVER ARSIP MERK SUPERMICRO	File Server	Disarpus	Disarpus	DC Diskominfo	Proxmox Windows Server	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-3	Storage C	SERVER DPPKB MERK SUPERMICRO	File Server	DPPBKP3A	DPPBKP3A	DC Diskominfo		8 gb	5.46 TiB	Raid 1
MP-3	Storage C	SERVER PERLJINAN MERK SUPERMICRO	File Server	DPMPTSP	DPMPTSP	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-3	Storage C	SERVER VIRTUAL MERK SUPERMICRO	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-3	Storage C	SIRUP MERK SUPERMICRO	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-3	Storage C	SERVER DINSOS MERK SUPERMICRO	File Server	Dinsos	Dinsos	DC Diskominfo	Debian	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-4	Storage D	SERVER EKINERJA MERK DELL EMC- OS UBUNTU	File Server	Disperindag	Disperindag	DC Diskominfo	Ubuntu	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-4	Storage D	SERVER SSO MERK DELL EMC OS Ubuntu	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	ubuntu	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-4	Storage D	SERVER VIRTUAL MERK DELL EMC OS VPS	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-4	Storage D	SERVER VIRTUAL MERK DELL EMC	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1

NO	Nama Data Storage	Deskrip Server	Jenis Penggunaa ⁿ	Status Kepemilikan	Unit Pengelola	Lokasi Perangkat	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas memory	Kapasitas Penyimpana ⁿ	Tenik Penyimpanan
		SERVER INSPEKTORAT MERK DELL EMC VIRTUAL SERVER - VIII I60	File Server	Inspektorat	Inspektorat	DC Diskominfo	Debian	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-4	Storage D	VIRTUAL SERVER - VIII I60	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	128G	1 TiB	Raid 1
MP-5	Storage E	SERVER VIRTUAL MERK DELL OS PROXMOX	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	128G	1 TiB	Raid 1
MP-5	Storage E	SERVER E - SURAT MERK DELL DEBIAN	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-5	Storage E	SERVER HMS MERK DELL OS DEBIAN	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-5	Storage E	SERVER BMD -1 MERK DELL OS DEBIAN	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-5	Storage E	SERVER BMD-2 MERK DELL OS DEBIAN	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-5	Storage E	SERVER RSUD ARJAWINANGUN MERK DELL OS DEBIAN	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-5	Storage E	SERVER RSUD ARJAWINANGUN MERK DELL OS DEBIAN	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-6	Storage F	CACHE / DNS CIREBONKAB MERK HP	Domain Name Sever	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-6	Storage F	SERVER VIRTUAL MERK HP	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Proxmox	128G	1 TiB	Raid 1
MP-6	Storage F	SERVER VMEET MERK HP-VMEEET WINDOWS SERVER	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Windows Server	64 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-6	Storage F	SERVER SIGI MERK HP OS UBUNTU	File Server	Bappeliibangda	Bappliibangda	DC Diskominfo	Ubuntu	64 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-7	Storage G	SERVER	File Server	Disperindag	Disperindag	DC Diskominfo	Centos	32 Gb	1 TiB	Raid 1

NO	Nama Data Storage	Deskrip Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	Unit Pengelola	Lokasi Perangkat	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas memory	Kapasitas Penyimpanan	Tenik Penyimpanan
		DISPERDAGIN MERK SUPERMICRO OS CENTOS LOCALHOST								
MP-7	Storage G	SERVER DISDIK MERK SUPERMICRO SERVER DPMPPTSP	File Server	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	DC Diskominfo	Proxmox	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-7	Storage G	MERK SUPERMICRO SERVER DINKES	File Server	DPMPPTSP Dinas Kesehatan	DPMPPTSP Dinas Kesehatan	DC Diskominfo	Debian Windows Server	96 gb	1 TiB	Raid 1
MP-7	Storage G	MERK SUPERMICRO SERVER UB-1 MERK DELL Master Cirebonkab.go.id	File Server					32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-8	Storage H	SERVER UB - 4 MERK DELL	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-8	Storage H	SERVER UB - 3 MERK DELL	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-8	Storage H	SERVER UB - 2 MERK DELL	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-8	Storage H	SERVER UB - 1 MERK DELL	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-8	Storage H	SERVER DPRD MERK DELL	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-8	Storage H	SERVER ATISISBADA MERK IBM	File Server	DPRD	DPRD	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-9	Storage I	SERVER BKPSDM - 1 MERK IBM	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-9	Storage I	SERVER BKPSDM MERK DELL	File Server	BKPSDM	BKPSDM	DC Diskominfo	Ubuntu	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-9	Storage I	SERVER BKPSDM -3 MERK DELL EMC	File Server	BKPSDM	BKPSDM	DC Diskominfo	Ubuntu	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-9	Storage I	SEKVER DESA LEBAKMEKAR MERK	File Server	BKPSDM Desa Lebak mekar	BKPSDM Desa Lebak mekar	DC Diskominfo	Ubuntu	16 gb	1 TiB	Raid 1

NO	Nama Data Storage	Deskrip Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	Unit Pengelola	Lokasi Perangkat	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas memory	Kapasitas Penyimpanan	Tenik Penyimpanan
		IBM								
		SERVER LPSE LAMA DAN ULP LAMA								
MP-9	Storage I	MERK RAIVER SERVER KOPERASI MERK HP PROLIANT ML110	File Server	Bagian Barjas	Bagian Barjas	DC Diskominfo	Debian	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-9	Storage I	SERVER DPPKBP3A ML110	File Server	Dinas Koperasi	Dinas Koperasi	DC Diskominfo	Ubuntu	8 gb	1 TiB	Raid 1
MP-9	Storage I	MEREK PC HP	File Server	DPPKBP3A	DPPKBP3A	DC Diskominfo	Ubuntu	8 gb	1 TiB	Raid 1
MP-10	Storage J	Server SPSE	File Server	Bagian Barjas	Bagian Barjas	DC Diskominfo	Ubuntu	16 gb	1 TiB	Raid 1
MP-10	Storage J	Server LPSE Merk Supermicro	File Server	Bagian Barjas	Bagian Barjas	DC Diskominfo	Ubuntu	64 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-11	Storage K	GOVERNMENT SERVICE BASE MERK DELL EMC SERVER	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	128G	1 TiB	Raid 1
MP-11	Storage K	CIREBONKAB	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-11	Storage K	SERVER CLOUD	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian Windows Server	128G	1 TiB	Raid 1
MP-12	Storage L	Server Service BKAD Server Siraos, lokal routing ke 103.212.211.29	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Windows Server	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-12	Storage L	Server Siraos dan Web BKAD	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Windows Server	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-12	Storage L	Server SIPKD lama routing ke 252	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Windows Server	32 Gb	1 TiB	Raid 1
MP-12	Storage L	Server Verifikasi BKAD	File Server	BKAD	BKAD	DC Diskominfo	Windows Server	32 Gb	1 TiB	Raid 1

NO	Nama Data Storage	Deskrip Server	Jenis Penggunaan	Status Kepemilikan	Unit Pengelola	Lokasi Perangkat	Perangkat Lunak Platform	Kapasitas memory	Kapasitas Penyimpanan	Tenik Penyimpanan
MP-12	Storage L	Server Nagios merk Dell tower	File Server	Diskominfo	Diskominfo	DC Diskominfo	Debian	16 gb	1 TiB	Raid 1

3.5.1.11 Katalog Perangkat Keras Peripherals

Perangkat keras peripheral difungsikan sebagai modul penunjang atau perangkat penunjang infrastruktur utama. Katalog perangkat keras peripheral yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 11 Katalog Perangkat Keras Peripherals

ID	Nama	Perangkat	Deskripsi	Tipe	Penempatan	Lokasi	Unit	RAI Level 1 (Dependency)	RAI Level 2 (Dependency)	RAI Level 3 (Dependency)
AB-01	CRBK SFP+	SFP FO 10G	Input/Out	Diskominfo	Kabupaten	Cirebon	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI	03.01.RAI.03.01.05
			put				Kabupaten	Kerangka	Peripherals	
							Cirebon	Infrastruktur dan	Aplikasi	
AB-02	CRBK RJ45	RJ45	Input/Out	Diskominfo	Kabupaten	Cirebon	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI	03.01.RAI.03.01.05
			put				Kabupaten	Kerangka	Peripherals	
							Cirebon	Infrastruktur dan	Aplikasi	
AB-03	CRBK Converter	Converter	Input/Out	Diskominfo	Kabupaten	Cirebon	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI	03.01.RAI.03.01.05
		Fiber Optic	put				Kabupaten	Kerangka	Peripherals	
		to LAN					Cirebon	Infrastruktur dan	Aplikasi	
AB-04	CRBK OTB	OTB	48Input/Out	Diskominfo	Kabupaten	Cirebon	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI	03.01.RAI.03.01.05
		Core	put				Kabupaten	Kerangka	Peripherals	
							Cirebon	Infrastruktur dan	Aplikasi	
AB-05	CRBK SFP UTP	SFP UTP 1G	Input/Out	Diskominfo	Kabupaten	Cirebon	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI	03.01.RAI.03.01.05
		put					Kabupaten	Kerangka	Peripherals	
							Cirebon	Infrastruktur dan	Aplikasi	
AB-06	CRBK Radio	Radio	Input/Out	Diskominfo	Kabupaten	Cirebon	Diskominfo	RAI 03. Platform	RAI	03.01.RAI.03.01.05
		Wireless	put				Kabupaten	Kerangka	Peripherals	
							Cirebon	Infrastruktur dan	Aplikasi	

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	b DELL EMC											
CRBKAB-DAI7.03.01.03	CRBKAB-DAI7.03.01 Server OPM Backup DELL EMC	Rack 1 - Sendiri		Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	9 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.04	CRBKAB-DAI7.03.01 Server SLRT DELL EMC	Rack 1 - Sendiri		Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	9 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.05	CRBKAB-DAI7.03.01 Server VPS DELL EMC	Rack 1 - Sendiri		Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	9 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.06	CRBKAB-DAI7.03.01 Server VPS DELL EMC	Rack 1 - Sendiri		Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	9 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB-DAI7.03.01.07	CRBKAB-DAI7.03.01.07 Server Arsip	Rack 2 - Server Arsip	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center 64 GB	High	End	2 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.08	CRBKAB-DAI7.03.01.08 Server BKAD/SE MAR	Rack 2 - Server BKAD/SEM AR	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center 64 GB	High	End	2 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.09	CRBKAB-DAI7.03.01.09 Server Dinsos	Rack 2 - Server Dinsos	Sendiri	Dinas Sosial	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center 64 GB	High	End	1 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.10	CRBKAB-DAI7.03.01.10 Server DPMPTSP/PS	Rack 2 - Server DPMPTSP/V 174	Sendiri	Dinas Perencanaan Model dan Pelayanan Terpadu	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center 64 GB	High	End	2 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	VPS 174	Supermicro		Satu Pintu		Informatika						
	Supermicr 0											
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 2 - Server	Sendiri	Dinas Pendidikan, Penduduk, Keluarga, Berencana, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pendidikan, Penduduk, Keluarga, Berencana, Pemberdayaan dan Perempuan dan Perlindungan Anak	Data Center 64 GB Dinas Komunikasi dan Informatika	64 GB	High End	2 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
1.11	.11 Server DPPKB	Supermicro										
	Supermicr 0											
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 2 - Server VPS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center 64 GB Dinas Komunikasi dan Informatika	64 GB	High End	2.4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
1.12	.12 Server VPS 175	Supermicro										
	Supermicr 0											
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 2 - Server VPS 3	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center 64 GB Dinas Komunikasi dan Informatika	64 GB	High End	2.4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
1.13	.13 Server VPS 3	Supermicro										
	Supermicr 0											
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 3 - Server	Sendiri	Dinas Perindustrian dan	Dinas Perindustrian dan	Data Center 16 GB Dinas	16 GB	High End	1 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
1.14	1.14 Server	Diperdagin		Perdagangan	Perdagangan	Komunikasi dan Informatika			4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	Aplikasi
	Diperdagin DELL EMC	DELL EMC										
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 3 - Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	48 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
	1.15 Server Ekinerja DELL EMC	Ekinerja DELL EMC										
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 3 - Server	Sendiri	Inspektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	2 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
	1.16 Server Inspektoral DELL EMC	Inspektoral DELL EMC										
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 3 - Server	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	16 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
	1.17 Server SSO DELL EMC	SSO DELL EMC										
CRBKAB-DAI7.03.0	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 3 - Server VPS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	16 GB	High End	4 TB	Raid 1		
	1.18 Server Bappelitba ngda 205 Bappelitba DELL EMC	Bappelitba DELL EMC										

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
	ngda 205 DELL EMC											
CRBKAB-DAI7.03.0 1.19	CRBKAB-DAI7.03.01 .19 Server VII VPS VII DELL EMC 144 DELL EMC	Rack 3 - Sendiri Server VPS 144	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.0 1.20	CRBKAB-DAI7.03.01 .20 Server VIII VPS VIII DELL EMC 160 DELL EMC	Rack 3 - Sendiri Server VPS 160	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.0 1.21	CRBKAB-DAI7.03.01 .21 Server BMD-1 BMD-1 DELL	Rack 4 - Sendiri Server BMD-1	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.0 1.22	CRBKAB-DAI7.03.01 .22 Server BMD-2 BMD-2 DELL	Rack 4 - Sendiri Server BMD-2	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Server	Lokasi Perangkat Lunak Server	Kapasitas Memori	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Teknik Penyimpanan	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB-DAI7.03.01.23	DELL					Informatika						
	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 4 - Server E-23	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01
	E-Surat DELL					Informatika						Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.24	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 4 - Server HMS 139	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01
	HMS 139 DELL					Informatika						Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
CRBKAB-DAI7.03.01.25	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 4 - Server RSUD	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	128 GB	High End	4 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01
	.25 Server RSUD					Komunikasi dan Informatika						Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
	RSUD Ajiawinang un DELL					Informatika						
CRBKAB-DAI7.03.01.26	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 4 - Server VPS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center Dinas Komunikasi dan Informatika	64 GB	High End	3 TB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01
	.26 Server VPS 02 DELL					Komunikasi dan Informatika						Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi
	DELL					Informatika						
CRBKAB-DAI7.03.01.26	CRBKAB-DAI7.03.01	Rack 5 - Server VPS	Sendiri	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Data Center 4 GB	High	500 GB	Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01	

[illegible]

3.5.1.132. Katalog Perangkat Lunak Platform

Perangkat lunak platform merupakan sistem operasi yang diterapkan (diinstal) pada perangkat keras server milik Pemda Kabupaten Cirebon. Katalog perangkat lunak platform yang ada saat ini disusun berdasarkan Surat edaran KeMenPANRB Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Atribut metadata yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 13 Katalog Perangkat Lunak Platform

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Jenis Sistem Operasi	Jenis Sistem Utilitas (diisi jika tipe perangkat lunak adalah sistem utilitas)	Jenis Lisensi	→ RAI Level 1 (Dependency)	→ RAI Level 2 (Dependency)
CRBKAB-DAI.08.01.03.01	ZOOM MEETING	ZOOM MEETING 100 USER	SISTEM UTILITAS	LAINNYA	VIDEO CONFERENCE	PERIODIK	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.08.01.03.02	CPANEL	CPANEL	SISTEM OPERASI	UNIX	SISTEM OPERASI	PERIODIK	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.08.01.03.03	Centos Server	Sistem operasi lengkap berbasis linux, tersedia secara bebas berbasis teks	SISTEM OPERASI	UNIX	SISTEM OPERSI	Kode Sumber Terbuka	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.08.01.03.02	FIREWALL	FIREWALL	SISTEM OPERASI	NETWORKING OS	PLATFORM	PERIODIK	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.08.01.03.04	VIRTUAL MANAGER	VIRTUAL MACHNINE	SISTEM DATABASE	LAINNYA	VIRTUAL MACHINE	PERIODIK	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI
CRBKAB-DAI.08.01.03.05	NOD32	ANTIVIRUS NOD32	Sistem Utilitas	LAINNYA	ANTIVIRUS	PERIODIK	RAI.03 PLATFORM	RAI.03.01 KERANGKA INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI

3.6. Arsitektur Keamanan

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Komponen Arsitektur Keamanan SPBE Pemerintah Kabupaten Cirebon terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan, dan kelaikan keamanan.



Gambar 31
Komponen arsitektur Keamanan SPBE Kabupaten Cirebon

3.6.1. Standar Keamanan

Standar keamanan merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk regulasi seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, maupun standar teknis dan prosedur dalam bentuk SOP yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon seperti ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14 Jenis SOP Keamanan

ID	NAMA	JENIS STANDAR KEAMANAN	DESKRIPSI	INSTANSI (DEPENDENCY)
SOP-01	Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pelayanan Digital Forensik	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Praktik standar melakukan digital forensik untuk satu website	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Cirebon
SOP-02	Standar Operasional Prosedur (SOP) Permohonan Pelayanan Penetration Testing	Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Praktik standar melakukan Tes standar Keamanan	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Cirebon

3.6.2 Penerapan Keamanan

Penerapan keamanan merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja Keamanan SPBE yang telah dilaksanakan sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja Keamanan SPBE disusun berdasarkan kategori risiko terhadap aplikasi, data dan informasi, serta infrastruktur dari setiap IPPD masing-masing. Program kerja Keamanan SPBE yang telah diterapkan meliputi:

- 1. Edukasi kesadaran keamanan SPBE;
- 2. Penilaian kerentanan keamanan SPBE;
- 3. Peningkatan keamanan SPBE;
- 4. Penanganan insiden keamanan SPBE; dan
- 5. Audit Keamanan SPBE.

3.6.2.1. Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi serta meningkatkan keahlian dalam penerapan keamanan aplikasi dan keamanan infrastruktur TIK. Kegiatan yang telah dilaksanakan yakni sosialisasi dan verifikasi Faktual TTE bagi Kepala Desa se- Kabupaten Cirebon.

Tabel 15 Kegiatan Literasi Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Edukasi	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Instansi (Dependency)
EDU-01	Sosialisasi dan Verifikasi Faktual TTE bagi Kepala Desa se Kabupaten Cirebon	Output kegiatan ini adalah digunakannya TTE. Kegiatan dilaksanakan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon dan ditujukan untuk Kepala Desa seKabupaten Cirebon	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

3.6.2.2. Penilaian kerentanan Keamanan SPBE

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE dilaksanakan melalui kegiatan untuk mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset aplikasi web melalui *vulnerability assesment* (VA) antara lain:

- 1. Penetration Test Aplikasi CirebonKab;
- 2. Penetration Test Aplikasi Opendata;
- 3. Penetration Test Aplikasi Visualisasi Data.

Tabel 16 Kegiatan Identifikasi Kerentanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Instansi
IKK-01	Penetration Test Aplikasi Opendata	Pelaksanaan Penetration Test untuk Identifikasi Kerentanan Aplikasi Opendata	Diskominfo Kab Cirebon
IKK-02	Penetration Test Aplikasi CirebonKab;	Pelaksanaan Penetration Test untuk Identifikasi Kerentanan Aplikasi CirebonKab	Diskominfo Kab Cirebon
IKK-02	Penetration Test Aplikasi Visualisasi Data	Pelaksanaan Penetration Test untuk Identifikasi Kerentanan Aplikasi Visualisasi Data	Diskominfo Kab Cirebon

3.6.2.3. Peningkatan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:

- 1. Pemasangan sertifikat SSL untuk domain cirebonkab.go.id pada tanggal 21 Januari 2023; dan
- 2. Pemasangan perangkat Firewall di server farm Pusat Data Diskominfo.

Tabel 17 Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE

ID	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	→ Instansi (Dependency)
PKT-01	Pemasangan Infrastruktur dedicated Firewall	Instalasi dan konfigurasi perangkat firewall server untuk upaya pengamanan data pada aplikasi kepegawaian	Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon
PKT-02	Pemasangan SSL di Domain utama dan sub domain cirebonkab.go.id	Instalasi secure socket layer (SSL) pada website official Kabupaten Cirebon	Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon

3.6.2.4 Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan Infrastruktur jaringan, pusat data, dan lainnya melalui penilaian sertifikasi ISO 27001:2022 dan penilaian indeks KAMI.

BAB IV
ARSITEKTUR TARGET

4.1. Arsitektur Aplikasi Usulan

4.1.1. Katalog Aplikasi Usulan

Katalog ini mempertimbangkan inisiatif aplikasi yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk di masa mendatang. Inisiatif-inisiatif tersebut akan berkembang dan bertambah seiring dengan kebutuhan bisnis proses di masing-masing Perangkat daerah. Berikut merupakan pendetailan inisiatif pengembangan aplikasi kedepannya di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tabel 18 Katalog Aplikasi Usulan

ID APLIKASI	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	BASIS APLIKASI	UNIT OPERASIONAL	RAA LEVEL1	RAA LEVEL 2	DATA DAN INFORMASI	LAYANAN
APPU-001	GeoDashbord	Sistem Informasi terkait Dashbord Geospasial	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Geospasial Pemerinntahan Kabupaten Cirebon	Layanan Data Geospasial
APPU-002	Pengembangan SuperApps	Sistem Informasi terkait Layanan Publik berbasis Digital	Mobile	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Pelayanan Publik yang ada di Perangkat Daerah	Layanan Publik Data
APPU-003	Sistem Informasi Analitik Keamanan Sistem	Sistem informasi terkait dashboard keamanan jaringan dan aplikasi	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Keamanan jaringan dan aplikasi	Layanan Keamanan Sistem
APPU-004	Sistem 112	Sistem Informasi terkait kegawatdaruratan	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Laporan Kedaruratan warga	Layanan Laporan Kedaruratan
APPU-005	Sistem EMR	Sistem Informasi terkait pelayanan Puskesmas	Web based	Dinas Kesehatan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Layanan Kesehatan Masyarakat
APPU-006	Sistem CCTV	Sistem Informasi terkait CCTV	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data video lokasi lalu lintas	Layanan Pantauan Lalu Lintas
APPU-007	Pengembangan SiPepek	Sistem Informasi Layanan Rujukan Terpadu Kemiskinan	Web based	Dinas Sosial	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Masyarakat miskin wilayah Kabupaten Cirebon	Layanan Jaminan Sosial
APPU-008	Pengembangan Website PemKab	Sistem Informasi	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi	RAA.02.02 Aplikasi	Data Permintaan	Layanan Pengembang

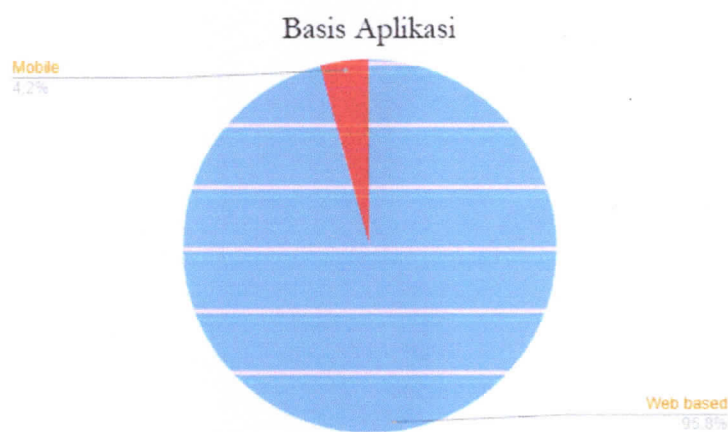
ID APLIKASI	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	BASIS APLIKASI	UNIT OPERASIONAL	RAA LEVEL1	RAA LEVEL 2	DATA DAN INFORMASI	LAYANAN
	dan Perangkat Daerah	terkait Informasi Kegiatan PEMKAB dan Perangkat Daerah			Khusus	Fungsi Tertentu	Pengembangan Websites layanan Perngakat Daerah	dan Web Perangkat Daerah
APPU-009	SMART DESA	Sistem Informasi tentang produk unggulan Desa	Web based	Dinas Kominfo	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Produk Unggulan Desa	Layanan Informasi Produk Unggulan Desa
APPU-010	Layanan Aplikasi Zibanting	Sistem Informasi terkait kesehatan ibu dan anak	Web based	Dinas Kesehatan	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Kesehatan Ibu dan Anak	Layanan Informasi data Kesehatan Ibu dan anak
APPU-011	Sistem Informasi Bank Sampah	Sistem Informasi terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga	Web based	DLH	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pengeolaan Bank Sampah wilayah Kabupaten Cirebon	Layanan Informasi Data Bank Sampah di kabupaten Cirebon
APPU-012	Sistem Informasi Uji Kir	Sistem Informasi terkait Uji KIR	Web based	Dishub	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Uji kendaraan Bermotor	Layanan Informasi mengenai syarat Uji Kendaraan bermotor
APPU-013	Pengembangan Sistem Informasi Hibah Bansos	Sistem Informasi terkait pendaftaran hibah Bansos	Web based	Bag Kesra	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Hibah bansos	Layanan Informasi Bansos
APPU-014	Sistem SPBE	Sistem Informasi terkait SPBE	Web based	Dinas Kominfo	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data informasi Layanan yang tersedia Di arsitektur SPBE	Layanan Informasi terkait layanan SPBU
APPU-015	Sistem Smart City	Sistem Informasi terkait Smart City	Web based	Dinas Kominfo	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data informasi Layanan yang tersedia Di arsitektur SPBE	Layanan Informasi terkait layanan SmartCity
APPU-016	Pengembangan Layanan Helpdek	Sistem Informasi terkait pengaduan sistem	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data layanan tanya jawab seputar layanan daerah	Layanan Tanya Jawab Pelayanan daerah
APPU-017	Pengembangan Side Dashboard	Sistem Informasi terkait Dashboar executive terintegrasi	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Sektoral Perangkat Daerah	Layanan Visualisasi Data
APPU-018	Pengembangan Open DATA	Sistem Informasi Data Statistik geospasial	Web based	Dinas Kominfo	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Layanan Data Statistik dan geospasiall	Layanan data sektoral
APPU-019	Pengembangan Sistem Manajemen Obat	Sistem Informasi Manajemen Obat	Web based	Dinas Kesehatan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ketersediaan Obat	Layanan Stock Obat
APPU-020	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Web based	Dinas Kominfo	RAA.01 Aplikasi	RAA.01.01 Aplikasi	Informasi Kegiatan	Layanan Informasi

ID APLIKASI	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	BASIS APLIKASI	UNIT OPERASIONAL	RAA LEVEL1	RAA LEVEL 2	DATA DAN INFORMASI	LAYANAN
	PODCAST Pemerintah	PODCAST Pemerintah berbasis web			Umum	Layanan Publik	Pemkab Cirebon	
APPU-021	Sistem Dashboard Perizinan dan investasi	Sistem Informasi terkait Dashboard Perizinan dan investasi	Web based	DPMPTSP	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	Data Perijinan dan investasi	layarian informasi Perijinan
APPU-022	Pengembangan sistem MPRAS	Sistem informasi terkait absensi ASN	Mobile	BKPSDM	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Absensi ASN	Layanan Informasi absensi
APPU-023	Pengembangan Sistem informasi Stunting	Sistem Informasi validasi data balita stunting dan Pemetaan Wilayah	Web based	Dinas Kesehatan	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Stunting Balita	Layanan Informasi Stunting
APPU-024	Pengembangan Sistem informasi Mitigasi Bencana Terpadu	Sistem Informasi terkait Bencana Alam	Mobile	BPBD	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Bencana daerah	Layanan Informasi Bencana
APPU-025	Pengembangan Sistem Informasi Sibaja Cilok	Sistem Informasi Barang dan Jasa	Web based	Bag Barang dan Jasa	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Pengadaan Barang dan jasa	Layanan Informasi pengadaan Barang dan Jasa
APPU-026	Pengembangan Aplikasi Kepokmas	Sistem Informasi terkait harga kebutuhan pokok dan sistem retribusi pasar	Web based	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data harga sembako	Layanan update harga Sembako
APPU-027	SIstem e-SIPPD	Sistem Informasi Pelaporan Perjalanan Dinas	Web based	Dinas Kominfo	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Perjalanan Dinas	Layanan Perjalanan Dinas
APPU-028	Pengembangan aplikasi pariwisata	Sistem informasi terkait hiburan pariwisata	Web based	Dinas Kebudayaan Pariwisata	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data jumlah kegiatan Pariwisata	Layanan Informasi Pariwisata
APPU-029	Pengembangan aplikasi kebudayaan	Sistem Informasi terkait kebudayaan	Web based	Dinas Kebudayaan Pariwisata	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data jumlah kegiatan Kebudayaan	Layanan Informasi Kebudayaan
APPU-030	Aplikasi booking sewa tempat olahraga	Sistem Informasi Sewa Tempat	Web based	Dinas pemuda dan olahraga	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Kunjungan Olahraga	Layanan Informasi Tempat Olahraga
APPU-031	Aplikasi Kepemudaaan	Sistem Informasi terkat kepemudaan	Web based	Dinas pemuda dan olahraga	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Jumlah Kegiatan kepemudaan	Layanan Informasi Kepemudaar
APPU-032	Aplikasi Perpustakaan	Sistem Informasi terkait Perpustakaan	Web based	Disarpus	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Jumlah kunjungan Perpustakaan	Layanan Informasi perpustakaan
APPU-033	Aplikasi Kependudukan	Sistem informasi	Web based	Disdukcapil	RAA 02 Aplikasi	RAA.02.01 Aplikasi Misi	Data ijin Kependudukan	Layanan Informasi

ID APLIKASI	NAMA APLIKASI	URAIAN APLIKASI	BASIS APLIKASI	UNIT OPERASIONAL	RAA LEVEL1	RAA LEVEL 2	DATA DAN INFORMASI	LAYANAN
		terkait Perijinan			Khusus	Tertentu		izin penduduk
APPU-034	Aplikasi kesehatan	Sistem Informasi terkait kesehatan	Web based	Dinas Kesehatan	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data kesehatan masyarakat	Layanan Informasi Kesehatan
APPU-035	Aplikasi Sistemajuan Permohonan Bantuan Perumahan	Sistem Informasi Bantuan Perumahan	Web based	Dinas Perumahan dan Kawasan Pertanahan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Bantuan Perumahan	Layanan Informasi Bantuan Perumahan
APPU-036	Aplikasi Satu Data Pendidikan	Digunakan untuk mengetahui Data Satuan Pendidikan, Guru, Siswadan Sarpras Sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon	Web based	Dinas Pendidikan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Satu Pendidikan	Layanan Informasi Data Satu Pendidikan
APPU-037	Aplikasi Perbuhungan	Sistem Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon	Web based	Dinas Perhubungan	RAA 02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Perlengkapan Jalan	Layanan Informasi Perlengkapan jalan
APPU-038	Pengembangan Siormas	Sistem Informasi Pendataan Ormas	Web based	Badan Kesbangpol	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Ormas	Layanan Informasi Ormas
APPU-039	Pengembangan Sistem informasi Terpadu Pelayanan Kesehatan Jiwa	Sistem Informasi terkait Pelayanan Kesehatan Jiwa	Web based	Dinas Kesehatan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa	Layanan Informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa
APPU-040	Pengembangan Aplikasi Website Komisi Penaggulangan Aids	Sistem Informasi Layanan HIIV dan AIDS	Web based	Dinas Kesehatan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Jumlah Layanan HIV/AIDS	Layanan Informasi Pelayanan HIV/AIDS
APPU-041	Aplikasi Evaluasi Kelembagaan	Sistem Informasi Evaluasi Kelembagaan	Web Based	Bag Organisasi	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu	Data Jumlah Evaluasi Kelembagaan	Layanan Informasi Jumlah Evaluasi Kelembagaar
APPU-042	e-POKIR	Sistem Informasi Pokok Pikiran DRPD	Web Based	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Jumlah Pokok Pikiran DRPD	Layanan Informasi Pokok Pikiran DRPD
APPU-043	Aplikasi Pendaftaran Dokumen Kependudukan	Aplikasi yang digunakan untuk melakukan pendaftaran dokumen kependudukan	Web Based	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data Jumlah Pendaftaran Dokumen Kependudukan	Layanan Informasi Pendaftaran Dokumen Kependudukan
APPU-044	Pengembangan Aplikasi Perpustakaan	Aplikasi untuk survey masyarakat bidang perpustakaan	Web Based	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	Data minat baca	Layanan Informasi minat baca Masyarakat

4.1.2 Analisis Diagram dan Apl1Gambar 32 Referensi Arsitektur Aplikasi

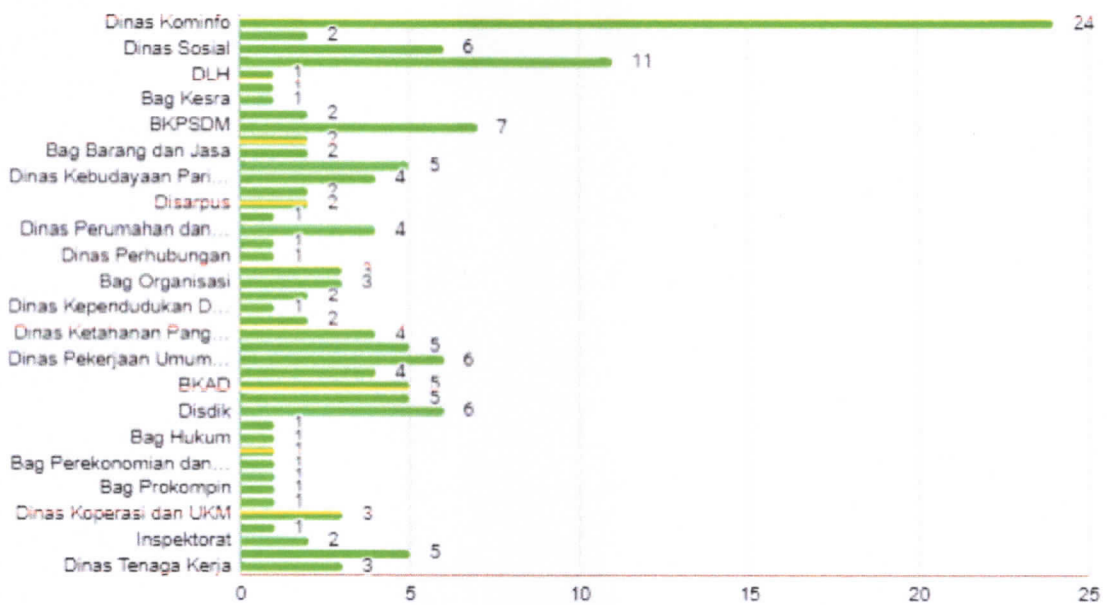
Merujuk pada Grafik 3.1.2.1. menunjukkan referensi arsitektur aplikasi usulan pada RAA Level 1 dan RAA Level 2. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sesuai dengan Referensi Arsitektur Level 1 terdapat 18,6% (27 Aplikasi) merupakan RAA.01 Aplikasi Umum, 81,4% (119 Aplikasi) merupakan RAA.02 Aplikasi Khusus, selanjutnya Referensi Arsitektur Level 2 Aplikasi usulan terbagi menjadi 3 yaitu 7,6% (11 Aplikasi) merupakan RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik 11% (16 Aplikasi) merupakan RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan, 15,9% (23 Aplikasi) merupakan RAA.02.01 Aplikasi Misi Tertentu, 65,5% (96 Aplikasi) merupakan RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu. RAA Nasional Paling Banyak pada RAA.02 Aplikasi khusus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis aplikasi yang paling banyak diusulkan adalah aplikasi khusus yang menunjang layanan terkait OPD pengusul aplikasi.



Gambar 33 Kondisi Teknologi Informasi

Berdasarkan Basis aplikasi yang digunakan dalam aplikasi usulan 95,8 % (138 Aplikasi) merupakan Web Based dan 4,2% (8 Aplikasi) merupakan Mobile. Berdasarkan kondisi aplikasi yang diusulkan oleh OPD mayoritas berbasis Website, karena mudah untuk di akses di berbagai platform, selanjutnya perlu dipastikan jumlah web programmer dapat mengakomodir pengembangan aplikasi usulan tersebut.

Unit Operasional



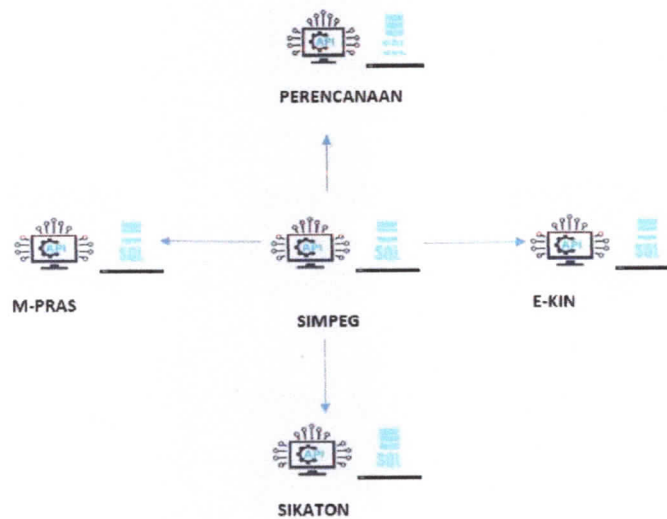
Gambar 34 Perangkat Daerah Pengelola Aplikasi Usulan

Merujuk Pada Grafik 3.1.2.3 dapat dilihat Perangkat Daerah yang paling banyak dalam melakukan usulan yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, BKPSDM, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BKAD hal ini perlu dilakukan agar layanan di Perangkat Daerah tersebut bisa terdigitalisasi.

4.1.3. Diagram Integrasi Antar Aplikasi

Integrasi aplikasi ini dimulai karena adanya kebutuhan pertukaran data/informasi antara aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Kebutuhan dari operasional pemerintahan mengharapkan data/informasi yang dipunyai oleh sebuah aplikasi dari suatu Perangkat daerah harus dikirimkan ke aplikasi lain yang dimiliki Perangkat daerah yang lain. Kebutuhan pertukaran data/informasi dapat berlaku dalam skala lebih luas, seperti integrasi antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan instansi pusat untuk kepentingan pelaporan dan sebagainya. Berikut ini digambarkan aplikasi yang sudah terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

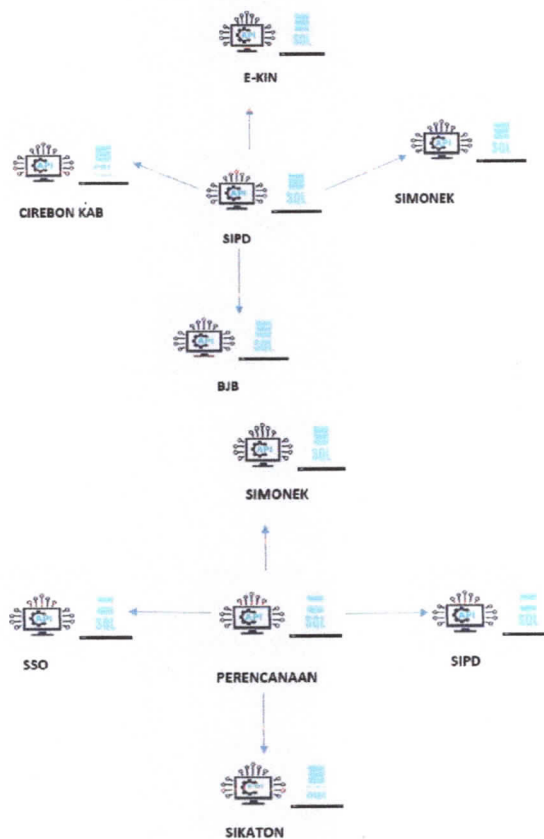
A. Bidang Kepegawaian dan Kearsipan



Gambar 35 Usulan Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang Urusan Kepegawaian dan Kearsipan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Gambar tersebut menunjukkan diagram Integrasi antar aplikasi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dapat dilihat terdapat beberapa aplikasi yang digunakan dalam layanan kepegawaian dan kearsipan dimana terdapat beberapa aplikasi yaitu aplikasi SIMPEG terintegrasi dengan SIKATON dan e-Kinerja berupa Data Kepegawaian, sekarang SIMPEG akan diintegrasikan dengan Aplikasi Perencanaan.

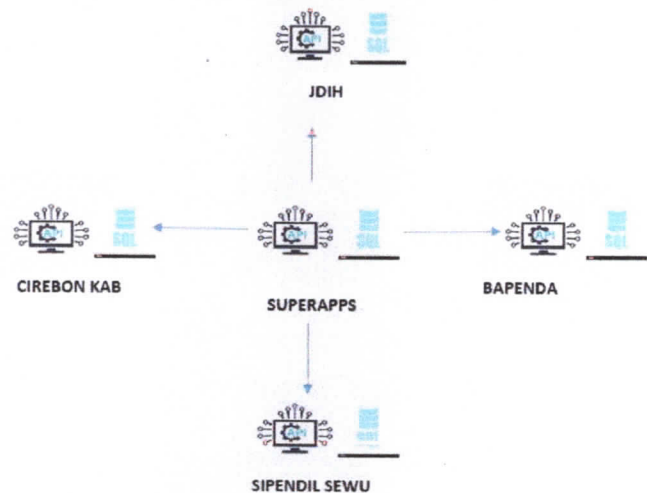
B. Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Aset



Gambar 36 Usulan Integrasi Antar Aplikasi pada Bidang perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset

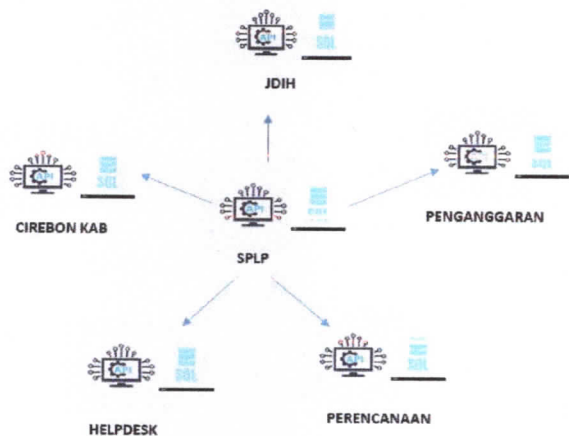
Gambar tersebut menunjukkan integrasi antar aplikasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon pada layanan perencanaan, penganggaran, keuangan dan aset. Aplikasi tersebut adalah SIPD Pusat, terintegrasi dengan e-Perencanaan, SIMONEK dan SIKATON. SIKATON mengirimkan data aset ke e-Perencanaan, kemudian SIMONEK terintegrasi dengan e-Perencanaan berupa capaian realisasi anggaran, sedangkan realisasi pembayaran PBB dari eLayanan PBB-P2 akan dikirimkan ke AKANG SURJA dan layanan PBB akan mengirim data pajak daerah ke BANK.

C. Bidang Komunikasi dan Informatika



Gambar 37 Integrasi SuperApps Antar Aplikasi

Gambar tersebut menunjukkan Integrasi antar aplikasi Kabupaten Cirebon dengan Layanan bantuan usaha masyarakat miskin. Layanan ini terdapat beberapa aplikasi yang digunakan yaitu BAPENDA, SIPENDIL SEWU, SP4N Lapor, Website CirebonKab, JDIH, dan SuperAPP, kedepannya akan menjadi Portal untuk Aduan Masyarakat, yang datanya akan diambil dari SIPENDIL SEWU dan Website CirebonKab, mengirimkan Laporan data bantuan usaha Ke SuperAPP sebagai monitoring.



Gambar 38 Integrasi Application Programming Interface dengan beberapa aplikasi

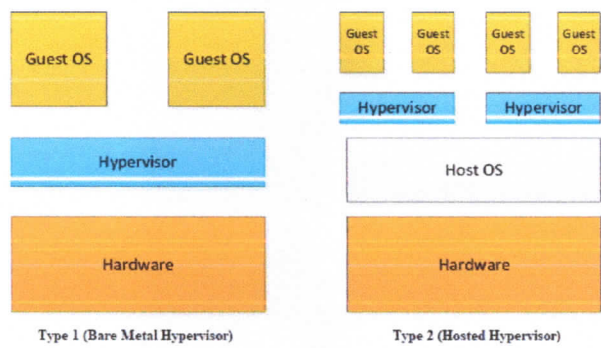
Gambar di atas adalah contoh integrasi API SPLP (Sistem Penghubung Layanan Pemerintah) milik Kementerian Kominfo yang

diterapkan di beberapa aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data, sistem aplikasi, Layanan SPBE, dan kanal-kanal perangkat IoT dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

4.2. Arsitektur Infrastruktur dan Keamanan

4.2.1 Usulan Teknologi Virtualisasi

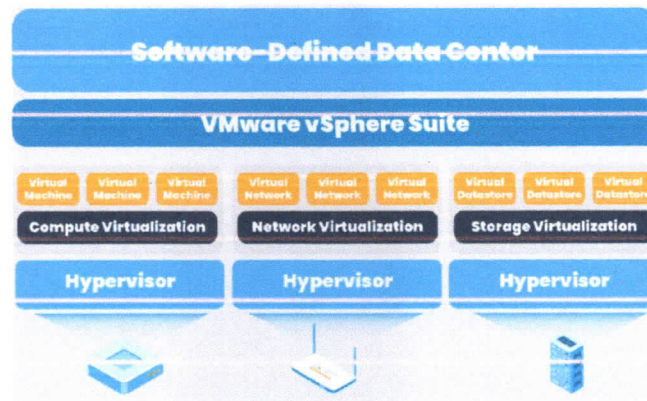
Teknologi virtualisasi server adalah teknik yang memungkinkan beberapa sistem operasi atau lingkungan virtual untuk dijalankan pada satu server fisik. Ini dicapai dengan menggunakan perangkat lunak yang dikenal sebagai hypervisor, yang mengabstraksi sumber daya fisik server dan mendistribusikannya ke lingkungan virtual (virtual machines atau VM).



Gambar 39 Jenis Hypervisor

A) Teknologi Virtualisasi Data Center

Virtualisasi data center adalah proses abstraksi komponen fisik data center, seperti server, storage, dan jaringan, untuk menciptakan lingkungan komputasi yang lebih fleksibel dan efisien. Melalui virtualisasi, sumber daya fisik data center dipisahkan dari perangkat keras yang mendasarinya, memungkinkan sumber daya tersebut untuk dikelola dan dialokasikan secara dinamis sesuai kebutuhan. Ini memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dari sumber daya fisik dan meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memindahkan, dan mengukur beban kerja melalui



Gambar 40 Visualisasi Data Center

B) Microservice

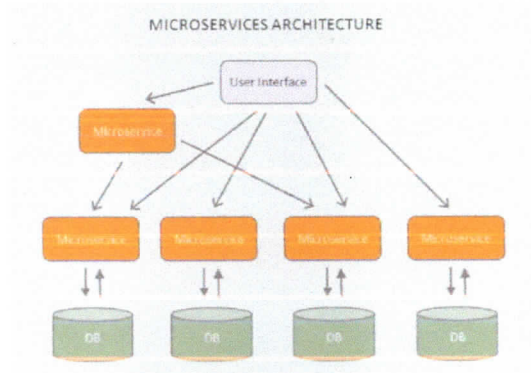
Arsitektur microservices merupakan sebuah pendekatan untuk membangun aplikasi sebagai serangkaian atau sekumpulan “service” (berupa layanan, unit, atau komponen) yang dapat dikembangkan, di deploy, dan dikelola secara independen atau mandiri. Penggunaan arsitektur microservices saat ini semakin luas diadopsi oleh banyak perusahaan di seluruh dunia sebagai langkah untuk memecahkan masalah mereka selama ini saat menggunakan pendekatan monolithic.

Microservices yaitu membagi service ke bagian yang lebih kecil dimana service-service tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selain itu, dalam setiap services yang dibuat bisa menggunakan teknologi yang berbeda. Sedangkan untuk implementasi ke web, android, iOS dll tidak bisa secara langsung. Dimana pengembang harus membuat terlebih dahulu yang namanya API Gateway. API Gateway memiliki tugas seperti load balancing, caching, access controll, API metering, dan monitoring

Aplikasi yang akan dibangun dengan menggunakan arsitektur microservices dimana setiap modul yang dimiliki akan dibangun engine masing-masing dan memiliki basis data masing masing, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan kinerja aplikasi yang signifikan. Di samping itu keamanan aplikasi akan lebih terjamin dengan melakukan pengamanan aplikasi melalui REST API, sehingga transaksi dan pertukaran data yang dilakukan akan lebih terjaga.

Arsitektur Pangkalan Data (Database) Microservices

Arsitektur basis data yang akan diterapkan pada arsitektur aplikasi microservices adalah menggunakan two-tier architecture, setiap modul aplikasi tersebut memiliki pangkalan data masing-masing sesuai dengan perannya, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 41 Arsitektur Microservice

4.2.2 Usulan Pusat Data

Data center atau pusat data adalah ruangan fisik untuk menyimpan data, memproses informasi bisnis, dan menampung server komputer suatu organisasi. Disaster Recovery Center (DRC) adalah fasilitas yang dirancang untuk membantu organisasi memulihkan operasi mereka setelah terjadi bencana atau kejadian yang merusak. Contoh bencana atau kejadian yang merusak adalah bencana alam, serangan siber, atau kerusakan peralatan.

Pusat pemulihan bencana ini biasanya dilengkapi dengan infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem, aplikasi, dan data organisasi setelah terjadi bencana.

Prinsip dan kriteria perancangan sebuah Pusat Data secara umum antara lain:

1. Ketersediaan (Availability)

Perancangan sebuah pusat data sejatinya harus sebisa mungkin mendekati *zero-failure* untuk seluruh komponen sehingga bisa memberikan operasi berkelanjutan dan terus menerus untuk suatu organisasi karena vitalnya.

2. Skalabilitas (Scalability)

Untuk memenuhi tantangan kebutuhan pekerjaan berat, Pusat Data harus beradaptasi dengan pengembangan teknologi terkini sehingga ketika ada Pusat data harus beradaptasi pertumbuhan kebutuhan cepat agar servis yang baru tersedia tanpa melakukan perubahan total.

3. Keamanan (Security)

Sistem Keamanan dilakukan seketat mungkin meliputi Pengamanan fisik dan non-fisik karena di Pusat Data merupakan penyimpanan Aset fisik seperti server, jaringan dan lain-lain maupun aset non fisik yakni data-data.

4. Kemudahan Backup dan Recovery

Pengembangan Infrastruktur Data center harus memenuhi prinsip kemudahan dalam Backup dan Recovery karena jika terjadi crash dump atau kerusakan pada server tidak membutuhkan waktu yang lama dalam instalasi dan konfigurasi.

1. Topologi Data Center

Terdiri dari sistem-sistem pendukung, infrastruktur utama, dan infrastruktur pendukung DC. Berikut ini adalah rincian topologi Data Center:

a. Sistem-sistem pendukung DC meliputi:

- Sistem kelistrikan;
- Sistem pendingin dan kelembaban;
- Sistem pemadam kebakaran;
- Sistem pengkabelan;
- Desain ruang komputer meliputi raised floor, cable tray, dan lokasi rack server;
- Sistem Keamanan;
- Sistem Pencahayaan; dan
- sistem Pemantau Lingkungan.

b. Infrastruktur Utama DC meliputi:

- Infrastruktur Jaringan;
- Infrastruktur Server & Storage;
- Model DC; dan
- Aplikasi pendukung (Software).

c. Infrastruktur Pendukung DC meliputi:

- Local Area Network;
- Wireless LAN;
- WAN;
- Remote Access dan VPN;
- Internet; dan
- Telekomunikasi

2. Ruang Pendukung

Ruang pendukung DC adalah merupakan ruang yang digunakan untuk menyimpan peralatan IT dari pusat data. Ruangan ini menyediakan akses sepanjang waktu ke informasi, sehingga harus bekerja secara optimal sepanjang waktu. Ruang operasional dan pemantauan DC juga termasuk ruang pendukung DC. Rincian ruang pendukung DC yang direkomendasikan antara lain sesuai dengan label gambar di atas adalah

a. Lobby

Lokasi ruang tunggu tamu, rekanan, penukaran kartu identitas dengan kartu akses.

b. Security

Lokasi ruang operasi keamanan meliputi pemantauan CCTV, kontrol akses ke ruangan.

c. Office

Ruang kerja administrasi DC termasuk ruang kepala DC.

d. Facility Control

Ruang kontrol fasilitas DC seperti kontrol suhu & kelembaban, power, listrik dan lain – lain.

e. Hall

Ruang serba guna yang bisa digunakan untuk kegiatan meeting dalam jumlah besar atau lainnya.

f. Operations Command Center

Petugas memonitor server pusat data melalui dashboard yang ditayangkan dalam layar lebar.

g. Network Room

Lokasi rak perangkat jaringan dan keamanan jaringan. Semua struktur kabel data baik UTP maupun Fiber optic berakhir di ruang jaringan.

h. Meet Me Room

Ruang terminasi (akhir) kabel jaringan dari provider internet (ISP), dan telekomunikasi.

i. Network Operating Center

Ruang pemantauan kinerja jaringan DC yang ditayangkan melalui dashboard.

j. Meeting Room

Ruang pertemuan untuk rapat atau diskusi dari pengelola DC.

k. Fire Suppression System

Ruang untuk menempatkan perangkat-perangkat pendukung sistem pemadam kebakaran (fire suppression).

l. UPS

Ruang untuk perangkat UPS pendukung catu daya cadangan ruang server, lampu, cctv, access control dll.

m. UPS

Battery Ruang battery UPS yang terpisah dari UPS sehingga mudah untuk perawatan dan penggantian battery.

n. Loading Dock

Tempat untuk menerima peralatan yang baru datang untuk pusat data.

o. Build Room/Staging Area

Tempat untuk membangun dan mengkonfigurasi peralatan yang akan digunakan bagi pusat data

3. Sistem Kelistrikan

Sistem kelistrikan meliputi catu daya utama dan catu daya cadangan. Catu daya utama berasal dari listrik PLN dan catu daya cadangan berasal dari generator, dan UPS. Beberapa ketentuan tentang sistem kelistrikan di DC antara lain:

- a. Kabel daya masuk ke dalam bangunan pusat data (data center) determinasi di ruang kendali penyambungan listrik yang handal.
- b. Daya listrik utama paling sedikit 20% lebih besar dari proyeksi beban puncak di mana pusat data (data center) berada.
- c. Tersedianya catu daya listrik alternatif (seperti generator standby) dengan kapasitas yang memadai untuk operasional minimal 3 jam selama kejadian gangguan listrik utama.

- d. Perangkat server, storage, jaringan, keamanan server & jaringan, CCTV, access control, penerangan harus diproteksi dengan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau catu daya cadangan lainnya.
- e. UPS atau catu daya cadangan lainnya harus memiliki kapasitas memadai untuk memasok beban DC sampai catu daya alternatif mampu memikul beban perangkat DC (steady state).
- f. Kapasitas UPS harus lebih besar dari proyeksi beban puncak perangkat DC. Kapasitas beban rata-rata tidak lebih besar dari 80% kapasitas UPS.
- g. UPS memiliki sistem pelaporan, pemantauan kinerja, dan sistem peringatan.
- h. UPS yang digunakan telah memiliki jaminan dari pabrikan untuk dapat berfungsi sesuai spesifikasinya.

Bangunan harus dilengkapi dengan sistem proteksi petir

- a. Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih (surge suppressor) sebelum ke ruang pusat data (data center).
- b. Ruang pusat data (data center) memiliki terminal pembumian (grounding) tembaga yang menjadi titik acuan pembumian ruangan tersebut.
- c. Sistem grounding untuk peralatan data center harus dibedakan dengan peralatan lainnya seperti sistem penangkal petir pada bangunan data center.
- d. Semua benda logam harus terikat ke tanah termasuk lemari, rak, PDU, CRAC (AC Ruangan Server), jalur kabel, dan setiap raised floor dengan resistansi grounding kurang dari 1 Ohm

Kebutuhan listrik di DC untuk mendukung dua komponen yakni peralatan TI dan peralatan pendukung DC seperti tabel di bawah ini

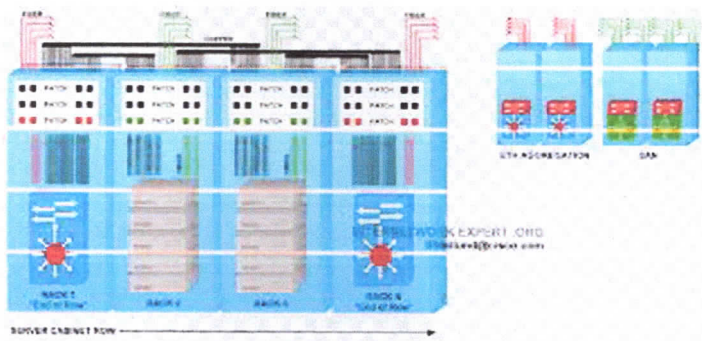
Tabel 19 Kebutuhan Listrik DC

Kebutuhan Listrik Peralatan DC	UPS, PDU, Kabel, Network Devices, Server, Storage
Kebutuhan Listrik Pendukung DC	Sistem pendingin, Pencahayaan, Fire Surpression, Keamanan, Generator

4. Distribusi Listrik Ruang Server

Adalah penghubung terakhir dalam power chain dan memastikan pengiriman daya kritis ke beban IT. RPDU dirancang untuk mendistribusikan daya ke semua jenis peralatan TI di dalam pusat data.

RPDU mampu memantau, mengelola, dan mengontrol konsumsi daya ke beberapa perangkat di lingkungan pusat data. Ini dapat mendistribusikan listrik dalam jumlah besar dan dapat diakses melalui jaringan lokal atau jarak jauh. Untuk memenuhi kebutuhan pusat data yang selalu berubah, rPDU dapat mengakomodasi kepadatan daya yang lebih tinggi dan tahan terhadap suhu yang lebih tinggi. Untuk menghindari gangguan distribusi daya dasar, beberapa rPDU dapat dengan mudah ditingkatkan dan diservis tanpa perlu melepas daya dari perangkat yang terhubung. Fitur-fitur ini meminimalkan waktu henti dan membawa dukungan yang disediakan produsen untuk memenuhi Perjanjian Tingkat Layanan (SLA).



Gambar 42 Distribusi Listrik dari PDU melalui Panel Circuit

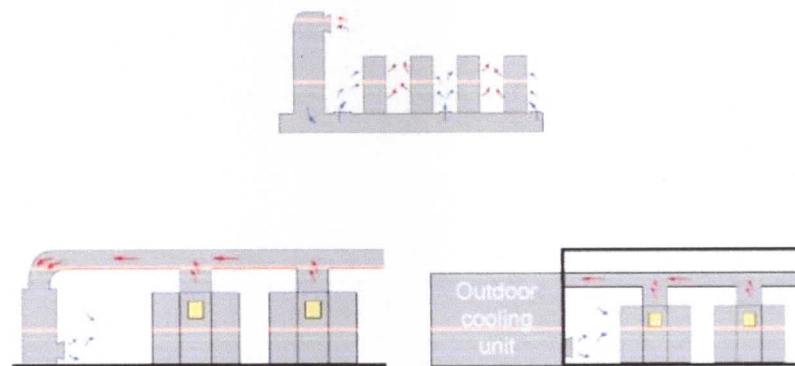
Gambar di atas adalah distribusi listrik dengan menggunakan panel circuit yang tersebar di Remote Distribution Cabinet. Power dari perangkat UPS akan diteruskan ke PDU untuk selanjutnya

didistribusikan ke beberapa panel circuit (remote distribution cabinet). Untuk selanjutnya power akan didistribusikan ke power strip yang ada di tiap rak cabinet. Di setiap power strip terdapat perangkat untuk pemantauan beban listrik (electrical load).

5. Sistem Pendingin & Kelembaban

Sistem pendinginan data center adalah teknologi yang dirancang untuk menjaga suhu dan kelembaban udara dalam ruang server. Sebab sebagian besar perangkat, kabel, dan komponen di ruang server bisa cepat rusak jika terpapar suhu dan kelembaban tingkat tinggi. Oleh karena itu, sistem pendinginan sangat penting untuk melindungi peralatan tersebut. Selain itu, tanpa adanya sistem pendinginan, kinerja server dapat melambat karena panas. Ada tiga metode pendingin utama yang digunakan di data center, yaitu:

- Pendingin berbasis ruangan (room-based cooling)
- Pendingin berbasis baris (row-based cooling)
- Pendingin berbasis rak (rack-based cooling)



Gambar 43 Sistem Pendingin Ruangan di DC

a. Pendingin Berbasis Baris (Row Based)

Pendingin berbasis baris adalah metode pendingin yang menggunakan unit pendingin yang ditempatkan di antara baris-baris rak perangkat IT. Unit pendingin ini mengeluarkan udara dingin secara langsung ke depan rak perangkat IT dan kemudian menyerap udara panas yang keluar dari belakang rak perangkat IT. Unit pendingin ini biasanya dilengkapi dengan pintu atau panel yang dapat menutup ruang antara

unit pendingin dan rak perangkat IT untuk mencegah pencampuran udara dingin dan panas.

Keuntungan Metode ini:

- Lebih efisien dan efektif untuk mendinginkan perangkat IT dengan kepadatan dan variasi tinggi
- Lebih hemat ruang dan biaya daripada pendingin berbasis ruangan
- Lebih mudah untuk menambah atau mengurangi kapasitas pendingin sesuai dengan kebutuhan

Kekurangan Metode ini:

- Membutuhkan koordinasi yang baik antara unit pendingin dan rak perangkat IT
- Membutuhkan perencanaan yang cermat untuk menghindari gangguan aliran udara
- Membutuhkan pemeliharaan yang lebih sering dan intensif



Gambar 44 Pendingin Row Based

b. Pendingin Berbasis Rak (Rack-Based)

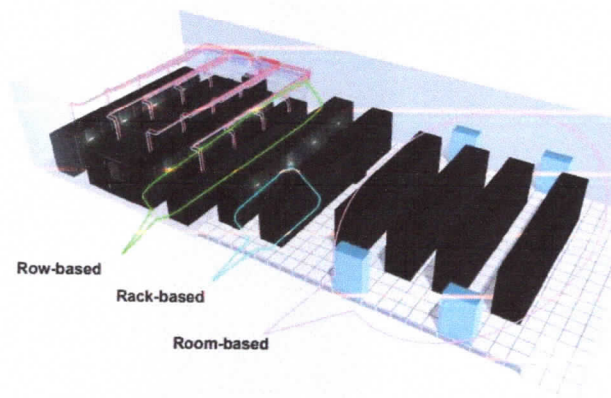
Pendingin berbasis rak adalah metode pendingin yang menggunakan unit pendingin yang ditempatkan di dalam atau di atas rak perangkat IT. Unit pendingin ini mengeluarkan udara dingin secara langsung ke dalam rak perangkat IT dan kemudian menyerap udara panas yang keluar dari rak perangkat IT. Unit pendingin ini biasanya menggunakan cairan pendingin (liquid cooling) yang lebih efisien daripada udara pendingin (air cooling).

Keuntungan Metode:

- Sangat efisien dan efektif untuk mendinginkan perangkat IT dengan kepadatan sangat tinggi
- Tidak membutuhkan ruang tambahan untuk unit pendingin
- Tidak membutuhkan lantai terangkat atau plenum langit-langit

Kekurangan Metode ini:

- Membutuhkan modifikasi yang besar pada rak perangkat IT
- Membutuhkan infrastruktur yang mendukung untuk sistem cairan pendingin
- Membutuhkan keahlian dan pengalaman yang khusus untuk instalasi dan pemeliharaan



Gambar 45 Rack Row Based

6. Fire Suppression System

Fire suppression system merupakan jaringan yang digunakan sebagai pencegahan kebakaran. Ini merupakan sistem yang sengaja dibuat untuk bisa mendeteksi kebakaran sedini mungkin. Kemudian secara otomatis atau manual, sistem ini akan melakukan pencegahan kebakaran terjadi lebih besar dan meluas.

Cara kerja alat ini sebenarnya cukup simple, namun sangat efektif dan efisien. Alat tersebut dilengkapi dengan sensor. Bisa sensor asap maupun sensor panas. Jadi ketika alat mendeteksi adanya asap atau panas, maka alarm akan berbunyi. Kemudian alat ini akan menyemburkan bahan untuk memadamkan sumber api. Tujuannya supaya kebakaran tidak meluas dan cepat

tertangi. Selain itu juga menurunkan risiko kerugian, baik kecelakaan kerja maupun kerugian materi perusahaan.

Data center memiliki banyak hal yang harus dilindungi. Oleh karena itu, kebakaran hampir tidak boleh terjadi dalam ruangan ini. Penggunaan fire suppression system akan membantu melindungi data perusahaan Anda. Baik dari kelalaian manusia maupun korsleting alat.

Data Center Fire Suppression System terdiri atas

- Tabung kompresor atau akumulator.
- Alat berat.
- Tabung pemadam kebakaran.
- Sensor panas atau asap.
- Pipa polimer untuk penghubung.
- Lampu sirene.
- Dan Lainnya

Tabung kompresor akan dihubungkan dengan alat berat. Alat berat tersebut memiliki tugas mengatur tekanan gas. Kemudian, tabung kompresor ini akan terhubung dengan tabung pemadam kebakaran. Tabung kebakaran ini biasanya berisi foam atau CO₂. Selanjutnya dibutuhkan pipa polimer yang akan dimanfaatkan sebagai penghubung antar jaringan. Pipa ini juga yang akan digunakan untuk media pemadam lewat saat terdeteksi kebakaran.

Kemudian, pipa tersebut juga dihubungkan dengan sensor asap atau panas, lampu sirene, dan alarm. Jadi ketika sensor ini mendeteksi asap atau panas, akan mengirimkan sinyal berupa sirene atau alarm. Kemudian tak berselang lama, foam atau CO₂ akan disebarkan di area kebakaran.

7. Sistem Pengkabelan

Pengkabelan data center menghubungkan berbagai macam komponen peralatan serta sistem data center, guna menyediakan interkoneksi jaringan dan pengiriman daya. Ada 3 jenis utama pengkabelan data center yang digunakan di seluruh dunia, yaitu fiber optics, daya AC/DC, dan kabel tembaga. Sebelum memilih jenis kabel, pertama-tama Anda harus memeriksa interface data

center Anda, dan juga harus tahu persyaratan bandwidth pada peralatan data center Anda.

Kepatuhan terhadap standar ini memastikan interoperabilitas dan kompatibilitas dengan lingkungan jaringan global.

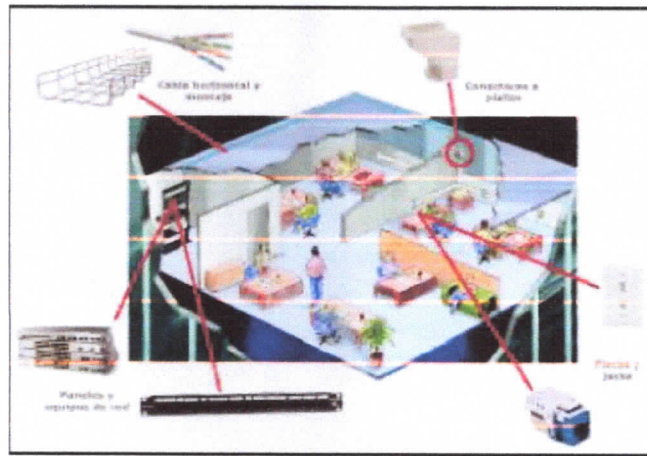
Elemen Struktur Perkabelan

1. Horizontal Cabling
2. Backbone Cabling
3. Area Kerja (WA)
4. Ruang Telekomunikasi (TR)
5. Peralatan Ruangan
6. Entrance Facilities
7. *Administration* (TIA/EIA-606)

A) Horizontal Cabling

Sistem pengkabelan horizontal terdiri dari kabel-kabel yang tersusun secara horizontal, terminasi mekanikal, dan patch cords (jumper). Pengertian horizontal disini adalah sistem pengkabelan akan berjalan secara horizontal baik diatas lantai ataupun di bawah atap. Ada beberapa servis atau system yang harus diperhatikan ketika mendesain suatu sistem pengkabelan secara horizontal, yaitu:

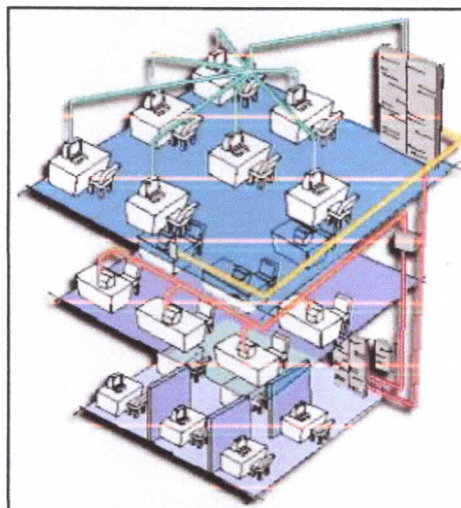
1. Servis telekomunikasi meliputi suara, modem dan faksimile
2. Perlengkapan dasar switching
3. Koneksi manajemen komputer dan telekomunikasi
4. Koneksi keyboard/video/mouse (KVM)
5. Komunikasi data
6. Wide Area Network (WAN)
7. Local Area Network (LAN)
8. Storage Area Network (SAN)
9. Sistem pemberian isyarat lainnya pada gedung (seperti kebakaran, keamanan, energi, HVAC, EMS, dan lainnya)



Gambar 46 Horizontal Cable

B) Backbone Cabling

Fungsi dari sistem pengkabelan backbone adalah untuk menyediakan koneksi antara main distribution area, horizontal distribution area, dan merupakan entrance area. Sistem pengkabelan backbone terdiri dari kabel *backbone*, *main cross-connect*, *horizontal cross-connect*, *terminasi mekanikal*, dan *patch cord (jumper)* yang digunakan untuk koneksi silang *backbone-to-backbone*. Sistem pengkabelan secara backbone harus mendukung kebutuhan konektivitas yang berbeda, misalnya LAN, WAN, SAN, saluran komputer, dan koneksi console perangkat. Pada dasarnya performansi transmisi tergantung dari karakteristik kabel, perangkat keras yang terhubung, patch cord dan kabel cross-connect, jumlah koneksi, dan perlakuan fisik terhadap kabel tersebut.



Gambar 47 Pengkabelan Backbone

C) Office, Operation Center (Area Kerja)

Area jaringan untuk komunikasi telekomunikasi mencakup semua kabel antara outlet komunikasi dan pengguna, seperti telepon, workstation, dan printer. Area kabel sistem perlu dirawat, dan proses instalasi melibatkan penempatan area outlet dan menggunakan standar yang sama (T568A atau T568B) di seluruh sistem.

D) Telecom Room (Telekomunikasi)

Daerah tertutup, seperti ruang atau lemari, peralatan telekomunikasi perumahan, frame distribusi, terminasi kabel dan lintas menghubungkan. Dengan kata lain, semua perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan kabel horizontal untuk kabel vertikal.

E) Equipment Room (Peralatan Kamar)

Ruang yang rumah membangun sistem telekomunikasi seperti PBXs, server, switch dll, dan penghentian mekanik dari sistem kabel telekomunikasi. Hal ini dianggap berbeda dari lemari telekomunikasi karena kompleksitas komponen itu rumah.

F) Entrance Room (Fasilitas Pintu Masuk)

Berisi pintu masuk layanan telekomunikasi ke gedung, dan mungkin juga mengandung koneksi backbone kampus-lebar.

G) Administrasi Kabel

Ini adalah proses yang meliputi seluruh aspek kegiatan premis kabel yang berhubungan dengan mendokumentasikan, mengelola, dan pengujian sistem, serta kompilasi dan mempertahankan rencana arsitektur untuk sistem.

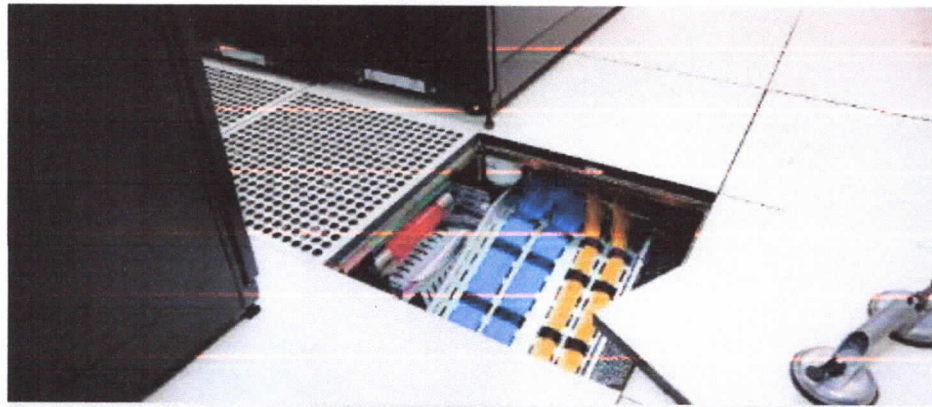
8. Desain Ruang Server

a) Desain Raised Floor

Berikut adalah beberapa alasan mengapa raised floor sering digunakan dalam lingkungan data center:

1. **Manajemen Kabel:** Raised floor menyediakan ruang tambahan di bawah lantai untuk mengelola kabel dan jalur kabel. Ini membantu mengurangi kekacauan kabel di atas lantai dan memudahkan pemeliharaan dan perubahan dalam infrastruktur kabel.

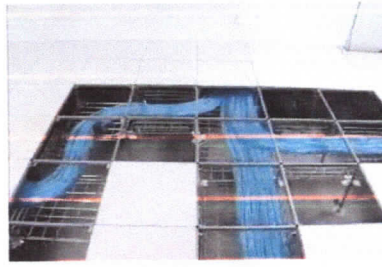
2. **Sirkulasi Udara:** Raised floor memungkinkan sirkulasi udara yang lebih efisien di seluruh pusat data. Udara dingin dapat dialirkan melalui lantai terangkat dan didistribusikan ke peralatan dengan bantuan sistem HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Hal ini membantu menjaga suhu yang optimal di sekitar peralatan server dan mencegah overheating.



Gambar Raised Floor Distribusi Daya

3. **Distribusi Daya:** Raised floor dapat digunakan untuk menyembunyikan sistem kabel daya dan distribusi listrik di bawah lantai. Ini memudahkan penyaluran daya ke peralatan yang membutuhkan, serta meminimalkan risiko kecelakaan dan kerusakan kabel daya.
4. **Skalabilitas dan Fleksibilitas:** Raised floor memungkinkan fleksibilitas dalam merancang dan mengatur tata letak peralatan di dalam data center. Anda dapat dengan mudah menambah, mengubah, atau memindahkan peralatan dengan mengatur ulang kabel dan jalur di bawah lantai, tanpa perlu melakukan perubahan besar pada infrastruktur fisik.
5. **Kebersihan dan Pemeliharaan:** Raised floor memberikan lapisan tambahan antara peralatan dan lantai fisik. Ini membantu melindungi peralatan dari debu, kotoran, dan cairan yang mungkin ada di lantai. Raised floor juga memudahkan akses ke ruang di bawah lantai untuk pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

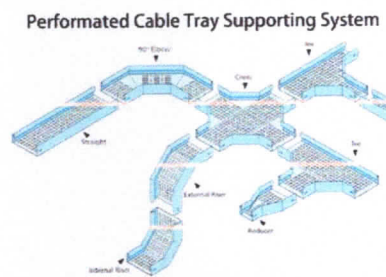
1) Bawah Raised Floor



Gambah Bawah Raised Floor

- 2 cable tray untuk listrik & data
- Standar TIA-569-B : kabel data dan listrik terpisah minimal 61 cm

2) Atas Rack Server

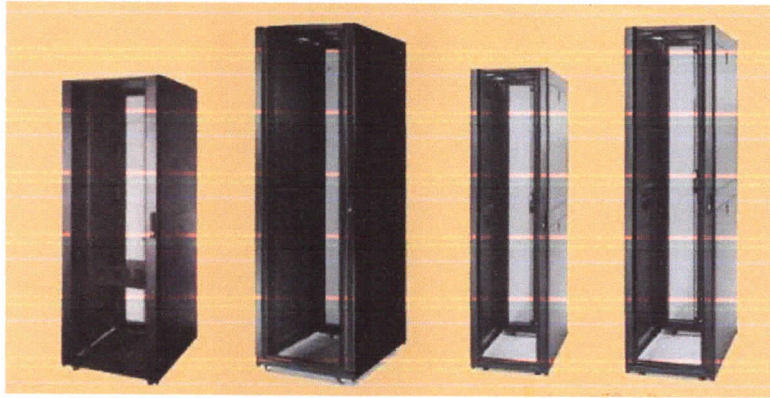


Gambah Atas Rack Sserver

3) Rack Location Unit

Rack system merupakan rack yang secara khusus memang dirancang sebagai penempatan server atau digunakan juga sebagai peralatan jaringan network diantaranya komputer server dan switch. Adapun manfaat utama rack server ini adalah sebagai ruang atau tempat yang lebih efisiensi dan menjadi peralatan maintenance menjadi lebih mudah.

Dalam sebuah rack tunggal terdapat beberapa rack server yang ditumpuk di atasnya. Sumber daya jaringan yang lain juga ikut terkonsolidasi hingga mengurangi ruang lantai sesuai yang diperlukan. Konfigurasi rack server juga bermanfaat untuk menyederhanakan pemasangan kabel antara komponen jaringan yang lain.



Gambar 48 Tipe Rack Server

9. Sistem Keamanan Fisik

Keamanan fisik sangat penting untuk membantu mencegah orang yang tidak berwenang memasuki fasilitas data dan untuk mencuri kekayaan intelektual yang berharga atau membahayakan orang atau properti.

Sebenarnya, cara termudah untuk mencuri data adalah dengan mendapatkan akses fisik ke jaringan atau server itu sendiri. Sementara firewall yang kuat dan langkah-langkah keamanan yang di dunia maya lainnya membantu mencegah akses logis yang tidak sah. Peretas lebih sering membobol pusat data yang didapat dengan mudah menyambungkan ke koneksi IP apa pun. Menyebarkan langkah-langkah keamanan fisik adalah cara terbaik untuk mengurangi bahaya ini. Tindakan keamanan fisik meliputi:

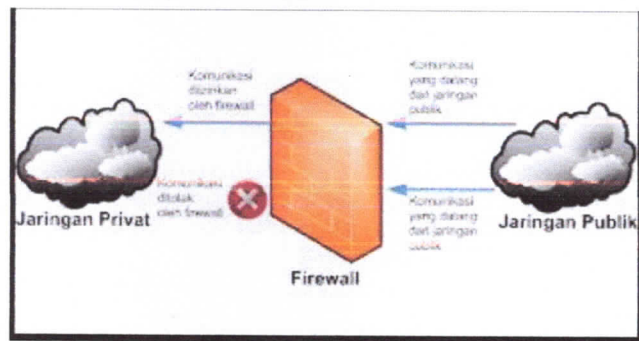
- **Akses pengendalian sistem:** untuk membatasi akses ke Data Center, hanya untuk personel yang diizinkan.
- **Kamera keamanan:** untuk memonitor Data Center dari aktivitas yang mencurigakan.
- **Autentikasi biometrik:** untuk memastikan bahwa hanya personel yang diizinkan yang dapat mengakses pusat data.
- **Kontrol lingkungan:** untuk melindungi Data Center dari bencana alam dan pemadaman listrik.
- **Perimeter keamanan fisik:** untuk mencegah akses tanpa otorisasi ke Data Center.

Tindakan keamanan jaringan meliputi:

- **Firewall:** untuk melindungi pusat data dari akses tanpa otorisasi dan ancaman siber.

- **Deteksi Intrusi dan Sistem Pencegahan:** sistem untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber.
- **Enkripsi:** untuk melindungi data yang ditransmisikan melalui jaringan.
- **Virtual Private Network (VPN):** untuk mengamankan akses jarak jauh ke Data Center.
- **Segmentasi jaringan:** untuk membatasi potensi pelanggaran keamanan.

Pusat data dapat membantu mencegah ancaman dunia maya dengan memasang pintu masuk keamanan di titik masuk dan keluar di sekeliling fasilitas dan di titik akses internal yang kritis. Pintu masuk keamanan tersedia dalam berbagai konfigurasi untuk melindungi dari entri tidak sah yang dapat secara serius meningkatkan risiko serangan siber pada fasilitas, dan harus dianggap sebagai komponen penting dari praktik terbaik keamanan siber pusat data.



Gambar 49 Keamanan Fisik (Firewall)

10. Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center)

Disaster recovery (DR) adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk memulihkan operasi bisnis setelah terjadinya bencana atau gangguan yang signifikan. Tujuan dari disaster recovery adalah untuk mengurangi dampak negatif pada bisnis dan memastikan kelangsungan operasional secara efektif. DR termasuk dalam rencana bisnis yang bertujuan untuk meminimalkan waktu pemulihan bisnis dan kerugian finansial akibat bencana atau insiden yang tidak terduga. Rencana disaster recovery meliputi berbagai aspek, termasuk pemulihan sistem dan data, pengalihan sementara ke pusat data

lain, dan strategi untuk memastikan bahwa bisnis dapat terus beroperasi dalam kondisi yang sulit.

Tahapan Recovery data pada DRC:

a) Duplikasi Data

Data penting perusahaan harus diduplikasi untuk memastikan bahwa tidak hanya tersimpan di satu lokasi. Dalam situasi ketika terjadi kerusakan pada pusat data atau pusat data center, data penting masih tersedia di lokasi cadangan.

Semua data yang tersimpan di pusat data utama (primary site) akan disalin dan disimpan di pusat data cadangan (secondary site). Data dapat disimpan dalam dua cara, yaitu secara virtual (cloud) dan dengan menggunakan tempat fisik.

b) Mengaktifkan Secondary Site

Ketika bencana terjadi dan mengakibatkan kerusakan pada primary site, maka secondary site akan diaktifkan secara otomatis. Meskipun operasional perusahaan terhenti di primary site, tetapi hal ini hanya berlangsung dalam jangka waktu singkat.

Secondary site akan diaktifkan secara cepat agar operasional perusahaan dapat kembali berjalan. Meskipun kondisinya masih belum stabil, setidaknya aktivitas penting yang harus dilakukan dapat dilanjutkan seperti biasa.

c) Membangun Ulang Primary Site

Setelah secondary site mulai diaktifkan, primary site akan dibangun kembali dengan menggunakan infrastruktur yang baru.

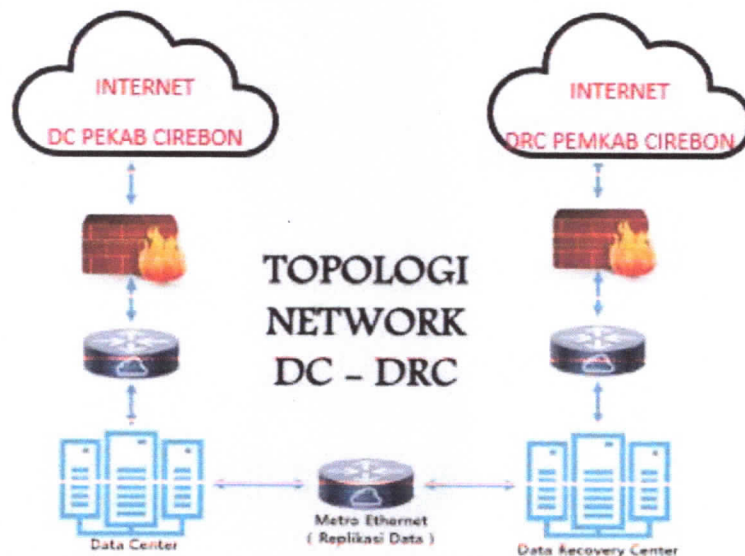
Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa primary site dapat kembali digunakan setelah bencana berakhir. Selama masa pemulihan, data yang disimpan di secondary site akan disalin kembali ke primary site agar aktivitas kerja dapat dilanjutkan seperti biasa dan tidak terjadi perubahan yang signifikan.

d) Pergantian data center

Setelah primary site selesai dibangun, aktivitas perusahaan dapat kembali dilakukan di tempat asalnya. Namun sebelum

itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang menggunakan data dari secondary site terhenti sementara. Setelah tahap sebelumnya selesai, barulah dapat dilaksanakan proses pengalihan seluruh operasional perusahaan dari secondary site ke primary site. Dengan demikian, perusahaan dapat kembali beroperasi secara normal seperti sebelumnya.

11. Topologi Data Center dan DRC



Gambar 50 Usulan Topologi DC dan DRC

Kondisi saat ini, Diskominfo Kabupaten Cirebon belum memiliki Pusat Pemulihan Bencana atau DRC. Pengembangan Pusat Pemulihan Bencana dapat menggunakan jasa dari pihak ketiga yakni penyedia layanan colocation server atau Virtual Private Server (VPS). Jika Diskominfo akan melakukan Colocation Server untuk DRC berikut ini usulan untuk topologi dan jarak DRC.

Berikut ini adalah konfigurasi sinkronisasi DC – DRC:

1. Router WAN

Menghubungkan DC dan DRC menggunakan layanan WAN yakni Metro-E atau VPN-IP dari pihak ketiga (provider)

2. Load Balancer Aplikasi (HA Proxy)

Jika server aplikasi lebih dari satu unit, maka digunakan load balancer untuk membagi beban kerja dan juga menjaga ketersediaan aplikasi. Jika salah satu server aplikasi mengalami

kegagalan, maka server satunya masih dapat melayani pengguna.

3. **Application Server (Server Aplikasi)**

File aplikasi (.php), file hasil olah aplikasi, atau file yang diunggah oleh pengguna (.xls, .pdf, .doc) ditempatkan di file server dengan metode folder sharing (Network File Sharing – NFS).

4. **Database Server (Server Pangkalan Data)**

Pangkalan data dikonfigurasi dengan sistem cluster (lebih dari satu instance) yang tersinkronisasi secara otomatis. Selain itu dengan sistem cluster jika terjadi kegagalan pada satu server maka server lainnya akan menggantikannya secara otomatis.

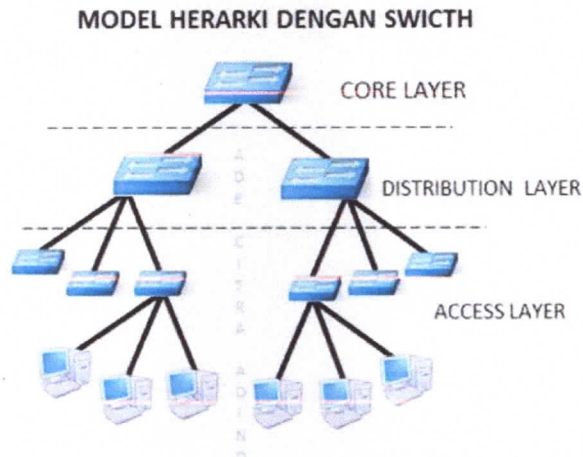
4.2.3 Usulan Jaringan Intra Pemerintah

Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

1) Topologi Jaringan Hirarki

Topologi Jaringan Hirarki adalah sebuah topologi jaringan yang susunan jaringannya menyerupai pohon bercabang. Topologi ini terdiri dari komputer host yang di hubungkan ke node atau simpul secara bertahap dan tingkatan yang lebih tinggi akan mengatur kerja tingkatan yang lebih rendah.



Gambar 51 Topologi Jaringan Hirarki

a. Core Layer

Core layer pada layer ini bertanggung jawab untuk mengirim traffic secara tepat dan andal, tujuannya hanyalah men-switch traffic secepat mungkin. Core layer memberikan struktur transportasi yang optimal dan dapat diandalkan dalam meneruskan traffic pada kecepatan yang sangat tinggi.

Device yang digunakan pada layer ini adalah:

1. Mesin core.vad.id, BSD Minded dipadukan dengan cisco catalyst L3.
2. Router
3. Multiplexer
4. PBX

b. DISTRIBUTION LAYER

Distribution layer bekerja untuk mengontrol arus lalu lintas jaringan dengan pengawasan dan perencanaan broadcast domain yang dilakukan oleh fungsi routing antara virtual LANs (VLANs) ditetapkan pada access later. VLANs memungkinkan untuk mengelompokkan lalu lintas pada switch ke subnetwork yang terpisah, fungsi utamanya adalah routing, filtering, akses, WAN, dan menentukan akses core layer jika diperlukan.

Perangkat *distribution layer*:

1. Cisco Catalyst 6509
2. Nexus 7000
3. ASA 5500
4. Switch layer 3

5. Firewall
6. Router LAN
7. Bridge
8. Brouter
9. VPN Access Router
10. Cisco Catalyst 6009 Layer 2 Core.

c. **ACCESS LAYER**

Layer Acces adalah untuk menyediakan sarana untuk menghubungkan perangkat ke jaringan dan mengontrol perangkat yang diizinkan untuk berkomunikasi pada jaringan. dan perangkat yang digunakan seperti PC printer dan IP telephone. Access layer menyuplai trafik ke jaringan dan melakukan network entry control. Para pengguna mengakses jaringan melalui access layer.

Device yang digunakan adalah

1. Cisco 1900 series integrated services router
2. Cisco 2900 series integrated services router
3. Cisco 3900 series integrated services router
4. Cisco 800 series routers

2) Zonasi (Zoning)

Proyek desain jaringan besar dan implementasi jaringan besar pada umumnya terdiri dari area yang berbeda atau zona. Arsitektur terdiri dari beberapa zona sebagai berikut:

a. Zona Inti (Core)

Zona inti menghubungkan semua zona lainnya dan merupakan infrastruktur berkecepatan tinggi yang menyediakan transportasi Layer 2 dan Layer 3 yang andal dan dapat diukur. Core biasanya diimplementasikan dengan penggunaan dua unit switch (redundant) untuk menghubungkan ke zona Perangkat Daerah, pusat data, WAN edge dan Internet edge.

b. Pusat Data (Data Center)

Pusat data menampung server, aplikasi, dan perangkat penyimpanan untuk digunakan oleh pengguna internal. Pusat data juga menghubungkan infrastruktur jaringan.

Pusat data tidak dapat diakses langsung dari Internet untuk masyarakat umum.

c. Perangkat Daerah

Jaringan Perangkat Daerah menyediakan akses jaringan ke pengguna dan perangkat akhir (endpoint) yang terletak di satu lokasi. Jaringan tersebut dapat menjangkau beberapa lantai dalam satu bangunan atau beberapa bangunan untuk Pemerintah Kabupaten.

d. Manajemen

Jaringan manajemen menyediakan pemantauan, analisis, otentikasi, dan layanan rekam jejak (logging).

e. Jaringan WAN (Wide Area Network)

WAN adalah bagian dari jaringan yang menghubungkan core jaringan PEMDA dengan Pusat Pemulihan Bencana (DRC) yang jauh secara geografis dengan pusat data.

f. Jaringan MAN (Metropolitan Area Network)

MAN adalah bagian dari jaringan yang menghubungkan Perangkat Daerah, kecamatan dan UPTD yang cukup jauh secara geografis dengan pusat data tetapi masih dalam satu area kabupaten.

g. Internet

Internet adalah infrastruktur yang menyediakan konektivitas Internet dan yang bertindak sebagai pintu gerbang (gateway) ke seluruh dunia. Layanan Internet termasuk akses De-Militarized Zone (DMZ), internet pengguna dilingkungan Pemerintah Kabupaten, dan akses jarak jauh Virtual Private Network (VPN).

3) Redudansi

Desain jaringan redundant untuk memenuhi persyaratan ketersediaan jaringan. Redudansi akan menghilangkan titik tunggal dari kegagalan (single point of failure) pada jaringan. Tujuannya adalah untuk menduplikasi komponen yang penting (utama) untuk menghindari aplikasi penting tidak dapat diakses. Redudansi meliputi:

- a. Duplikasi Komponen Kritis (Duplicating High Critical Component)

Komponen utama krisis yang perlu adanya prinsip redundancy seperti switch core, firewall, router internet diduplikasikan dengan konfigurasi *High Availability* (HA) sehingga jika salah satu perangkat mengalami gangguan maka masih ada perangkat cadangan.

- b. Koneksi dan Jalur Cadangan (Backup Path)

Untuk menjaga interkoneksi ketika satu atau lebih jalur utama sedang terputus, maka lalu lintas paket data akan melalui jalur cadangan secara otomatis. Untuk melakukan proses otomatisasi perpindahan jalur utama ke cadangan maka diimplementasikan protokol rute (routing protocol) tertentu.

4.2.4 Usulan Pengembangan Jaringan Data

Untuk Pengembangan Infrastruktur Jaringan Data harus dikembangkan karena semakin besarnya lalu lintas data, proses, pengguna serta keamanannya semakin meningkat. Pendekatan Zonasi dalam pengembangan infrastruktur Jaringan Pemerintah Daerah dinilai lebih efektif dalam pengembangan skalabilitas sesuai dengan fungsi dan layanan dalam zona tersebut.

1. Zona Jaringan Inti (Core Network)

Merupakan zona interkoneksi antar zona. Perangkat pendukung zona jaringan inti adalah Switch Layer 3 dengan kapasitas besar untuk menangani lalu lintas data antar zona. Perangkat switch Core ini sebaiknya tidak digunakan untuk fungsi lainnya seperti DHCP server, dan lainnya.

2. Zona Jaringan Antar Gedung (Campuss Network)

Jaringan lokal yang ada di setiap gedung –gedung di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berdekatan dengan kantor Kominfo dapat dikelola dalam satu jaringan lokal yakni jaringan antar gedung (Campuss Network).

3. Zona Data Center (Server Farm)

Server-server database, file server, storage yang tidak langsung diakses oleh pengguna ditempatkan di zona Server Farm.

4. Zona Internet (Internet Edge)

Zona internet adalah zona yang melayani akses internet pengguna atau akses ke aplikasi web internet Pemerintah Kabupaten Cirebon Selain itu, terdapat De-Militarized Zone (DMZ) untuk lokasi server – server yang diakses oleh publik melalui internet seperti web server, mail server, dan cloud file server. Interkoneksi dari web server ke database server atau file storage harus difilter terlebih dahulu oleh firewall.

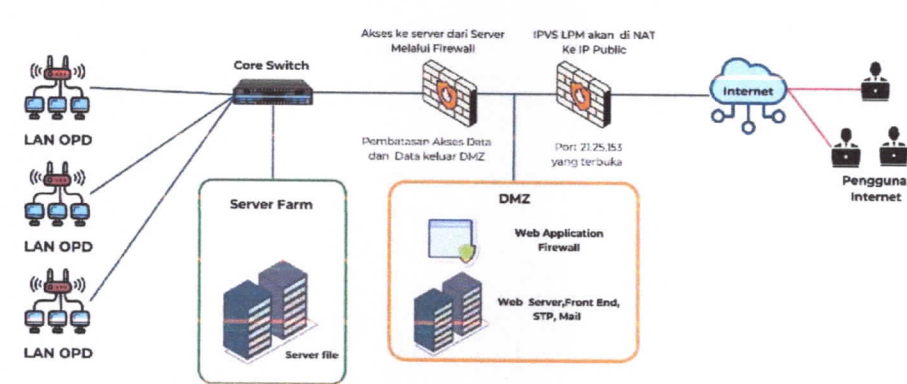
5. Zona Jaringan Antar OPD (MAN)

Interkoneksi antara pusat data dengan SKPD/UPT ada di zona Metropolitan Area Network (MAN) dengan koneksi menggunakan kabel jaringan fiber optic atau radio link. Setiap SKPD/UPT memiliki jaringan lokal komputer (LAN) sendiri. Sehingga akses ke server atau internet dari SKPD/UPT menggunakan protokol routing seperti static route.

6. Zona Jaringan Antar Kementerian/Lembaga (WAN)

Interkoneksi antara pusat data dengan kementerian atau lembaga lainnya berada di zona Wide Area Network (WAN). Interkoneksi ini menggunakan jaringan Metro-E atau VPN-IP dari penyedia layanan WAN (provider). Pembatasan akses ke server – server di Pusat Data seperti alamat IP, port, dan lainnya akan dikonfigurasi di router WAN.

Dalam Pelaksanaan Zonasi server terbagi menjadi dua metode yaitu server farm dan Server DMZ. Berikut gambar pelaksanaan Zonasi tersebut.



Gambar 52 Topologi Zonasi server Farm dan Dmz

Berdasarkan gambar topologi di atas sebagai berikut:

1. Koneksi internet dibagi menjadi 2 (dua) layanan yakni:
 - a. IP Transit yang digunakan untuk akses internet server.
 - b. Broadband yang digunakan untuk akses internet komputer pengguna, perangkat bergerak (laptop), maupun telepon cerdas (smartphone).
2. Koneksi internet IP Transit maupun Broadband menggunakan 2 (dua) penyedia layanan internet (ISP).
3. Perangkat inti dan kritis sudah redundant seperti:
 - a. router internet IP Transit maupun router internet Broadband.
 - b. Next-Generation Firewall (NG-Firewall).
 - c. Core Switch.
 - d. Switch Server.
4. DMZ digunakan untuk penempatan server - server yang diakses oleh publik/masyarakat melalui internet seperti web server aplikasi, mail server, dan cloud storage. Switch server DMZ langsung terkoneksi ke NG-Firewall.
5. Server Farm digunakan untuk penempatan server - server yang hanya dapat diakses dari dalam jaringan Diskominfo antara lain server Database, File Server, DNS Server, NTP Server, DHCP, dan lain - lain. Switch Server Farm langsung terkoneksi ke Switch Core.
6. Jaringan Lokal (LAN) Gedung A, dan B merupakan koneksi komputer, printer, dan lainnya yang berada satu gedung (Diskominfo) dengan perangkat jaringan utama. Jaringan LAN terdiri dari jaringan kabel (wired) dan non-kabel (wireless). Pengaturan perangkat Access Point pada jaringan wireless menggunakan Wireless Controller yang terkoneksi dengan Switch Core.
7. Jaringan Dalam Kota (MAN) merupakan koneksi antar LAN di setiap kantor OPD yang tersebar di beberapa lokasi. Interkoneksi menggunakan media fiber optic atau radio link (wireless).
8. Jaringan Skala Luas (WAN) merupakan koneksi antara jaringan Diskominfo dengan Kementerian/Lembaga lain. Interkoneksi menggunakan layanan VPNIP atau Metro-E

4.2.5 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data, sistem aplikasi, Layanan SPBE, dan kanal-kanal perangkat IoT dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi sehingga dapat melakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.

Target Pengguna layanan ini adalah wali data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (Unit Kerja IT K/L dan Dinas Kominfo Daerah). Saat ini sudah 20 instansi pusat dan 145 pemerintah daerah yang telah menggunakan layanan SPLP.

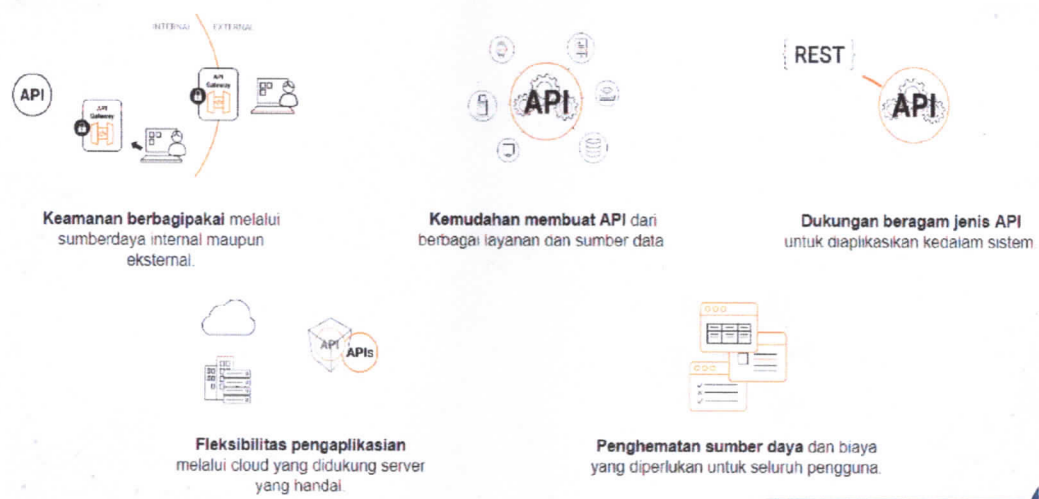
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memiliki fungsi Enterprise Service Bus (ESB), API Management, Katalog, dan Gateway, dan Konsolidasi Data atau *Extract Transform Load* (ETL), SDK Komponen Umum Aplikasi, dan Single Sign On. SPLP yang dikembangkan juga menyediakan fitur *multi-tenant* dan *mutli-account* dalam mendukung Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung pemanfaatan Pusat Data Nasional.

SPLP dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) memiliki tugas untuk menyediakan fasilitas layanan sistem penghubung yang dapat dipergunakan untuk melakukan manajemen API dan interoperabilitas data antar aplikasi. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat antara stakeholder SPBE dan SDI.

Sistem penghubung layanan pemerintah adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dengan tujuan antara lain:

1. Efisiensi kerja;
2. Mewujudkan layanan yang cepat, mudah, dan murah;
3. Meningkatkan tingkat ketersediaan, dan validitas data; dan
4. Dapat melakukan prediksi dan analisis untuk sistem pengambil keputusan (Decision Support System).

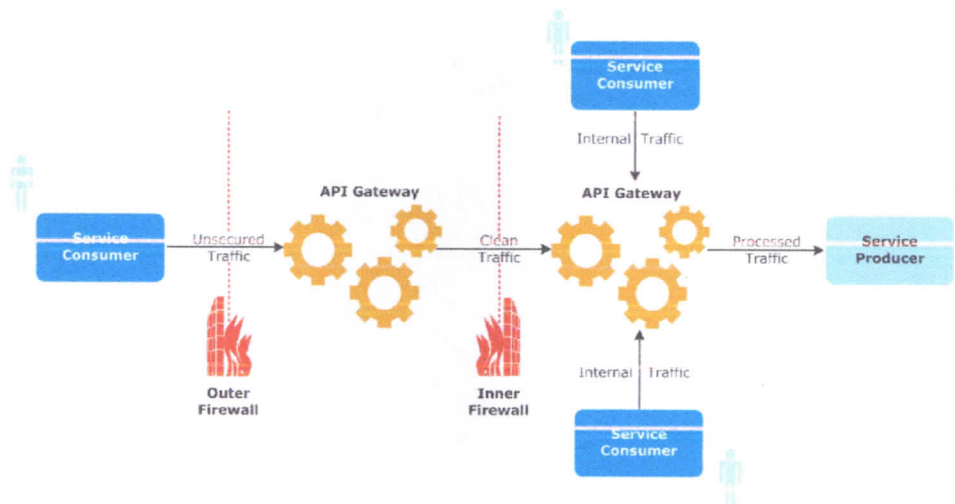
hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role yang telah ditentukan sebelumnya oleh Admin Penyelenggara **SPLP Nasional** atau Admin **SPL-IPPD**.



Gambar 55 Integrasi API Manager

Usulan Sistem Penghubung Layanan

Keamanan pertukaran data dan tingkat ketersediaan API Manager harus disesuaikan dengan proses bisnis, kebutuhan dan keamanan maka diperlukan pemisahan API Manager yaitu API Gateway Internal dan API Gateway Eksternal. API Gateway internal berfungsi untuk tempat pertukaran data yang terjadi di lingkungan internal pusat data (intra net). Sedangkan API Gateway eksternal digunakan untuk pertukaran data di luar ususan Pemerintah Daerah seperti Kementerian/Lembaga lain melalui jalur internet



Gambar 56 Penerapan API Gateway

4.2.5. Keamanan Informasi SPBE

4.2.5.1 Arsitektur Keamanan SPBE

Keamanan informasi selalu menjadi subjek yang kompleks, dan berkembang dengan cepat dengan ide-ide kreatif dan implementasi penyerang dan peneliti keamanan. Keamanan adalah salah satu aspek terpenting dari arsitektur apapun. Keamanan yang baik memberikan kerahasiaan, integritas, dan jaminan ketersediaan terhadap serangan yang di sengaja dan penyalahgunaan data dan sistem berharga Anda. Dalam penyelenggaraan SPBE, Arsitektur keamanan SPBE merupakan aspek vital dalam usaha organisasi untuk melindungi aset-aset penting yang dimilikinya. Arsitektur keamanan menjelaskan bagaimana struktur, komponen-komponen, hubungan antar komponen dan tata letak kontrol-kontrol keamanan yang diterapkan pada infrastruktur TI organisasi. Arsitektur keamanan mengilustrasikan bagaimana sebuah organisasi menerapkan pertahanan mendalam, serta bagaimana lapisan-lapisan kontrolnya berhubungan satu dengan lainnya. Desain dan implementasi kontrol-kontrol keamanan yang berlapis ini sangat penting terutama untuk lingkungan yang cukup kompleks. Setiap komponen pada arsitektur tersebut juga mengandung risiko keamanan. Mengingat kondisi yang berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya, maka analisis dan desain arsitekturnya mesti mempertimbangkan variabel dan risiko spesifik yang mungkin terjadi pada masing- masing organisasi.

Keamanan SPBE mencakup sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE yang meliputi:

- a. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya,
- b. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi,
- c. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan,
- d. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

4.2.5.2 Kondisi yang diinginkan Arsitektur Keamanan SPBE

1. ISO 27001:2022 Pusat Data

ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur Sistem Manajemen Keamanan Informasi (*Information Security Management System/ISMS*). Standar ini dirilis oleh International Organization for Standardization (ISO) dan International Electrotechnical Commission (IEC). ISO 27001 memberikan kerangka kerja dan pedoman untuk mengelola risiko keamanan informasi dalam suatu organisasi.

Tujuan utama dari ISO 27001 – Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) adalah menjaga kerahasiaan, kesatuan, dan ketersediaan dari informasi dengan menerapkan proses manajemen risiko dan memberikan kepercayaan ke pihak-pihak terkait. Standar ini didasarkan pada pendekatan sistematis untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

Untuk melakukan penilaian terhadap risiko keamanan, dibutuhkan kontrol. Ada 14 ruang lingkup kontrol dalam ISO 27001 yakni:

1. Kebijakan keamanan informasi atau Information Security Policies
2. Keamanan informasi perusahaan atau Organization of Information Security
3. Keamanan SDM (Sumber Daya Manusia) atau Human Resource Security
4. Manajemen aset atau Asset Management
5. Kontrol akses atau Control Access
6. Kriptografi
7. Keamanan fisik dan lingkungan atau Physical and Environmental Security
8. Keamanan operasi atau Operations Security
9. Keamanan komunikasi atau Communication Security
10. Akuisisi, pengembangan serta pemeliharaan sistem atau System Acquisition, Development and Maintenance
11. Hubungan dengan pemasok atau Supplier Relationship

12. Manajemen Insiden Keamanan Informasi atau Information Security Incident Management
13. Aspek keamanan informasi dan manajemen bisnis berkelanjutan atau Information Security Aspects of Business Continuity Management
14. Kepatuhan atau Compliance

2. Penerapan Keamanan

Edukasi kesadaran keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran. Penilaian kerentanan keamanan SPBE harus dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi seluruh sset SPBE dengan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sset SPBE serta pengukuran tingkat risiko keamanan SPBE. Peningkatan keamanan SPBE harus dilaksanakan berdasarkan hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan wajib dilaksanakan melalui kegiatan penerapan standar teknis dan prosedur keamanan dan pengujian kontrol keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan infrastruktur. Penanganan insiden keamanan yang wajib dilaksanakan adalah:

- 1) identifikasi sumber serangan;
- 2) analisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya;
- 3) penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang terjadi;
- 4) dokumentasi bukti insiden yang terjadi;
- 5) mitigasi atau pengurangan dampak risiko keamanan SPBE;
- 6) penghapusan konten yang bersifat destruktif dan/atau terkait malware.

3. Kelaikan Keamanan

Kelaikan keamanan dilakukan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan secara self assessment (penilaian mandiri) oleh setiap Perangkat Daerah yang menjadi penggerak aplikasi umum dan infrastruktur SPBE nasional yang akan ditetapkan. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap self assessment tersebut sebagai tahapan untuk mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan oleh

lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber/BSSN.

4. Area Keamanan

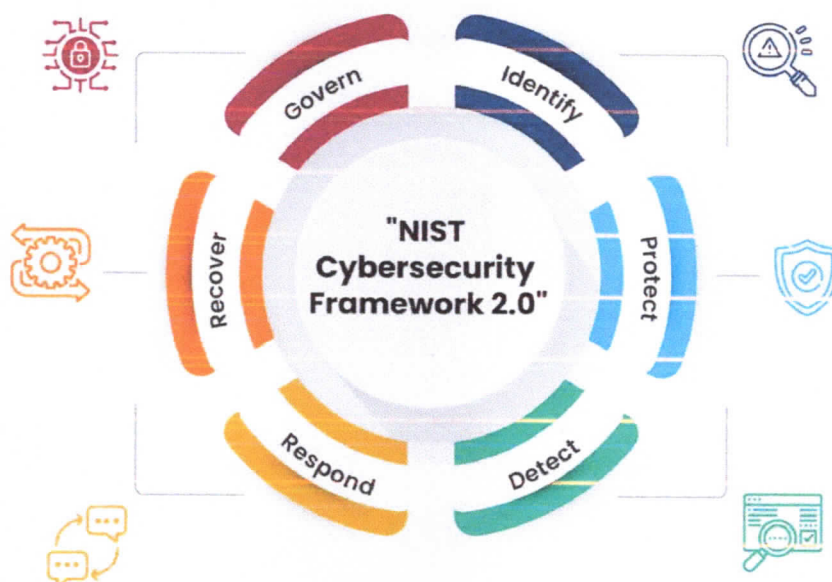
- a. Data dan informasi, yaitu harus terpenuhinya aspek: kerahasiaan; keaslian; keutuhan; ke-nirsangkalan; ketersediaan untuk data dan informasi.
- b. Aplikasi SPBE, yaitu diterapkannya keamanan pada:
 - 1) Aplikasi berbasis web, yaitu dalam Aplikasi SPBE berbasis web harus memiliki fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan kontrol akses, validasi input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan error dan pencatatan log, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya, logika bisnis, file, keamanan API dan web service, dan keamanan konfigurasi.
 - 2) Aplikasi berbasis mobile, yaitu pada aplikasi SPBE berbasis mobile harus terpenuhi fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi, kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan, interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan build dan ketahanan.
 - 3) Keamanan Server (application layer), yaitu berfungsi sebagai keamanan pada lapisan aplikasi dalam hal ini penjaminan terhadap isi atau data permintaan dari client benar-benar data yang benar, bukan berisi virus, trojan atau ancaman lainnya.
- c. Sistem Penghubung Layanan, yaitu adanya keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan web service, dan keamanan migrasi data.
- d. Pusat Data Nasional, Pusat Data nasional terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan/ atau Pusat Data Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu. Penggunaan Pusat Data nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam

memanfaatkan sumber daya Pusat Data nasional oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Aktivitas Keamanan Informasi

Keamanan Informasi SPBE yang dijalankan di Diskominfo Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penerapannya mengacu pada Kerangka Kerja Keamanan (Cyber Security Framework) yang dipublikasikan oleh lembaga US National Institute of Standart and Technology (NIST). Dalam Framework ini menyediakan mekanisme penilaian yang memungkinkan perusahaan menentukan kemampuan cybersecurity saat ini. NIST telah menjadi standar terpopuler untuk menilai keamanan siber, mengidentifikasi celah keamanan, dan memenuhi peraturan keamanan siber.

- A. Identifikasi: Mengidentifikasi aset, sistem, dan data yang perlu dilindungi.
- B. Protect: Melindungi aset informasi dari ancaman.
- C. Deteksi: Mendeteksi aktivitas keamanan siber yang mencurigakan.
- D. Respon: Mengembangkan dan mengimplementasikan aktivitas untuk merespon insiden keamanan siber.
- E. Recover: Mengembangkan dan mengimplementasikan rencana untuk memulihkan layanan yang terganggu akibat insiden keamanan siber.



Gambar 57 Kerangka Kerja Cybersecurity 2.0

6. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.

Evaluasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Cirebon akan dilakukan di beberapa area target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2009, yaitu:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi
2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
3. Kerangka Kerja Keamanan Informasi
4. Pengelolaan Aset informasi
5. Teknologi dan Keamanan Informasi
6. Peran TIK

BAB V

PENUTUP

Dokumen Arsitektur SPBE ini disusun guna memberikan gambaran kondisi eksisting dan kondisi usulan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Kabupaten Cirebon sehingga menjadi panduan bagi Pemerintah Kabupaten Cirebon agar lebih terarah dan tepat sasaran serta terintegrasi dengan beberapa pihak yang terlibat di dalam Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pj BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580
email : diskominfo@cirebonkab.go.id
S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Tanggal : 1 Agustus 2024
Nomor : 500.12.6/881/SPeGov
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Tentang Penetapan Pedoman Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon sebagai tindak lanjut amanat Perpres No 132 tahun 2022 tentang SPBE dan Peraturan Bupati No 96 Tahun 2022 tentang SPBE yang juga merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Bupati.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyusun Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Cirebon.

Selanjutnya, mohon kiranya Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud. Demikian atas perhatian dan berkenaan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon,



BAMBANG SUDARYANTO, SH.,MH.

Pembina Tk. I
NIP. 19781024 200604 1 015

Tembusan :
Yth. Pj. Bupati Cirebon